

ABSTRAK

Tesis yang berjudul: HAK ISTRI TERHADAP MAHAR DAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN DALAM NIKAH TAFWIDH (Studi Analisis Pemikiran Imam Asy-Syafi'i), ditulis dengan latar belakang pemikiran bahwa masalah mahar dan mut'ah dalam pernikahan merupakan hal yang sangat urgen dan perlu untuk dikaji, karena mahar dan mut'ah khusus bagi wanita (istri) dan kedua macam ini merupakan salah satu hak istri dari berbagai haknya, sebagai simbol penghargaan dan penghormatan dalam pernikahan, serta untuk menghibur hatinya tatkala perceraian mesti terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Bila pada pernikahan yang tidak ditentukan maharnya tatkala akad nikah (nikah *tafwidh*) dilaksanakan, kemudian terjadi perceraian di antara kedua suami istri, maka apakah hak istri masih tetap mendapatkan mahar atau *mut'ah*.

Penelitian ini memberikan kupasan-kupasan kritis yang dekonstruksionis atas paham pembentukan keluarga melalui pernikahan dan memutuskan ikatan pernikahan melalui perceraian (thalak) dalam nikah *tafwidh*. Imam Asy-Syafi'i sangat concern terhadap persoalan-persoalan kehidupan dalam kerangka berpikir yang jauh dari metode taklid dengan pemahaman yang logis, sangat relevan dengan permasalahan ini.

Imam Al-Syafi'i merupakan seorang *fakih* pertama yang menulis metodologi fikih (ushul fikih) dalam kitabnya *al-Risalah* serta mengkonsentrasikan pemikirannya dalam hukum Islam dan dianggap representatif untuk mewakili pemikiran *ahl al-ra'yi* (Irak) dan *ahl al-hadits* (Madinah). Perbedaan dasar pemikiran Imam Al-Syafi'i terlihat dalam mendalami suatu hukum, dimana menurut beliau sumber-sumber hukum *syari'at* harus melalui tingkatan-tingkatan, yaitu al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan Qiyas. Hasil pemikiran beliau pun terlihat dalam *qaul qadim* (fikih lama), yaitu pendapat-pendapat Imam Al-Syafi'i ketika menetap di Irak dan *qaul jadid* (fikih baru), yaitu pendapat-pendapat Imam Al-Syafi'i ketika menetap di Mesir. Pada kedua *qaulnya*, Imam Al-Syafi'i menyatakan bahwa istri berhak menerima mahar *mitsl* bila terjadi perceraian jika sudah campur (*dukhu*) dalam nikah *tafwidh*, tetapi bila belum campur (*dukhu*) maka istri tidak mendapatkan mahar *mitsl* dan tidak juga mendapat *mut'ah*. Terdapat perbedaan mengenai kadar mahar yang diterima oleh istri pada *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadidnya*. Pada *qaul jadid*, Imam Al-Syafi'i mengatakan istri hanya berhak memperoleh seluruh mahar apabila sudah terjadi persetubuhan. Sebaliknya pada *qaul al-qadim*, ia mengatakan istri berhak memperoleh seluruh bagian mahar walaupun belum terjadi persetubuhan. Kedua pendapat beliau ini tentu didukung oleh dalil-dalil yang digunakannya.

Masalah Pokok dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan mahar dan mut'ah bagi istri menurut sistem perkawinan dan bagaimana pandangan Imam al-Syafi'i tentang hak istri terhadap mahar dan mut'ah pasca perceraian dalam nikah *tafwidh*.

Tujuan penelitian utama penelitian ini ada dua, yaitu untuk mengetahui kedudukan mahar dan mut'ah dalam pernikahan serta untuk mengetahui pandangan Imam al-Syafi'i tentang hak istri terhadap mahar dan mut'ah pasca perceraian dalam nikah *tafwidh*.

Penelitian diharapkan berguna Memberi penjelasan mengenai kedudukan mahar dan mut'ah dalam pernikahan, memberikan penjelasan tentang pandangan Imam al-Syafi'i mengenai hak istri terhadap mahar dan mut'ah pasca perceraian dalam nikah *tafwidh*.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan penelitian *Library Research* (penelitian perpustakaan), yakni dengan menela'ah kitab *al-Umm* karangan Imam Al-Syafi'i yang membahas secara luas tentang *mahar* dan *mut'ah* sebagai adanya konsekwensi akad pernikahan dan pemutusan pernikahan serta kitab-kitab fikih lainnya yang beraliran Syafi'iyah, antara lain seperti: *al-Majmu' al-Syarhul Muhadzdzab*, Syeikh Nawawi, *al-Fikh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Abdurrahman al-Jaziri), *al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, (Muhammad Abu Zahrah), *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibni Qasim*, (Syeikh Ibrahim al-Bajuri), *la'anatut Tholibin*, (Sayyid Abu Bakar), ditambah dengan kitab-kitab fikih ulama lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan ini. Sedangkan pembahasannya menggunakan metode *Content Analysis*.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan Mahar merupakan salah satu yang menjadi syarat legalnya suatu pernikahan dalam Islam. Sehingga mahar wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai bukti kesiapannya untuk membentuk keluarga dengan wanita yang dinikahnya. Mahar disyari'atkan Allah Swt. untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penghormatan yang sangat berharga bagi setiap wanita, ini berarti mahar mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pernikahan. Adapun *Mut'ah* merupakan suatu hukum syar'i yang kedudukannya sebagai ganti rugi akibat thalak (*bain kubra*), dan sebaiknya bagi suami yang menjatuhkan thalak harus memberikan *mut'ah* sebagai suatu kewajiban baginya. Menurut Imam al-Syafi'i, mahar itu wajib dengan sebab adanya akad nikah, walaupun suami tidak menyebutkan mas kawin dan tidak pula bersetubuh (*dukhol*). Sedangkan lelaki yang menikahi wanita tanpa disebutkan mahar (nikah *tafwidh*) ketika akad, kemudian dithalak setelah campur (*dukhol*) ia diwajibkan membayar mahar *mitsl*, tetapi bila dithalaknya sebelum campur (*dukhol*), maka tidak ada mahar *mitsl* dan tidak ada kewajiban *mut'ah* baginya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
TRANSLITERASI	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Teoritis	18
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	25
 BAB II SEKILAS TENTANG KEHIDUPAN IMAM ASY-SYAFI'I	
A. Latar Belakang Kehidupan Imam Asy-Syafi'i	27
B. Pendidikan dan Kehidupan Intelektual Imam As-Syafi'i	32
C. Kondisi Sosial Masa Imam Asy-Syafi'i	37
D. Karya-karya Imam Asy-Syafi'i	41
E. Imam Asy-Syafi'i Dalam Pandangan Ulama	46
 BAB III HAK ISTRI TERHADAP MAHAR DAN MUT'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT SYARI'AT ISLAM	
A. Ruang Lingkup Pengertian Pernikahan dan thalak.....	51
B. Dasar Hukum Pernikahan dan Thalak	74

	C. Hakikat Mahar dan Mut'ah dalam Islam	79
	D. Kualifikasi Hak Istri dalam Masalah Pernikahan dan thalak	93
BAB IV	HAK ISTRI TERHADAP MAHAR DAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN DALAM NIKAH TAFWIDH MENURUT PEMIKIRAN IMAM AI-SYAFI'I	
	A. Kedudukan Mahar dan Mut'ah Bagi Istri dalam pernikahan	103
	B. Hak Istri Terhadap Mahar dan Mut'ah Pasca Perceraian Dalam Nikah Tafwidh Menurut Imam Asy-Syafi'i	122
	C. Metode Pengistimbangan Hukum Imam al-Syafi'i	130
	D. Analisa	137
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	146
	B. Saran-Saran	147

DAFTAR KEPUSTAKAAN

RIWAYAT PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang untuk mengangkat kehormatan manusia, yang tercermin dalam masyarakat Islam, masyarakat yang terdiri dari individu dan kelompok agar terjalin ikatan yang kuat dan kokoh di antara mereka dalam lembaga keluarga, di mana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dalam kata lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam dan hanya menikahlah merupakan cara membentuk lembaga ini.¹ Mubayidh menerangkan bahwa:

“Lembaga perkawinan adalah sesuatu yang memberikan nilai istimewa bagi manusia, dan telah ada sejak lama sepanjang usia umat manusia, yakni telah berlangsung ribuan tahun. Penyebarannya di kalangan berbagai umat dan bangsa merupakan bukti-bukti terpenting lembaga ini dalam kehidupan manusia, sekaligus merupakan indikator bahwa lembaga ini mampu beradaptasi dengan berbagai kebutuhan seluruh individu, masyarakat, budaya, serta peradaban sepanjang sejarah”.²

Mengingat rumah tangga merupakan sendi untuk membentuk suatu kelompok masyarakat. Perhatian Islam terhadap rumah tangga sangat besar untuk menyeru kepada pembentukan dan penegakannya dan mencegah hal-hal yang bisa menghambatnya melalui suatu akad pernikahan. Pernikahan merupakan lembaga interaksi manusia lawan jenis dalam memenuhi kebutuhan biologis dan sosiologis sebagai kebutuhan primer. Dengan lembaga pernikahan keterikatan “jiwa dan raga” manusia yang berlainan jenis, berbeda

¹Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Basri Iba Asghary, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 3

²Makmun Mubayidh, *Saling Memahami Dalam Bahtera Rumah Tangga: Contoh Kasus dan Cara Menyikapi Berbagai Perbedaan Antara Suami dan Istri*, Terjemahan Saefuddin Zuhri dari “*Attafaahum fii-Hayati az-Zaujiyyah*”, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), hlm. 2

budaya, keinginan yang tidak sama, bahkan setatus sosial yang tidak setara dapat menjadikan jalinan kasih sayang dua manusia yang berbeda menjadi erat dan kuat.

Pernikahan menurut pandangan Islam, dilaksanakan sebagai pemenuhan terhadap hikmah Allah pada penciptaan manusia, dengan statusnya sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan alam dan menyibak kebaikan-kebaikan yang terpendam di dalamnya. Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk hubungan tercela. Pernikahan bisa menjaga kelangsungan hidup manusia dan menambah keturunan, sehingga umat manusia bisa bangkit dengan melaksanakan kewajibannya untuk saling bekerja sama sebagaimana yang disyari'atkan Allah Swt. Hal ini senada dengan firman Allah Swt:

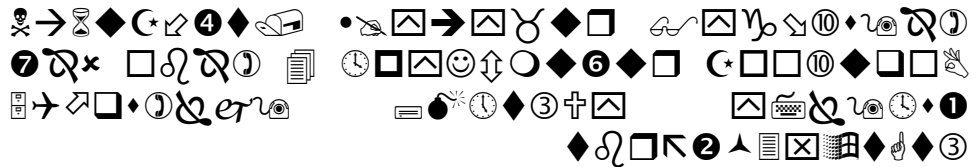
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلُقُونَ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ﴾³
 (النساء: 1)

Artinya: “Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya; lalu dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kalian saling mengasihi satu sama lain”. (QS. An-Nisa (4): 1)³

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman:

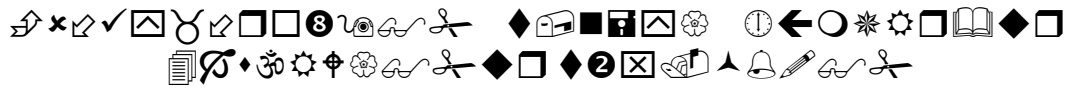
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكَاةٌ﴾⁴
 (الروم: 20)

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 99. Qurthubi menafsirkan Firman Allah Swt pada kalimat: رجالا كثيرا ونساء “Laki-laki dan perempuan yang banyak”, maksudnya meliputi keturunan Adam dan Hawa, baik yang berjenis kelamin pria maupun wanita. Oleh karena itu, *al-Khuntsa* (yang memiliki dua kelamin) tidak termasuk bagian dari dua jenis itu. Meskipun demikian ia memiliki kecenderungan sifat dan perilaku yang dapat mengembalikan identitas jati dirinya yang sebenarnya, maka ketika ia bisa diidentifikasi sebagai pria atau wanita berdasarkan pertimbangan kekurangan atau kelebihan anggota tubuh.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum (30): 21)⁴

Dalam surat Al-Najm ayat 45, Allah Swt. juga berfirman:



Artinya : “ Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”. (QS. Al-Najm : 45).⁵

Pernikahan juga merupakan salah satu syari’at yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. dan syari’at Allah SWT. untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan keluarga yang penuh rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*), hidup bersama dalam rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari’at Islam.⁶ Dari Anas ibn Malik Rasulullah SAW. bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْدُ اللَّهِ وَاتِّبَ عَلَيْهِ وَقَالَ : لَكِنِّي أَصَلَّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “Dari Anas ibn Malik ra. telah berkata dari Nabi saw. bahwa Nabi saw. telah

memuji Allah dan aku melihatnya dan beliau bersabda : Akan tetapi aku shalat,

⁴*Ibid.*, hlm. 572

⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), hlm. 875. Di dalam tafsir misbah menjelaskan maksud ayat di atas yaitu bukan hanya itu yang tercantum dalam shuhuf Ibrahim dan Musa as. Dan tercantum juga di sana bahwa Dialah sendiri yang menciptakan kedua pasangan yakni laki-laki dan perempuan, jantan dan betina dari sperma, apabila dipancarkan dan melalui sistem yang ditetapkan. Lihat M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume. 13, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), cet ke VIII, hlm. 436.

⁶M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 249.

tidur, puasa, berbuka dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.” (HR. Bukhari).⁷

Hadits ini menunjukkan bahwa nikah tergolong sunnah⁸ bagi umat Nabi Muhammad Saw, jika memakai pemahaman sebaliknya yakni *mafhum mukhallafah*, nikah itu mendekati wajib, karena kita dianggap bukan umat Nabi Muhammad Saw bila tidak menikah.

Pernikahan dalam literatur Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*, yang menurut bahasa artinya bersetubuh (*watha'*) dan *akad*.⁹ Dalam kalangan fuqaha terdapat banyak *takrif* nikah, tetapi pengertiannya berkisar seperti yang telah disebutkan di atas, hanya redaksinya yang berbeda. Untuk mengetahui mana di antara makna-makna nikah itu yang dimaksudkan dalam suatu kalimat haruslah diperhatikan dengan teliti susunan kata-kata dalam kalimat yang bersangkutan dan hubungannya dengan kalimat yang sebelum dan sesudahnya.¹⁰

Secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama fiqh. Imam al-Syafi'i mendefinisikan makna nikah secara hakikat dengan *akad* atau perjanjian,¹¹ yang

⁷ Imam Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Juz V, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 143

⁸ Sunnah secara lughah adalah jalan yang biasa dilalui, secara terminologi sunnah diartikan oleh ahli ushul fiqh adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw selain al-Qur'an, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun taqirir yang layak dijadikan dalil bagi hukum syara'. Lihat Naruddin Atar, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadist*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 20

⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Fikri, 1989), hlm. 114. Dari perbedaan pendapat ulama fiqh tentang pengertian nikah secara bahasa menimbulkan implikasi terhadap *watha'* zina. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah *watha'* zina menyebabkan terjadinya hubungan *mushahahah*, karena mereka mengartikan nikah dengan *watha'*. Berbeda dengan Syafi'iyah *watha'* zina tidak menimbulkan *mahram mushahahah*, sebab bagi mereka nikah adalah 'akad. Lihat juga, Ibn al-Qudamah, *al-Mugni*, (Maktabah al-Riyadhah al-Hadisah, th), hlm. 181. Juga lihat Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th.), hlm. 26

¹⁰ Abi Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, Jilid II, (Mesir: tp., 1948), hlm. 31

¹¹ Abu Syari' Muhammad 'Abd al-Hadi, *Jawaz al-Mut'ah*, (Kairo: Dar al-Dhahbiyah, t.t.), hlm. 9. Lihat juga Jalal al-Dien al-Mahalliy, *Syarh Minhaj al-Thalibin*, Jilid III (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Kubra, t.th.), hlm. 206. Ulama Syafi'i berpendapat, pernikahan tidak sah kecuali dengan memakai lafadz nikah atau tazwij. Lihat Ibnu Taimiyah, *Ahkam al-Jawaz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988), hlm. 13

mengandung ketentuan kehalalan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan wanita dengan lafaz nikah atau *tazwij*, atau yang semakna dengannya.¹²

Menurut mazhab Hanafi, makna “nikah” yang sebenarnya (hakiki) adalah “watha” (bersetubuh), sedangkan maknanya menurut kiasan (majazi) adalah “akad”. Berdasarkan makna hakiki, apabila seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang wanita secara tidak sah (berzina) maka persetubuhan yang demikian dapat disebut “nikah” juga. Bila arti nikah yang sebenarnya menurut Hanafi adalah watha’, maka akibat hukumnya adalah haram bagi anak laki-laki mengawini wanita yang pernah disetubuhi oleh bapak anak itu secara tidak sah, atau sebaliknya. Karena itu apabila terdapat lafal “nikah” dalam suatu ayat al-Qur’an atau hadits tanpa ada sesuatu qarinah (tanda) tertentu maka artinya adalah “watha”.¹³

Apabila dilihat perbedaan pendapat kedua ulama mazhab fiqh di atas mengenai definisi nikah, jelaslah bahwa ulama mazhab Syafi’i berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah, hal ini tidak terlepas dari logika mazhab Syafi’iyah yang dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Imam al-Syafi’i. Ia dikenal dengan kehati-hatiannya dalam menetapkan suatu hukum. Demikian pula dalam hal mahar dan mut’ah sebagai konsekuensi adanya pernikahan.

Di antara hak yang dimiliki seorang istri ketika berlangsungnya pernikahan dari suaminya adalah mendapatkan mahar, untuk memperoleh kesenangan.¹⁴ Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, walaupun para ulama sepakat bahwa mahar bukanlah salah

¹²M. Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyah*, (Mesir: Dar al-Fikri al-‘Arabi, 1967), hlm. 18

¹³Ibn ‘Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, Jilid III, (Mesir: al-Halabi, 1966), hlm. 5

¹⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.94

satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual-beli tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad.¹⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt :



 Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (An-Nisa (4): 4)¹⁶

Dalam menafsirkan ayat di atas Imam al-Syafi'i berkata, “Allah memerintahkan suami untuk memberi *ajir* dan *shidq* kepada istri. *Ajr* berarti *shidq*, dan *shidq* adalah kata Arab yang disebut dengan banyak nama.¹⁷ Berdasarkan ayat di atas juga dapat dipahami bahwa mahar adalah hak mempelai wanita sepenuhnya, sehingga siapapun tidak dihalalkan untuk mengambil bagian dari mahar ini tanpa seizinnya walaupun oleh ayahnya sendiri.

Substansi mahar bukanlah sebagai kompensasi yang bersifat materi saja, akan tetapi ia lebih merupakan simbolisasi keinginan dan ketulusan niat untuk hidup bersama dalam biduk rumah tangga.¹⁸ Mahar itu wajib karena adanya perkawinan (akad nikah), walaupun suami itu tidak menyebutkan mahar dan tidak bersetubuh.¹⁹ Oleh karena itu, mahar yang diberikan kepada istri tersebut telah menjadi hak miliknya dengan adanya akad nikah, karena suami telah memberikannya kepada istrinya dan pemberian itu menunjukkan kepemilikan.

¹⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah*, Terj. Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 77

¹⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hlm. 100

¹⁷Imam al-Syafi'i, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), hlm. 197

¹⁸As-Sadlan, *Fiqh Az-Zawaj*, hlm. 26

¹⁹Imam al-Syafi'i, *al-Umm*, hal. 87

Hak lainnya yang dimiliki istri adalah hak *mut'ah* karena terjadinya perceraian (*thalak*). Bahkan terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa *mut'ah* bagi setiap wanita yang dicerai²⁰, alasannya adalah firman Allah Swt.:



Artinya: ”Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya)

mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah: 241)²¹

Ayat al-Qur'an di atas mengisyaratkan bahwa wanita yang telah ditentukan sebagai wanita yang dicerai, mereka berhak mendapatkan *mut'ah* begitu juga wanita yang minta cerai (*khulu*). Dalam ayat ini juga Allah Swt. mewajibkan pemberian *mut'ah* bagi semua wanita yang dicerai secara umum, kecuali yang dikhususkan dengan dalil tertentu.

Syari'at Islam membolehkan perceraian (*thalaq*) antara suami istri dengan ketentuan yang ketat, hukum syari'at pun mewajibkan kepada suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istri yang dicerai, sebab tujuan pemberian *mut'ah* kepada istri yang dicerai adalah sebagai pengganti rasa kecewa dan rasa hina pada diri seorang istri akibat terjadinya perceraian. Walaupun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur *thalaq*, isinya hanya sekedar mengatur bila *thalaq* mesti terjadi, dalam bentuk suruhan atau larangan.²² Dengan demikian *thalaq* dalam Islam hanyalah untuk tujuan *mashlahat*. Dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian, sedangkan untuk pernikahan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya.

²⁰Imam al-Syafi'i, *Ahkam al-Qur'an* ..., hlm. 202

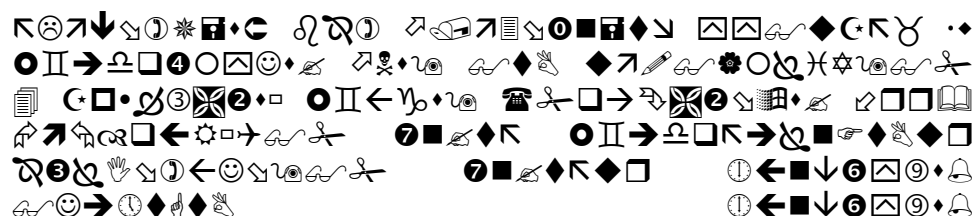
²¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hlm. 49

²²Baca Q.S. at-Thalaq (65): 1-2. *Thalaq* dilakukan terhadap istri, ketika istri berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa *iddah*. Lihat juga Q.s. al-Baqarah (1): 228.

Dalam Islam terdapat bentuk-bentuk pernikahan selain pernikahan yang biasa dilaksanakan, antara lain *nikah syighar*, *nikah mut'ah*, *nikah muhallil*, *nikah khiyar*²³, dan *nikah tafwidh*. Khusus *nikah tafwidh* yang menjadi fokus dalam penelitian ini, dikalangan fuqaha terdapat banyak *takrif* tentang *nikah tafwidh*, hanya redaksinya yang berbeda tetapi pengertiannya sama. Menurut mazhab Hanafi, *nikah tafwidh* adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa disebutkan maharnya. Menurut mazhab Maliki, *nikah tafwidh* adalah akad nikah tanpa mahar. Adapun menurut mazhab Syafi'i, *nikah tafwidh* adalah seorang ayah menikahkan anak wanitanya secara paksa tanpa ada mahar atau seorang wanita mengizinkan walinya untuk menikahkannya tanpa mahar. Adapun menurut mazhab Hambali, *nikah tafwidh* ada dua macam, yaitu: *tafwidh bid'i* dan *tafwidh mahr*.²⁴ Menurut ijma' fuqaha bahwa nikah semacam ini adalah dibolehkan.²⁵

Dari definisi *nikah tafwidh* di atas, dapat disimpulkan bahwa *nikah tafwidh* adalah nikah yang akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar oleh calon suami kepada calon istri. Para ulama fuqaha sepakat bahwa akad nikah tanpa menyebutkan mahar atau tanpa mahar, akad tersebut adalah sah. Kecuali Imam Malik yang menganggap bahwa nikah tanpa mahar adalah tidak sah.²⁶

Adapun yang menjadi dalil *nikah tafwidh* adalah firman Allah Swt.:



²³Keempat bentuk pernikahan yang disebut ini, merupakan pernikahan yang telah dilarang oleh ajaran Islam.

²⁴Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-Aqillatuh*, Jilid IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 6778-6780

²⁵*Ibid.*, hlm. 6762

²⁶Abi Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-'Imrani al-Syafi'i al-Yamani, *al-Bayan fi mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), hlm. 375



Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Q.S. al-Baqarah (2): 236)²⁷

Ayat di atas dijadikan hujjah oleh Imam al-Syafi’i sebagai dalil bahwa nikah sah tanpa menentukan mahar (nikah *tafwidh*), karena perceraian tidak terjadi kecuali pada orang yang pernikahannya sah.

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hak istri terhadap *mahar* dan *mut’ah* pasca perceraian (*mufawwidhah*) dalam nikah *tafwidh*. Menurut Imam Hanafi, istri (wanita) *mufawwidhah* apabila dithalak sebelum ditentukan maharnya, maka tidak diberikan mahar kepadanya, melainkan hanya diberikan *mut’ah* (pemberian) untuk menyenangkan hatinya karena telah dithalak. Adapun menurut pendapat Imam Maliki, wanita tersebut tidak wajib diberi *mut’ah* tetapi hanya sunnah. Sedangkan menurut pendapat Imam Hambali, wanita tersebut berhak mendapatkan separuh dari mahar *mitsl*.²⁸ Menurut Imam al-Syafi’i, jika wanita tersebut sudah dicampuri (*dukhu*) oleh suaminya, maka bagi wanita itu mahar *mitsl*, tetapi jika belum bercampur, maka tidak ada *mut’ah* dan tidak juga memperoleh seperdua mahar bagi istri tersebut.²⁹ Begitupun jika cerai mati, maka status hukumnya adalah sama.³⁰

Terjadinya kontradiktif pendapat ulama di atas, hal ini disebabkan adanya perbedaan mereka tentang pengertian firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah: 236 di

²⁷Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* ..., hlm. 48

²⁸Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*, (Jeddah: al-Haramain li ath-Thiba’ah, t.th), hlm. 357

²⁹Imam al-Syafi’i, *al-Umm*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 101

³⁰*Ibid.*,

atas, apakah diartikan berdasarkan ketentuan umum tentang gugurnya mahar sebab perceraian itu terjadi karena perbedaan penentuan mahar atau bukan, dan kalimat لَاجُنَاحَ dipahami sebagai gugurnya mahar setiap saat atau tidak.³¹ Serta adanya kontradiktif antara qiyas dengan hadis, dimana hadis tersebut adalah hadits yang diriwayatkan Ibn Mâjah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرَضْ لَهَا. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abû Bakar bin Abi Syaibah, 'Abdurrahman bin Mahdî, dari Sufyân, Firâs, Sya'bi, Masrûq, Abdullah: Sesungguhnya ditanya tentang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu meninggal dunia, belum menggauli isterinya, belum menunaikan maharnya. Berkata 'Abdullah: perempuan itu berhak atas maharnya, mewarisi dari suaminya, dan berlaku 'iddahnya. Berkata Ma'qil bin Sinân al-Asyja'i: Saya menyaksikan Rasulullah saw., memutuskan hukum pada Barwa' binti Wâsyiq seperti demikian"³²

Adapun qiyas yang menentang hadis di atas, yaitu bahwa mahar adalah pengganti, ketika yang digantikan belum diterima, maka penggantianannya tidak wajib sesuai dengan qiyas jual beli.

³¹Menurut ulama yang mengharuskan istri mendapat *mut'ah* bahwa hal itu wajib bersamaan dengan separuh mahar, jika suami menceraikannya sebelum *dukhl* dalam nikah yang bukan nikah *tafwidh* dan wajib memberikan separuh mahar *mitsl* bersamaan dengan *mut'ah* kepada istri dalam nikah *tafwidh*, karena ayat tersebut dengan pemahaman yang ada tidak menyebutkan pembatalan mahar dalam nikah *tafwidh*, hanya saja menyebutkan tentang bolehnya menceraikan sebelum penentuan mahar. Jika nikah *tafwidh* mengharuskan adanya mahar *mitsl* ketika diminta, maka wajib untuk dibagi setengah jika terjadi perceraian, seperti dibagi setengah pada mahar yang telah ditentukan. Karena itu Imam Malik mengatakan bahwa dalam nikah *tafwidh* tidak mengharuskan adanya mahar *mitsl* jika suami memiliki hak memilih. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Jail, 1989), hlm. 123

³²Al-Hâfidz Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazîd al-Qazwîni Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Jilid I, (t.t: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), hlm. 609. Hadis no. 1891 dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban (4098, 4099) dan dinilai *shahih* oleh al-Bani di dalam *shahih* Abu Daud.

Dalam menanggapi masalah di atas, Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa jika hadis Barwa' binti Wasyiq ini *shahih*, maka tidak ada *hujjah* bagi seorang pun dihadapan hadis, walaupun mereka itu banyak dan tidak diperlukan adanya *qiyas*.³³ Dan yang dikatakan olehnya ini benar.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam menetapkan masalah di atas Imam al-Syafi'i menggunakan metode yang berbeda dengan Imam mazhab lainnya (sebagai sandaran mazhabnya) yang berdasarkan pada *al-Qur'an* dan al-Hadis. Selanjutnya Imam al-Syafi'i dalam hal ini sama dengan pendapat Imam Hanafi, tentang seorang istri berhak mendapatkan mahar *mitsl* dan warisan dalam nikah *tafwidh*. Imam al-Syafi'i lebih mendahulukan ketentuan umum hadis dibanding pendapat yang menggunakan *dali qiyas*.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas yang memotivasi peneliti membahas masalah tersebut dalam suatu kajian ilmiah yang diwujudkan dalam penulisan tesis yang berjudul: “ HAK ISTRI TERHADAP MAHAR DAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN DALAM NIKAH TAFWIDH (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AL-SYAFI'I) ”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Pembahasan yang berhubungan dengan mahar dan mut'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam, khususnya pendapat-pendapat para Imam mazhab amatlah banyak dan luas. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti membatasi pembahasan masalah pada hak istri terhadap mahar dan mut'ah pasca perceraian dalam nikah *tafwidh* menurut pemikiran Imam al-Syafi'i. Maksud perceraian (thalak) di sini adalah *thalak ba'in kubra*,

³³Imam al-Syafi'i, *al-Umm*.... hlm. 101

yaitu thalak yang menghilangkan hak suami untuk rujuk kembali kepada istrinya kecuali istrinya sudah kawin dengan orang lain dan telah campur sebagai suami istri secara nyata dan sah. Sedangkan persoalan hak istri selain dari mahar dan mut'ah tidak menjadi bahasan dalam penelitian.

2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian terhadap Hak Istri Terhadap Mahar dan mut'ah Pasca Perceraian dalam Nikah *Tafwidh* (Studi Analisis Pemikiran Imam al-Syafi'i), permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan mahar dan mut'ah bagi istri menurut sistem perkawinan ?
2. Bagaimana pandangan Imam al-Syafi'i tentang hak istri terhadap mahar dan mut'ah pasca perceraian dalam nikah *tafwidh*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak istri terhadap mahar dan mut'ah pasca perceraian dalam nikah *tafwidh* (Studi Analisis Pemikiran Imam al-Syafi'i) sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan mahar dan mut'ah dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui pandangan Imam al-Syafi'i tentang hak istri terhadap mahar dan mut'ah pasca perceraian dalam nikah *tafwidh*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberi penjelasan mengenai kedudukan mahar dan mut'ah dalam pernikahan.
2. Memberikan penjelasan tentang pandangan Imam al-Syafi'i mengenai hak istri terhadap mahar dan mut'ah pasca perceraian dalam nikah *tafwidh*.

3. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta dapat memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum Islam dan lebih khusus ilmu *Fikih*.
4. Memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi Strata Dua untuk mendapat Gelar Master Agama pada Program Pasca Sarjana (PPS) UIN sultan Syarif kasim Riau (Pekan Baru).

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang hukum Islam merupakan kajian ilmu yang selalu berkembang dan sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini tentu amat menarik, dengan demikian apabila dilihat terdapat banyak penelitian yang membicarakan tentang pernikahan dan perceraian. Tetapi tentang kedudukan mahar dan mut'ah bagi istri ketika terjadi perceraian dalam nikah *tafwidh* menurut Imam al-Syafi'i sepengetahuan penulis belum ada. Adapun penelitian atau tulisan tentang sumbangsih pemikiran Imam al-Syafi'i yang dijumpai adalah:

1. Sumbangan al-Syafi'i Terhadap Perundangan Islam, oleh Othman Ishak. (Jurnal Ilmiah, th. 2001)

Dalam tulisan ini, penulis menggambarkan sumbangsi pemikiran Imam al-Syafi'i bagi perundangan Islam. Sikap Imam al-Syafi'i terhadap sumber perundangan Islam di abad pertengahan yaitu di antara sikap *Ahl al-Hadits* dan sikap *Ahl al-Ra'yi*. Sebagaimana yang diuraikan oleh Ibn Qaiyim bahwa pada saat itu Imam Maliki lebih berhujjah dengan *Hadits al-Mursal*, *al-Munqari'* *al-Balaghat*, *Qaul al-Shahabi* dan semua *Akhbar* yang tidak tertolak daripada menggunakan *Qiyas* dan *al-Ra'yi*. Sedangkan Imam Abu Hanifah lebih berhujjah dengan menggunakan *Qiyas* daripada menggunakan *Hadits Da'if* yang

tidak tertolak, serta ia lebih banyak menggunakan *Qiyas* dan *al-Ra'y*. Perbedaan selanjutnya Imam Maliki berpegang kepada *Qiyas*, *al-Istihsan*, *al-Masalih al-Mursalah* dan *al-'urf*. Adapun Imam Abu Hanifah berpegang kepada *Qiyas*, *al-Istihsan* dan *al-'Urf*. Bagi Imam al-Syafi'i, pada dasarnya sikapnya sama dengan mazhab-mazhab lain, tetapi ia meletakkan *al-Qur'an* dan *Hadits* Nabi Saw. pada peringkat pertama, *al-Ijma'* di peringkat kedua, pendapat kalangan sahabat yang tidak ditolak di peringkat ketiga, perbedaan pendapat kalangan sahabat di peringkat ke empat, dan *Qiyas* di peringkat kelima. Selanjutnya ia lebih memilih berpegang kepada *al-Akhbar al-Ahad* yang tidak ada penolakannya daripada menggunakan *Qiyas*. Imam al-Syafi'i tidak berpegang kepada *al-Istihsan* sebagaimana Imam Abu Hanifah dan tidak pula menggunakan *al-Masalih al-Mursalah* sebagaimana yang dipegang oleh Imam Maliki. Hal ini yang selanjutnya menjadi sumbangsi bagi pembentukan perundangan Islam selanjutnya yang disebar luaskan oleh murid-muridnya.

2. al-Syafi'i: Sejarah dan Metodologi Mazhab Fiqhnya, oleh Abdullah Alwi Bin Haji Hassan.

(Jurnal Ilmiah, th. 1997)

Karya tulis ilmiah ini merupakan tulisan yang bernuansa hukum, tetapi lebih diarahkan pada tinjauan historis tokoh. Dalam tulisan ini diungkapkan riwayat hidup Imam al-Syafi'i dari lahir hingga wafatnya. Dalam Tulisan Ilmiah ini juga dibahas tentang metodologi mazhab fiqhnya, dimana penulis menguraikan metodologi pembentukan undang-undang dari masa Imam Abu Hanifah (150 H/767 M) dengan menyusun sebuah buku bernama *Kitab al-Ra'y*, kemudian Abu Yusuf (182 H/795 M) dan Muhammad al-Hasan al-Syaibani (189 H/804 M) keduanya merupakan murid Imam Abu Hanifah yang telah juga menulis kitab *Ushul al-Fiqh* mereka sendiri, tetapi ketiga kitab ini telah tidak

ditemukan lagi. Dengan kekosongan ruang yang ditinggalkan itu, Imam al-Syafi'i membuat suatu karya yang luar biasa sebagai sumbangan untuk seluruh dunia perundangan setelahnya.

Imam al-Syafi'i menulis secara terinci dan sistematis ilmu perundangan yang tidak pernah terlintas di sepanjang masa. Suatu ilmu yang menerangkan apa itu undang-undang, kenapa seseorang harus mentaatinya, bagaimana membuat peraturan-peraturan baru, bagaimana cara menyelesaikan konflik di dalam peraturan-peraturan yang ada dan bagaimana cara untuk mengubah atau membatalkan peraturan yang sudah ada dan lain-lainnya yang diperlukan. Metodologi ini adalah ilmu pembentukan undang-undang yang dapat digunakan dalam setiap sistem undang-undang baik saat itu, sekarang dan akan datang, untuk itu ia telah menulis bukunya *kitab al-Risalah* yang dinamakan *Ilmu Ushul Fiqh* yang berisi tentang falsafah undang-undang (*Falsafah al-Tasyri'*), prinsip-prinsip pembentukan undang-undang (*Ushul al-Fiqh*), logika (*mantiq*), sejarah ilmu sumber dan bahan undang-undang serta kaidah-kaidah fiqh (*al-Qawa'id al-Fiqhiyah*).

Selanjutnya, menurut Imam Aal-Syafi'i undang-undang mempunyai pokok dan ranting-ranting (*furu'*) yang keluar dari akar-akarnya (*ushul*). al-Qur'an dan al-Sunnah adalah *ushul* yang tidak boleh dibatalkan atau dimansuhkan hukum-hukumnya, melainkan oleh kedua sumber itu sendiri. al-Ijma' menurutnya, hendaklah diterima setelah adanya persetujuan seluruh masyarakat Islam terhadap satu-satunya hukum. Hal ini untuk mempertahankan kesatuan di dalam perundangan Islam. Imam al-Syafi'i hanya membenarkan penggunaan *al-Ra'y* di dalam doktrin al-Qiyas yang jelas saja. Keduanya (*al-Ijma'* dan *al-qiyas*) adalah *furu'* dalam perundangan Islam. Menurut Prof. Muhammad

Hamidullah “kemungkinan disiplin ilmu ini telah mempengaruhi perundangan di Eropa, yang dikenal dengan *Roots of Law* (Prinsip-prinsip undang-undang).

3. Nikah Mut’ah Studi Perbandingan Pemikiran Ja’far Murtadha al-Amili (Syi’ah) Dan Imam al-Syafi’i (Sunni), oleh Octa Sanusi. (Skripsi, th. 2004)

Dalam penelitian ini secara umum sikap berbeda pendapat antara dua tokoh (Syiah dan Sunni) tentang nikah mut’ah. Ja’far Murtadha al-Amili berpendapat bahwa nikah mut’ah diperkenankan oleh Nabi dan dibolehkan untuk selamanya dengan alasan nikah mut’ah tidak sama dengan zina pernyataan yang dikemukakan Ja’far Murtadha al-Amili tersebut ditanggapi oleh Imam al-Syafi’i menurutnya nikah mut’ah tidak banyak berbeda dengan zina karena tidak terikat dengan ikatan apapun dan terlepas dari tanggung jawab perkawinan.

Pendapat yang dikemukakan Ja’far Murtadha al-Amili dan Imam al-Syafi’i tentang nikah mut’ah ini merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini untuk menyikap metode pemikiran yang digunakan oleh Ja’far Murtadha al-Amili dan Imam al-Syafi’i dalam mengungkapkan pendapatnya tentang nikah mut’ah. Dikarenakan kajian ini merupakan kajian istidlal, maka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fiqh, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui istidlal yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

Berdasarkan metode yang digunakan, terungkaplah bahwa, pendapat Ja’far Murtadha al-Amili dan Imam al-Syafi’i sama-sama berangkat dari dalil al-Quran dan al-Hadis. Perbedaannya adalah Ja’far Murtadha al-Amili lebih condong menggunakan teori munasabah ayat dan teori nasikh-mansukh hadis, sedangkan Imam al-Syafi’i lebih mengutamakan kepada zahir ayat.

4. Analisis Dalil Yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam al-Syafi'i Tentang Hukum Thalak Dengan Main-main, oleh Nurhayati. (Skripsi, th. 2002)

Dalam penelitian ini secara umum diungkapkan sikap berbeda pendapat antara kedua Imam mazhab tentang hukum thalak dengan main-main. Dimana menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa thalak yang diucapkan secara main-main oleh seorang suami kepada istrinya tidaklah sah. Adapun menurut Imam al-Syafi'i thalak secara main-main yang diucapkan suami kepada istri dipandang sah.

5. Kritik Imam al-Syafi'i Terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Istihsan, oleh Sastra Putra (tesis UIN Suska, th. 2010).

Dalam penelitian ini secara umum diungkapkan kritik Imam al-Syafi'i terhadap pandangan Imam Abu Hanifah tentang istihsan. Dimana menurut Imam al-Syafi'i istihsan adalah *ta'afzuḍz*, sebab, berpendapat berdasarkan kepada apa yang dianggapnya baik (menurut selera dan tanpa dalil) adalah mengada-ada, karena tidak berpedoman kepada apa yang telah dicontohkan (oleh Rasulullah Saw. sendiri). Tentunya disadari bahwa ulama dalam hal istihsan tidak dianggap sebagai pewaris Nabi (warisat al-Anbiya'), pembawa risalah ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Saw. Dan bukan pula terpanggil memberikan kesaksian peran istihsan dalam menyelesaikan persolan. Menurutnya, hanya Rasulullah yang diberi wewenang oleh Allah untuk menjelaskan hukum-hukumNya. Sekalipun begitu, demikian Imam al-Syafi'i, Rasulullah Saw tidak pernah menentukan suatu hukum berdasarkan apa yang dianggapnya baik menurut selernya.

Peneliti berpendapat bahwa sebenarnya Imam al-Syafi'i juga memakai istihsan dalam pengamalannya. Imam al-Syafi'i memang nampak bersikap sangat keras terhadap

penggunaan istihsan. Ia menolak istihsan dalam arti berfatwa menurut selera berdasarkan kepada hawa nafsu, serampangan dan mengada-ada dalam menetapkan suatu hukum tanpa adanya nash dan tanpa berdasarkan (mengqiyaskan) kepada nash. Masalahnya adalah, apakah Imam Abu Hanifah melakukan istihsan dalam pengertian yang oleh Imam al-Syafi'i secara tajam itu?. Tidak dapat dipastikan bahwa perumusan istihsan Imam Abu Hanifah bermakna *taladzudz*, sebab maksud dari *taladzudz* itu sendiri adalah yang menjadi tuntutan dari orang muslim itu adalah mengikuti hukum Allah dan RasulNya atau hukum yang diqiyaskan kepada keduanya, dan karena itu hukum istihsan diletakkan berdasarkan kemudahan.

Selain penelitian tersebut di atas, terdapat juga beberapa penelitian yang berkaitan dengan Konsepsi Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Sumi Istri Menurut Imam al-Syafi'i, oleh Amri Antoni (tesis UIN suska, Th. 2009) dan Paradigma Hukum Islam di Indonesia; Studi tentang Pengaruh Fikih Syafi'i dalam Penetapan Kompilasi Hukum Islam, oleh Afridawati (tesis UIN Suska, Th. 2001).

E. Kerangka Teoritis

Kaum wanita dalam perjalanan sejarahnya pernah mengalami nasib buruk, dimana mereka diperlakukan secara tidak adil, hak-hak mereka dirampas, suara mereka tidak dianggap, kebebasan mereka direnggut; dan tidak ubahnya menjadi boneka ditangan kaum pria. Perlakuan buruk yang dialami oleh kaum wanita dalam sejarah panjang mereka ini menjadi pengalaman gelap dalam sejarah umat manusia. Setelah Islam datang dengan tata aturan hidup yang adil dan memberi kaum wanita kehormatan yang menjadi hak dasar bagi mereka secara utuh. Islam datang untuk mengangkat dan menyingkirkan kehinaan dan sikap yang merendahkan derajat wanita; mendeklarasikan kemanusiaan mereka;

serta Islam menjadikan mereka satu bagian yang mempunyai arti efektif dan obyek bagi kebangkitan masyarakat secara integral.

Di antara dasar-dasar perbaikan dan hak-hak syara', Islam memberi hak-hak kepada wanita di samping menggariskan kewajiban-kewajiban mereka. Di antara hak wanita (istri) tersebut adalah hak mahar dan hak mut'ah dalam pernikahan. Mahar merupakan hak khusus bagi wanita (istri) dan satu dari berbagai haknya sebagai penghargaan dan penghormatan serta untuk membahagiakannya. Tetapi tidak berarti mahar itu dipandang dari nilai materiilnya sehingga mirip dengan barang dagangan yang diperjual belikan, melainkan mahar mempunyai nilai moril sebagai satu simbol penghormatan dan kehormatan serta pertanda cinta kasih yang kokoh. Mahar juga menjadi bukti dan isyarat adanya niat baik untuk menikah dari pria (suami) dalam pernikahan, dimana dia dengan mahar itu menunjukkan kesiapannya untuk memikul beban dalam perjalanan rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya.

Istri mempunyai hak-hak dari suaminya yang diperoleh dengan adanya ikatan pernikahan yang sah. Hak-hak ini sebagian bersifat materiil dan yang lainnya bersifat moril. Di antara hak-hak materiil adalah maskawin (*shadaq*) atau istilah-istilah lain yang mengandung makna serupa seperti: *shidaq*, *mahar*, *nihlah*, *faridhah*, *hibah*, *ajr*, *'aqr*, *'alaiq*, *thul*, *nikah* dan *kharas*.³⁴ Disebut *shadaq* (mas kawin) karena mengingatkan kesungguhan dan kejujuran serta ketulusan niat suami untuk menikah. *Shadaq* pada masa-masa kedatangan Nabi Saw. disyariatkan bagi para wali Allah.³⁵

³⁴Syihab al-Din Ahmad Ibn Salamah al-Qulyubi, Syihab al-Din Ahmad al-Burlisi al-Mulaqab bi 'Umairah, *Hasyiyatani Qultubi- 'Umairah*, Juz X, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 275

³⁵Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz III, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), hlm. 147. Lihat juga, Muhyi ad-Din an-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhajjab li Syiradjji*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), hlm. 6

Mahar menjadi hak milik pribadi istri, orang lain termasuk wali atau suaminya sendiri tidak berhak memiliki barang yang dijadikan mahar itu dan tidak boleh pula mempergunakannya kecuali dengan seizin istri. Mahar itu wajib dengan sebab adanya perkawinan (akad nikah), walau pun suami tidak menyebutkan mas kawin dan tidak bersetubuh.³⁶

Mahar sebagai kewajiban suami yang dibayarkan kepada istri, dalam hal ini istri harus mengetahui dan menentukan kadar jumlah, jenis dan lain-lain secara independen. Mahar yang ditentukan jenis dan kadarnya dinamakan mahar *musamma* dan yang tidak ditentukan termasuk yang tidak disebut ketika akad berlangsung dinamakan mahar *mitsi*³⁷, karena dipersamakan dengan mahar yang biasa berlaku dalam lingkungan keluarga istri.

Nikah *tafwidh* adalah salah satu bentuk pernikahan dalam Islam, dimana nikah jenis ini merupakan pernikahan seorang lelaki dengan seorang wanita tanpa menyebutkan mahar ketika akad nikah terjadi. Akad nikah *tafwidh* ini sah menurut kesepakatan para fukhaha, namun suami hendaknya memberikan mahar bila sudah campur (idukhul) dengan istrinya.

Para ulama fukhaha sepakat bahwa akad nikah tanpa menyebutkan mahar atau tanpa mahar, akad tersebut adalah sah. Kecuali Imam Malik yang menganggap bahwa nikah tanpa mahar adalah tidak sah.³⁸

³⁶Imam al-Syafi'i, *al-Umm*....., hlm. 87

³⁷Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Shakhsyiyah* ..., hlm. 202. Lihat juga, Achmad Kudzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 86

³⁸Abi Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-Imrani al-Syafi'i al-Yamani, *al-Bayan fi mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), hlm. 375

Adapun yang menjadi dalil nikah *tafwidh* adalah firman Allah Swt.:



Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Q.S. al-Baqarah (2): 236)³⁹

Para ulama berbeda pendapat tentang hak istri terhadap mahar bila terjadi perceraian dilihat dari kondisi-kondisinya, baik kondisi yang menetapkan pemberian mahar secara penuh kepada istri (mempelai wanita) ditinjau dari mempelaai pria (suami) sudah menyenggamaai mempelaai wanita, salah satu pasangan dalam menikah yang sah meninggal dunia sebelum melakukan hubungan intim serta kedua pasangan telah berduaan secara sah dan meyakinkan (*khalwat shahihah*) meski tidak berhubungan intim.

Kondisi yang menetapkan pemberian separuh mahar kepada istri ditinjau dari perceraian sebelum terjadi persenggamaan dan (nominal) maharnya disebutkan pada waktu nikah. Begitu juga halnya jika terjadi perpisahan tanpa proses perceraian (dari pihak istri), misalnya pembatalan akad nikah akibat *ila*⁴⁰ atau konsekuensi *li’an*,⁴¹ suami murtad atau tidak mau masuk Islam setelah istri masuk Islam dan sejenisnya.

³⁹Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* ..., hlm. 48

⁴⁰*Ila’* adalah sumpah untuk tidak mendekati, menyentuh atau berhubungan intim dengan istrinya.

⁴¹*Li’an* adalah saling sumpah antara suami-istri untuk menyatakan dirinya bebas dari tuduhan zina yang dituduhkan pasangan atasnya.

Islam untuk kesekian kalinya sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak-hak yang wajib diterima dan dimilikinya, selain hak mahar di atas terdapat juga hak lain yang menjadi hak yang wajib diterimanya ketika terjadi perceraian, yaitu hak *mut'ah* yang disebabkan adanya thalak (cerai) dari suami kepada istri sebelum bercampur. Firman Allah Swt.:



Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Al-Baqarah (2): 236)⁴²

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa bila seorang suami menceraikan istrinya sebelum pernah mencampurinya dan belum menentukan jumlah maskawinnya, maka suami berkewajiban memberi *mut'ah* kepada istrinya sebagai ganti pemberian untuk istri. Inilah yang dimaksud dengan melepas dengan baik.

Adapun *mut'ah* adalah pemberian (harta) dari seorang suami kepada istri sewaktu menceraikannya.⁴³ Umar ibn Khatab mendefinisikan *mut'ah thalak* sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236 di atas.⁴⁴ Sedangkan definisi lain

⁴²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hlm. 48

⁴³ Syihab al-Din Ahmad Ibn Salamah al-Qulyubi, Syihab al-Din Ahmad al-Burlisi al-Mulaqab bi 'Umairah, *Hasyiyatani Qulyubi* ..., hlm. 291. Lihat juga, M. Abdul Mujieb. Cs, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), hlm.232. Lihat juga, Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair ibn Salim al-'Imran al-Syafi'i al-Yamani, *al-Bayan Fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), hlm. 365

mut'ah adalah sesuatu yang dihubungkan setelah adanya thalak, dan dia (suami) telah bersenang-senang dengannya (istri).⁴⁵ Hukumnya wajib apabila perceraian itu atas kehendak suami, ukuran pemberian mut'ah menurut kerelaan keduanya, dengan pertimbangan keadaan suami-istri tetapi sebaiknya tidak kurang dari seperdua mahar. Hak mut'ah adalah:

- 1) Bagi istri yang diceraikan hidup sebelum berkumpul dan istri telah mendapat mas kawin, istri tidak berhak menerima mut'ah.
- 2) Bagi istri yang diceraikan hidup sebelum berkumpul dan belum mendapat mas kawin, istri berhak mendapat mut'ah.
- 3) Bagi istri diceraikan hidup dan sudah berkumpul yang disebabkan oleh (permintaan) istri, tidak berhak menerima mut'ah.⁴⁶

Ulama madzhab Hanafi berbeda pendapat dalam menetapkan *mut'ah*, apakah ditinjau dari kemampuan suami atau ditetapkan menurut keadaan istri. Menurut Abu Yusuf. *Mut'ah* ditetapkan menurut kemampuan suami, hal ini berdasarkan firman Allah Swt. *على الموسع قدره وعلى المقتر قدره*, karena itu suamilah yang dibebani untuk pengadaan *mut'ah* ini, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kadar kesanggupannya.⁴⁷

Oleh sebab itu *mut'ah* merupakan suatu hukum syar'i yang kedudukannya sebagai ganti rugi akibat penyalahgunaan hak thalak. Sebaiknya bagi orang yang menjatuhkan thalak harus memberikan mut'ah tersebut sebagai kewajiban baginya, dengan tujuan ia tidak dapat menjatuhkan thalak sembarangan. Disamping itu, *mut'ah* merupakan salah

⁴⁴Muhammad Rawas Khal'ahzi, *Mausu'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khatab*, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1981), hlm. 600

⁴⁵Alamah Abi al-Fadli Zamal al-Din Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqy al-Misr, *Lisan al-Arab*, Jilid III, (Beirut: Dar Shadir, 1990), hlm. 330

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 233

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 234

satu dari syi'ar-syi'ar Islam, dimana salah satu fungsi pemberian *mut'ah* kepada istri yang bercerai adalah untuk mengobati rasa kecewa dan sakit hati dalam diri istri akibat terjadinya perceraian.

F. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian.

Penelitian terhadap pemikiran Imam al-Syafi'i mengenai *mahar* dan *mut'ah* pasca perceraian dalam nikah *tafwidh* merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni bahan-bahan kajian berasal dari sejumlah literatur yang ada hubungannya dengan pembahasan yang dilakukan.

2. Teknik Pembahasan.

Teknik pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *Content Analysis* yang berangkat dari aksioma bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi itu merupakan dasar bagi semua ilmu sosial. Menurut Barcus *Content Analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. George dan Kraucer menyatakan bahwa *Content Analysis* kualitatif lebih mampu menyajikan nuansa dan lebih mampu melukiskan prediksinya yang lebih baik.⁴⁸

Untuk mendeskripsikan *Content Analysis* yang positifistik kualitatif penulis berusaha mengakumulasi pemikiran-pemikiran Imam al-Syafi'i yang berhubungan dengan *mahar* dan *mut'ah* dan karya-karya ulama lainnya sebagai bahan atau materi pelengkap.

⁴⁸Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 68-69

3. Sumber Data.

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i (150 H/767 M- 204 H/820 M) yang membahas secara luas tentang *mahar* dan *mut'ah*. Untuk lebih komprehensifnya tulisan ini, tentu menggunakan rujukan lain yang sifatnya sebagai rujukan sekunder, antara lain: *al-Majmu' al-Syarhul Muhadzdzab*, Syeikh Nawawi, *al-Fikh 'ala Madzahibil Arba'ah*, Abdurrahman al-Jaziri, *al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, Muhammad Abu Zahrah, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn al-Qasim*, Syeikh Ibrahim al-Bajuri, *al-Mu'in al-Mubin*, 'Abd al-Hamid Hakim, serta rujukan sekunder lain yang ada kaitannya dengan pembahasan yang dilakukan.

4. Analisis Data.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Deskriptif-analitik, yaitu dengan menggambarkan realitas phenomena sebagaimana adanya, yang dipilih dari persepsi subyektif, kemudian dianalisis secara kritis.
- b. Induktif yaitu pola fikir yang berasal dari empirik dan mencari abstraksi. Pola fikir ini berlandaskan fenomenologi dan memberi cap yang positivistik.
- c. Deduktif, yaitu berfikir dari konsep abstrak yang lebih umum ke berfikir mencari hal yang lebih spesifik atau konkret.⁴⁹

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan kajian ini, dirumuskan sistematika penulisan sebagaimana di bawah ini:

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 93

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Sekilas tentang Kehidupan Imam al-Syafi'i yang memuat latar belakang kehidupan Kelahiran dan keluarga, Pendidikan dan kehidupan intelektual Imam As-Syafi'i, Kondisi sosial masa Imam al-Syafi'i, Karya-karya Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syafi'i dalam pandangan ulama.

Bab Ketiga, Hak istri terhadap mahar dan mut'ah pasca perceraian dalam pernikahan menurut syari'at Islam, yang terdiri dari ruang lingkup pengertian pernikahan dan thalak dalam Islam, dasar hukum pernikahan dan thalak, hakikat mahar dan mut'ah dalam Islam serta kualifikasi hak istri dalam masalah pernikahan dan thalak.

Bab keempat, Hak istri terhadap mahar dan mut'ah pasca perceraian dalam nikah *tafwidh* menurut pemikiran Imam al-Syafi'i, yang terdiri dari kedudukan mahar dan mut'ah bagi istri menurut sistem perkawinan, hak istri terhadap mahar dan mut'ah pasca perceraian dalam nikah *tafwidh* menurut Imam al-Syafi'i, metode pengistinbatan hukum Imam al-Syafi'i serta analisa.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil kajian dan saran-saran.

BAB II

SEKILAS TENTANG KEHIDUPAN IMAM AL-SYAFI'

A. Latar Belakang Kehidupan Imam al-Syafi'i

Nama lengkap Imam al-Syafi'i dinyatakan sebagai Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdi Yazid bin bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah.¹ Menurut Al-Nawawi, bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli bahwa Imam al-Syafi'i adalah orang Quraisy dari kalangan Bani Muthallib.²

Imam al-Syafi'i dilahirkan di Asqalan, suatu tempat yang jaraknya kurang lebih tiga farsah dari Ghazzah.³ Disamping itu, ada juga satu riwayat yang mengatakan bahwa ia dilahirkan di Ghazzah, Palestina tidak jauh dari *Bait al-Muqaddas* sejalan dengan pengakuannya dalam kitab *al-Umm*.⁴ Keterangan ini tidaklah mengidentifikasi suatu perbedaan, sebab Ghazzah dahulunya adalah daerah Asqalan.⁵

¹Imam al-Syafi'i, *Musnad al-Imam al-Syafi'i*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 9. Lihat juga 'Abdurrazak bin 'Abd al-Majid al-Arwi, *Mauqifua al-Aimatu al-Arba'ah wa A'alam Madzhabihim min al-Rafidhah wa Mauqifu al-Rafidhah Minhum*, (t.tp.: tp., t.th.), hlm. 39. Lihat juga, Abi Abdullah Muhammad ibn Abd al-Hadi al-Muqadisi al-Hambali, *Manaqib al-Aimatu al-Arba'ah R.A.*, (t. tp.: Dar al-Mu'ayid, t.th.), hlm. 101. Lihat juga, Syekh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Juz II, (t.tp.: Dar al-Iman, 1998), hlm. 113

²Al-Nawawi, *Tahzib al-Asma' wa al-Lughat*, Jilid I, (Mesir: Muniriyah, t.th.), hlm. 44

³Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu Wa 'Ashruhu Wa fiqhuhu*, (t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978), hlm. 14. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i lahir di Yaman, lalu tumbuh dan berkembang di Makkah.

⁴Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 6. Lihat juga Abi al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 6

⁵Sirajuddin Abbas, *Sejarah Keagungan Mazhab Syafi'i*, Cet. ke-7, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), hlm. 13. Dalam riwayat yang berbeda, Imam al-Syafi'i menyebut Ghazzah, 'Asqalan dan Yaman sebagai tempat kelahirannya. Riwayat yang mengatakan Ghazzah dan 'Asqalan dengan mudah dapat dipertemukan karena Ghazzah adalah sebuah desa yang terletak tidak jauh dari kota 'Asqalan. Akan tetapi, riwayat yang mengatakan Yaman hanya benar kalau yang dimaksudkan adalah tempat kediaman orang-orang Yaman yang banyak tinggal di Ghazzah dan 'Asqalan. Ahmad Farid Rifa'i, *Mu'jam al-Udaba'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 190.

Berdasarkan pendapat yang paling shahih, Imam al-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriyah bertepatan dengan tahun 767 M,⁶ pada tahun itu Imam Abu Hanifah An-Nu'man meninggal. Bahkan, ada pula yang mengatakan bahwa kelahiran Imam al-Syafi'i adalah hari Imam Abu Hanifah meninggal.⁷ Di samping itu, kelahirannya juga bertepatan dengan wafatnya seorang mufti Hijas, yaitu Ibnu Juraij al-Makky, yang dikenal dengan sebutan Imam ahli Hijas. Dengan wafatnya dua orang Imam besar ini, ahli sejarah meramalkan bahwa pribadi Imam al-Syafi'i dikemudian hari akan menggantikan kedudukan kedua Imam besar tersebut tentang kemahiran dan pengetahuannya.⁸

Adapun silsilah keturunan Imam al-Syafi'i dari pihak bapaknya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris bin Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi'i Ibn Said Ibn Abdul Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muthalib Ibn 'Abdul Manaf al-Muthaliby.⁹ Dengan demikian, maka keturunan Imam al-Syafi'i bertemu pula dengan silsilah keturunan Nabi Muhammad Saw. pada kakeknya Abdul Manaf, karena itulah Imam al-Syafi'i dijuluki dengan sebutan anak

⁶Khudary Bek, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (t.t.p.: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007), hlm. 159. Mengenai hari kelahiran Imam al-Syafi'i, al-Baihaqi mengatakan "Saya hanya menemukan beberapa riwayat yang menentukan secara pasti mengenai kelahiran Imam al-Syafi'i. Karena pendapat yang umum di kalangan ahli sejarah hanya menentukan tahun kelahirannya saja".

⁷Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, hlm. 356. Lihat juga, Abi al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir*, hlm. 9. Lihat juga Ahmad Syurbasi, *Al-Aimatu al-Arba'ah*, Terj. Sabil Huda, A. Ahmadi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 142

⁸Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 149

⁹Khudary Bek, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, hlm. 158. 'Abdul Manaf adalah orang yang sangat berpengaruh di kalangan suku Quraisy, memiliki empat anak laki-laki yaitu Hasyim (kakek Rasulullah Saw.) tingkat kedua 'Abd Syam, Naufal dan al-Muthallib; sedangkan nasab Imam al-Syafi'i sendiri berujung pada al-Muthallib. Al-Muthallib adalah orang yang mulia dan disegani oleh kaumnya. Orang-orang Quraisy menjulukinya dermawan, karena kemurahan hati dan kebajikannya. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai siapakah yang lebih tua, Hasyim ataukah al-Muthallib. Ibnu Sa'ad menyebutkan sebuah riwayat dari Muhammad bin 'Umar bin Waqid al-Aslami yang menyatakan bahwa al-Muthallib bin Abd Manaf bin Qushay adalah lebih tua dari Hasyim dan 'Abd Syams. Lihat Ibnu Sa'a, *ath-Thabaqat al-Qubra*, (Beirut: tp., 1957), hlm. 81. Namun Muhammad Husain Haikal mengutip dua pendapat, masing-masing dari Ibnu Khaldun (dalam kitabnya *Tarikh*) dan pendapat Ibnu Hisyam (dalam kitabnya *Sirah*) yang menyatakan bahwa "al-Muthallib lebih muda dari 'Abd Syams; ini artinya al-Muthallib dilahirkan setelah Hasyim dan 'Abd Syam. Sedangkan al-Muthallib dan Hasyim adalah saudara kandung yang saling percaya dan saling tolong-menolong. Hal ini dapat dilihat ketika Hasyim Wafat, al-Muthallib mengurus barang dagangan dan harta milik Hasyim. Lihat Muhammad Husain Haikal, *Hayat Muhammad*, (t.t.p.: Lajnah at-Ta'lif, 1956), hlm. 98

paman Rasulullah SAW.¹⁰ Imam an-Nawawi mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i adalah orang Quraisy dari Bani Muthallib dan ibunya berasal dari suku Azdi¹¹. Demikian kesepakatan ulama dari berbagai golongan.¹² Pernyataan Imam an-Nawawi ini merupakan *counter* terhadap pendapat yang meragukan keabsahan nasab Imam al-Syafi'i dari suku Quraisy.

Sedangkan silsilah keturunan Imam al-Syafi'i dari garis keturunan ibunya adalah Fatimah binti Ubaidillah Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abu Thalib. Dengan demikian, semakin jelas bahwa Imam al-Syafi'i ini berasal dari keturunan Quraisy.¹³ Akan tetapi riwayat ini tampaknya tidak kuat sebab bertentangan dengan riwayat lain tentang pengakuan Imam al-Syafi'i sendiri bahwa ibunya adalah Umm Habibah al-Azdiyah dari Bani Azdi.¹⁴ Riwayat kedua ini juga didukung oleh pernyataan cucunya, Muhammad ibn al-Syafi'i,¹⁵ yang tentu lebih tahu mengetahui silsilah keluarganya. Mengenai silsilah Imam al-Syafi'i dari garis ibu ini, Mushthafa Abdurrazaq menjelaskan "Benang merah dari perdebatan mengenai nasab

¹⁰Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu*, hlm. 14

¹¹Abi Abdullah Muhammad ibn Abd al-Hadi al-Muqadasi al-Hambali, *Manaqib al-Aimatu* ..., hlm. 104

¹²An-Nawawi, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, (t.tp.: al-Munirah, t.th.), hlm. 44

¹³Imam al-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 16. Suku Azdi merupakan suku besar yang bercabang-cabang keturunannya. Al-Jawhari membagi suku Azdi dalam tiga kelompok besar, yaitu: (1) Azdi Syanauh, mereka adalah Bani Nashr al-Azdi, (2) Azdi as-Sarrah, yaitu suku Azdi yang tinggal di pinggir kota Yaman, (3) Azdi 'Oman, yaitu kota di Bahrain. Lihat Ibnu Khaldun, *Tarikh ibn Khaldun*, (t.tp.: an-Nahdhah, 1936), hlm. 30

¹⁴Tazuddin Abi Nasr 'Abd al-Wahhab ibn 'Ali ibn 'Abd al-Kafi al-Subki, *At-Thabaqat al-Syafi'iah al-Kubra* Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), hlm. 192

¹⁵Ibn Hajar, *Tawali al-Ta'sis fi Ma'ali Muhammad ibn Idris*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 45. Fakhruddin ar-Razi mengatakan bahwa riwayat yang mengatakan ibunda Imam al-Syafi'i berasal dari keturunan suku Quraisy adalah riwayat *syadz* dan bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Berkenaan dengan permasalahan ini, ar-Razi mengatakan: "Terdapat dua pendapat mengenai garis keturunan ibunya", pendapat pertama adalah riwayat yang *syadz* yang diriwayatkan oleh Hakim Abu Abdullah al-hafizh yang menyatakan Ibunda Imam al-Syafi'i bernama Fatimah binti Abdullah bin al-Husain bin Ali bin Abu Thalib. Kemudian riwayat kedua menyatakan bahwa ibunya berasal dari al-Azdi. Semua riwayat yang dinisbahkan kepada Imam al-syafi'i sendiri menunjukkan bahwa ibunya berasal dari al-Azdi. Nampaknya inilah pendapat yang disepakati oleh para ulama. Dengan nasab ia dari pihak ayah yang berasal dari suku Quraisy, maka selayaknya tidak perlu memaksakan menjadikan ibunya juga berasal dari keturunan Quraisy. Lihat Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu*, hlm. 16

Imam al-Syafi'i adalah pernyataan al-Khathib al-Baghdadi mengenai biografi Imam al-Syafi'i yang menyebutkan bahwa ibunda Imam al-Syafi'i adalah budak perempuan¹⁶.

Terlepas dari dualisme pernyataan di atas, terlihat silsilah keturunan Imam al-Syafi'i baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibunya dapat diketahui bahwa ia bukan penduduk asli Palestina, tetapi ia berasal dari Makkah dari keturunan suku Quraisy dari pihak ayah. Karena suatu keperluan ekonomi, ayah dan ibunya pergi ke Madinah dan pergi ke Palestina. Akan tetapi dalam suatu perjalanan ayahnya meninggal dunia sebelum Imam al-Syafi'i dilahirkan, sehingga ia menjadi yatim dalam asuhan ibunya¹⁷. Karena ibunya khawatir terlantar, maka Muhammad bin Idris al-Syafi'i akhirnya diajak pindah ke kampung halaman ibunya di Makkah supaya ia dapat berkembang dan besar di sana. Pada waktu pindah itu, Imam al-Syafi'i baru berumur dua tahun.¹⁸

Setelah berada di Makkah, kondisi serba kekurangan masih tetap dialami oleh Imam al-Syafi'i. Ibunya yang menjanda itu tidak dapat berbuat banyak kecuali mengandalkan santunan terbatas yang diperoleh sebagai anggota keluarga Muthalib.¹⁹

¹⁶Mushthafa Abdurrazaq, *A'lam al-Islam*, (t.tp.: 'Isa al-Halbi, t.th.), hlm. 10

¹⁷Ibunda Imam al-syafi'i adalah sosok ibu yang cerdas, ibu teladan dan ibu pendidik yang menyadari hak dan kewajibannya secara proporsional. Mengenai kecerdasan ibunda Imam al-syafi'i ini ada kisah menarik yang diceritakan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad nahrawi Abdus Salam. Pada suatu waktu, sang ibu bersama perempuan lain dan seorang laki-laki memberikan kesaksian di hadapan Hakim di kota Makkah. Tiba-tiba Hakim tersebut ingin mendiskreditkan dua saksi wanita itu. Maka, sang ibu berkata kepada si Hakim, "Anda tidak patut melakukan hal itu, karena Allah Swt. berfirman:...supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya". (Q.s.: 2: 282). Akhirnya, Hakim tersebut mengurungkan niatnya dan mengikuti kesaksian sang ibu dalam kasus tersebut. Lihat Abi al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir* ..., hlm. 6

¹⁸Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, hlm. 356. Al-Khatib dalam bukunya *Tarikh Baghdad* menyebutkan, satu riwayat yang sanadnya bersambung kepada Imam al-syafi'i, bahwa (Imam al-Syafi'i) mengatakan bahwa "Saya dilahirkan di Yaman, kemudian ibu saya kuatir akan nasab saya". Ibu saya berkata "Hendaknya kamu berada di daerah asalmu sehingga kamu dapat seperti mereka". Sehingga kemudian mempersiapkan diri menuju Makkah, saya tiba di kota Makkah dan saat itu saya berusia sepuluh tahun. Jika diamati, ibunda ia dua kali melakukan perjalanan ke Makkah. Kali pertama ketika ia berusia dua tahun dan kali kedua pada usia sepuluh tahun, saat kedua inilah ibunya mengarahkan untuk cinta ilmu pengetahuan. Lihat Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu*, hlm. 17

¹⁹Abd Al-Halim Al-Jundi, *Al-Imam al-Syafi'i: Nashir al-Sunnah wa Wadli al-Ushul*, (t.tp.: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 40

Akan tetapi, keadaan ini tidak menghalangi keberhasilannya yang gemilang dalam pendidikan.

Di akhir hayatnya, Imam al-syafi'i terkena penyakit ambien yang cukup akut, karena terlalu banyak aktivitas dan kurang istirahat selama beberapa tahun tinggal di Mesir. Waktunya habis untuk kegiatan menulis, mengajar, berdiskusi, menyebarkan mazhab dan membela dari kritikan rival-rivalnya.

Jum'at malam di akhir bulan Rajab 204 H/ 20 Januari 820 M, di kota Kairo selepas maghrib Imam al-Syafi'i mengembuskan nafas terkhir. ia dimakamkan di dekat bukit al-Muqattam. Kira-kira empat abad sesudah wafatnya, di dekat makamnya dibangun sebuah Museum berkubah besar oleh Sultan Ayyubiah, Malik al-Kamil pada tahun 608 H/1212 M.²⁰ Imam al-Syafi'i mewariskan peninggalan yang sangat berharga bagi umat Islam, yaitu karya-karya ilmiah dan mazhab fikih. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlimpah, meridhai, dan menempatkannya dalam surga yang lapang.

Masa hidup Imam al-Syafi'i berada pada dua zaman: lahir pada zaman pemerintahan Umayyah dan meninggal pada masa pemerintahan Dinasti Bani Abbas,²¹ tepatnya pada masa kekuasaan Abu Ja'far al-Mansur (137-159 H/754-774 M). Imam al-Syafi'i berusia 9 tahun ketika Abu Ja'far al-Mansur diganti oleh Muhammad al-Mahdi (159-169 H/775-785 M). Ketika Imam al-Syafi'i berusia dewasa, 19 tahun, Muhammad al-Mahdi diganti oleh Musa al-Mahdi (169-170 H/ 785-786 M) yang berkuasa hanya setahun. Setelah itu ia digantikan oleh Harun al-Rasyid (170-194 H/ 786-809 M), pada awal

²⁰A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah; Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 144

²¹Masa ini adalah suatu masa permulaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana telah diketahui di masa ini juga penerjemahan kitab-kitab mulai banyak, ilmu falsafah juga dipindahkan, ilmu-ilmu juga disusun dan berbagai pemahaman telah timbul dalam masyarakat Islam. Banyak peristiwa yang ada kaitannya dengan masyarakat berlaku dan bermacam-macam aliran pikir berkembang serta banyak pula pengacau.

kekuasaan Harun al-Rasyid ini usia Imam al-Syafi'i 20 tahun. Harun al-Rasyid digantikan oleh al-Amin (194-198 H/ 809-813 M), dan al-Amin digantikan oleh al-Makmun (198-218 H/ 813-833 M).²²

B. Pendidikan dan Kehidupan Intelektual Imam al-Syafi'i

Setelah dibawa ibunya pindah ke Makkah,²³ Imam al-Syafi'i dibesarkan dalam keadaan fakir.²⁴ Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada usia 7 tahun ia belajar baca tulis dan pada usia 9 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. ia mempelajari al-Quran kepada Ismail ibn Qasstantin, seorang *qari'* kota Makkah.²⁵

Selain kecenderungan ia terhadap al-Qur'an, ia juga mempunyai minat terhadap bidang kesusastraan Arab, ia berusaha menghindari dari pengaruh bahasa non-Arab yang saat itu merusak keaslian bahasa Arab. Untuk menjaga serta mempertajam kemampuan bahasa arabnya, Imam al-Syafi'i pergi ke daerah pedalaman Arab dan menetap ditengah-tengah suku Huzail yang terkenal dengan kefasihan masyarakatnya dalam

²²Ahmad Nahravi 'Abd al-Salam, *al-Imam al-Syafi'i fi Madzhabaih fi al-Qadim wa al-Jadid*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1994), hlm. 90. Hal ini juga sebagaimana yang dikutip oleh Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 101

²³Di Makkah, Imam al-Syafi'i mengikuti latihan memanah, dalam memanah ini ia mempunyai kemampuan di atas teman sebayanya. Dimana ia memanah dalam sepuluh kali, yang salah sasaran hanya sekali saja. Mengenai hobinya ini ia menuturkan, "Saya mempunyai kecenderungan kepada dua hal; memanah dan menuntut ilmu".

²⁴Tentang kefakirannya, Imam al-Syafi'i pernah berkata "Aku adalah seorang yatim di bawah asuhan ibuku. Ibuku tidak mempunyai dana guna membayar seorang guru untuk mengajarku. Namun, seorang guru telah mengizinkan diriku belajar dengannya ketika ia mengajar yang lain.

²⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 121

menggunakan bahasa Arab.²⁶ Kemudian ia menekuni Bahasa Arab dan syair hingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya, ia menekuni bidang fikih.²⁷

Menurut Ahmad Amin dalam bukunya *Dhuha al-Islam*, Imam al-Syafi'i belajar fikih dari Muslim Ibn Khalid al-Zanjiy seorang Mufti Mekkah. Saat masih tinggal di Mekkah, ia mendengar adanya seorang ulama besar Imam kota Madinah yaitu Imam Malik yang terkenal kepakarannya tentang ilmu agama terutama dalam bidang hadis. Kemudian ia ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik²⁸ serta mempelajari *al-Muwaththa*²⁹ yang telah dihapalnya, sehingga Imam Malik melihat bahwa Imam al-syafi'i termasuk orang yang cerdas dan kuat ingatannya.³⁰

Imam al-Syafi'i akhirnya disenangi Imam Malik, lalu menjadi tamu selama 8 bulan di rumah Imam Malik. Ia selalu menemani Imam Malik, baik di rumah maupun di mesjid.

²⁶Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu* ..., hlm. 18. Berkenaan dengan kisah pengasingan diri ke suku Huzail ini, Imam al-Syafi'i menyatakan "Saya keluar dari kota Mekah menuju kabilah Huzail daerah pedalaman Arab dan saya tinggal bersama mereka". Saya mempelajari bahasa suku Huzail dan mencari tahu tentang kebiasaan mereka. Masyarakat suku Huzail terkenal dengan kefasihan bahasanya. Ketika kembali ke Mekah saya sering membuat syair, menceritakan kisah-kisah sastra dan menguraikan riwayat-riwayat yang saya dapatkan. Tentang penguasaan ia terhadap syair-syair orang-orang suku Huzail ini mendapat pujian dari al-Ashmai' (ahli sastra Arab) memberi komentar tentang kemahiran beliau, dengan berkata "Saya telah mendapat koreksi mengenai sayair-syair Huzail dari seorang pemuda Quraisy yang bernama Muhammad bin Idris.

²⁷Sebab ketertarikan Imam al-Syafi'i terhadap fikih bermula dari suatu ketika ia bertemu dengan Muslim bin Khalid, maka Muslim bertanya asal, tempat tinggal dan asal kabilah Imam al-Syafi'i, lalu Imam al-Syafi'i menjawab pertanyaan tersebut secara berurutan. Setelah mendengar jawaban ia, kemudian Muslim berkata "Tidakkah kamu gunakan kepandaianmu untuk mendalami fikih? Aku rasa itu lebih baik bagimu". Berangkat dari perkataan inilah, akhirnya hati Imam al-Syafi'i tergetar dan tergerak untuk mempelajari fikih.

²⁸Terdapat suatu riwayat dalam kitab *Manaqib al-Syafi'i* karya Fakhruddin al-Razi pernyataan yang dilontarkan sendiri oleh Imam al-Syafi'i mengenai kepergiannya ke kota Madinah menemui Imam Malik serta kisah pertemuannya dengan Imam kota Madinah. Dimana dapat digambarkan bahwa ia hampir ditolak oleh Imam Malik pada pertemuan kali pertama karena membawa sepucuk surat dari walikota Madinah, dimana Imam Malik mengatakan "Subhanallah, ilmu Rasulullah, kini sudah dicari dengan jalan perantara dan rekomendasi. Kemudian Imam al-Syafi'i menjawab dan menjelaskan maksud dan tujuan ia. Demi setelah mendengar jawaban ia, Imam Malik menyuruh ia untuk datang esok harinya guna belajar kepada ia.

²⁹Mengenai kitab *al-Muwaththa* ini, Imam al-Syafi'i berkata: Aku telah mendatangi Imam Malik, sedang usiaku baru tiga belas tahun, demikian berdasarkan riwayat Adz-Dzahabi. Akan tetapi, secara dhahir nampak usianya pada waktu itu adalah dua puluh tiga tahun. Lihat Abi al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir* ..., hlm. 9

³⁰Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1974), hlm. 219

Setelah Imam Malik membacakan hadis kepada yang hadir, ia memberikan *al-Muwaththa'* kepada Imam al-Syafi'i untuk didiktekan kepada mereka. Dari sini orang-orang mengetahui posisi al-Syafi'i yang sebenarnya, sehingga bertambahlah pemahaman dan kekuatan hafalannya terhadap hadis Rasulullah Saw.

Kedekatannya dengan Imam Malik tidak menjadi penghalang baginya untuk menempuh perjalanan ke kota lain guna menimba ilmu dari ulama lain dan kedekatannya tersebut tidak menjadi pengkekang kebebasannya. Oleh sebab itu, saat masih di Madinah Imam al-syafi'i mengetahui bahwa Imam Abu Hanifah dulu berada di Iraq. Ketika wafat, ia telah melahirkan banyak ulama, diantaranya; Imam Abu Yusuf dan muhammad bin Hasan. Sehingga ia berhajat untuk bertemu dengannya dan juga para ulama yang lain. Maksudnya ini diutarakannya kepada Imam Malik, yang kemudian merestuinnya.

Dalam perjalanan intelektualnya ini, ia dipertemukan dengan Imam Muhammad bin al-Hasan salah seorang ulama besar terkemuka di negeri Irak.³¹ Di negeri itu Imam al-Syafi'i mempelajari fikih masyarakat Irak. Ia bertemu langsung dengan Imam Muhammad bin al-Hasan serta membaca karya-karyanya dan mengizinkan ia untuk menulis buku-buku yang dia miliki di perpustakaan pribadinya sesuka hatinya. Oleh karena itu, dalam diri Imam al-Syafi'i terkumpul dua aliran mazhab besar, yaitu: fikih *ahlu ra'yi* (fikih yang menjadikan akal sebagai rujukan utama dalam memahami al-Qur'an dan Sunnah) dan fikih *ahlu an-naql* (fikih yang lebih mengutamakan hadis-hadis Rasul Saw sebagai penafsir satu-

³¹Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu....*, hlm. 24. Lihat juga Ahmad Nahravi "Abd al-Salam, *al-Imam al-Syafi'i*, hlm. 62

satunya terhadap ayat-ayat hukum).³²

Kemudian Imam al-Syafi'i kembali ke Makkah setelah mempelajari fikih Irak. Di Masjid al-Haram, Imam al-Syafi'i mengajarkan fikih dalam dua corak, yaitu corak Madinah dan corak Irak. Ia mengajar di Masjid al-Haram selama 9 (sembilan) tahun. Pada tahun 195 H, Imam al-Syafi'i kembali ke Bagdad untuk melakukan diskusi tentang fikih. Ia tinggal di Bagdad yang kedua kalinya selama dua tahun beberapa bulan.

Imam al-Syafi'i tidak lama tinggal di Bagdad karena pemerintahan sedang dipimpin oleh al-Makmun (198 H) dari Dinasti bani Abbas. Al-Makmun cenderung berpihak kepada unsur Persia yang ketika itu telah dilakukan penerjemahan buku-buku filsafat secara besar-besaran, diantaranya dilakukan oleh Hunain Ibn Ishak yang telah menerjemahkan 20 (dua puluh) buku Galen ke dalam bahasa Syiria dan 14 (empat belas) buku lain ke dalam bahasa Arab,³³ dan dekat kepada Mu'tazilah, bahkan Mu'tazilah dijadikan madzhab negara secara resmi yang berakhir dengan kasus *mihnat*. Sedangkan Imam al-Syafi'i cenderung menjauhkan diri dari orang-orang Mu'tazilah. Ketika al-Makmun meminta Imam al-Syafi'i untuk menjadi hakim besar di Bagdad, Imam al-Syafi'i menolaknya, ia keluar dari Bagdad dan berangkat menuju Mesir.³⁴

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa di Madinah Imam al-Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan di Kufah ia berguru kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani yang beraliran Hanafi, dengan demikian Imam al-Syafi'i dapat dikatakan sebagai sintesis antara aliran Kufah dengan aliran Madinah. Disamping itu, Imam al-Syafi'i berguru kepada

³²Mengomentari hal ini, Ibnu Hajar mengatakan: "Kepemimpinan fikih di Madinah berada di tangan Imam Malik bin Anas, kemudian Imam al-syafi'i belajar kepada ia dengan menghadiri majlis-majlisnya". Sedangkan kepemimpinan fikih di Irak berada di tangan Imam Abu Hanifah, Imam al-syafi'i mengambil serta belajar banyak dari penerus Imam Hanfi yaitu Imam Muhammad bin al-Hasan. Pada diri ia (Imam al-Syafi'i) terkumpul fikih ahlu ra'yi dan fikih ahlu al-Hadis. Dengan inilah ia membangun fikih sendiri.

³³Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisme*, (Jakarta: UI Press, 1973), hlm. 11-12

³⁴T.M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 238

beberapa ulama selama tinggal di Yaman, Makkah dan Kufah.³⁵ Di antara ulama Yaman yang dijadikan guru oleh Imam al-Syafi'i adalah (a) Mutharraf Ibn Mazim; (b) Hisyam Ibn Yusuf; (c) Umar Ibn Abi Salamah; dan (d) Yahya Ibn Hasan.³⁶

Dalam menguasai fikih Madinah, Imam al-Syafi'i berguru langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai fikih Irak, ia berguru kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani yang merupakan pelanjut fikih Hanifah. Disamping itu, mempelajari fikih al-Auza'i dari Umar Ibn Abi Salamah dan mempelajari fikih al-Laits kepada Yahya Ibn Hasan.³⁷ Mengenai gurunya yang berlainan satu sama lainnya ini membantu ia dalam meluaskan bidang ilmu fikih, juga menambah banyaknya perbendaharaan ilmu-ilmu yang dipelajari serta meninggikan ilmu pengetahuannya.

Tidak jarang pula Imam al-syafi'i mengadakan perbincangan ilmiah dengan guru-gurunya serta mengkritik pendapat-pendapat gurunya dengan cara begitu ia dapat menyatukan antara ilmu fikih orang-orang Madinah dengan ilmu fikih orang-orang Irak. Keadaan tersebut di atas menunjang ia untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum, oleh karena itu ia terkenal di kalangan orang banyak dan tarafnya tinggi sebagaimana telah diketahui.

³⁵Ahmad Nahravi 'Abd al-salam, menginformasikan bahwa ulama Makkah yang menjadi guru Imam al-Syafi'i adalah: (1) Sufyan Ibn 'Uyanah, (2) Muslim Ibn Khalid al-Zunji, (3) Sa'id Ibn Salim al-Qadah, (4) Daud Ibn Abi Daud. Sedangkan guru-guru Imam al-Syafi'i dari kalangan ulama Madinah adalah: (1) Malik Ibn Anas, (2) Ibrahim Ibn Sa'id al-Anshari, (3) 'Abd al-'Aziz Muhammad al-Durawardi, (4) Ibrahim Ibn Abi Yahya al-Aslami, (5) Muhammad Ibn Sa'id Ibn Abi Fudaik dan (6) 'Abd Allah Ibn Nafi'. Lihat Ahmad Nahravi "Abd al-Salam, *al-Imam al-Syafi'i* ... hlm. 55.

³⁶Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawi Qadim dan Qawi Jadid*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 30

³⁷T. M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan...*, hlm. 241

C. Kondisi Sosial Masa Imam al-Syafi'i

Daulah Islamiyah mengalami perkembangan secara bertahap dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan arah perubahan zaman. Dalam catatan sejarah, Daulah 'Abbasiyah (132- 657 H/ 750- 1075 M) telah membawa umat Islam menuju peradaban keemasan, karena berhasil memajukan aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya.³⁸ Kehidupan sosial pada masa Imam al-Syafi'i khususnya atau awal kekuasaan Dinasti 'Abbasiyah secara umum, diwarnai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan kesusasteraan yang sangat dominan.³⁹

Suatu falsafah yang dianut oleh dinasti Abbasiyah untuk menuju masyarakat yang makmur dan merata adalah menyerahkan pembangunan ekonomi kepada orang-orang yang terdidik dan pakar di bidang ekonomi. Sebagai suatu dinasti yang memiliki wilayah yang sangat luas, tidaklah suatu hal yang mudah untuk mengatur kehidupan rakyatnya menuju kemakmuran.⁴⁰ Berdasarkan fakta sejarah, terungkap figur pemimpin yang berada pada pemerintahan Dinasti Abbasiyah dibawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid merupakan masa yang paling gemilang dalam perjalanan peradaban Islam. Ketika orang-orang Eropa masih dalam zaman kegelapan, Baghdad yang merupakan ibu kota dinasti ini pada masa itu justru telah tampil menjadi pusat peradaban.

Seorang orientalis Barat non-Islam dalam hal ini secara jujur pernah berkata:

“Selama lima ratus tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu-ilmu pengetahuan dan peradabannya yang tinggi. Sebagai ahli waris kekayaan ilmu pengetahuan dan falsafah orang-orang Yunani, Islam melanjutkan kekayaan ini

³⁸Di zaman inilah telah lahir berbagai disiplin ilmu dan pada zaman ini juga telah diterjemahkan ratusan bahkan ribuan jilid buku-buku ke dalam bahasa Arab. Lihat A. Hasymi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 196

³⁹Ahmad Nahravi Abdus Salam al-Indunisi, *Al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabihial-Qadim wa al-Jadid*, *Ensiklopedia Imam Asyafi'i*, Penj. Usman Sya'roni, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), hlm. 67

⁴⁰Ibrahim Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Tasyri' al-Siyasi*, (Kairo: Maktabah Nahdhatul Misyriyah, 1949), hlm. 242-254.

setelah memperkayanya sampai ke Eropa Barat. Jadi, Islam telah sanggup melebarkan kekuasaan pemikiran abad-abad pertengahan dan membuat suatu kesan yang mendalam pada kehidupan dan pemikiran Eropa”.⁴¹

Ungkapan di atas tampaknya tidak berlebihan, karena dari penelusuran sejarah kebenarannya dapat dibuktikan. Tercatat bahwa di zaman Harun ar-Rasyid dan putranya al-Ma'mun ini banyak terjadi gerakan penerjemahan buku-buku dari Yunani, seperti filsafat, kedokteran dan lain secara besar-besaran yang disponsori langsung oleh Khalifah. Di era ini pula berdiri suatu lembaga penerjemahan yang termasyhur bernama *Bait al-Hikmah*.

Wilayah kekuasaan Islam pada masa ini terbentang luas, mulai dari Andalusia di Barat sampai India di Timur dibawah lindungan Daulah Islamiyah, berbagai umat manusia hidup berdampingan secara damai. Mereka mempunyai ciri masing-masing yang berbeda antara satu dan lainnya baik dari warna kulit, postur tubuh, sifat maupun karakter lainnya. Bahkan juga memiliki tradisi, kebudayaan dan kecenderungan politik yang tidak sama karena berasal dari tempat yang berbeda-beda. Alirannya pun berbeda-beda ada Sunni dan ada pula yang Syi'ah, bahkan ada juga orang kafir yang taat pajak (*ahl-dzimma*), status sosialnya pun tidak seragam, ada yang merdeka dan ada yang masih dalam status budak.⁴² Mereka semua dapat hidup berdampingan dengan damai dalam satu ikatan Daulah Islamiyah. Mereka membaur, berinteraksi dan saling bertukar pikiran dalam satu spirit yang menyatukan mereka semua yaitu semangat persatuan Islam.

Adanya keberagaman yang sangat kompleks terkadang dapat menimbulkan konflik, seperti yang pernah terjadi antara bangsa Arab dan Persia. Pada masa Dinasti 'Abbasiyah, pengaruh bangsa Persia cukup dominan akibat adanya dukungan dari

⁴¹Dikutip oleh A. M. Saefuddin *et. al*, *Desekulerisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 170

⁴²Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam....*, hlm. 403

penguasa.⁴³ Karena itu, dengan sendirinya tradisi dan budaya Persia menjadi lekat dalam gaya hidup Dinasti 'Abbasiyah, sehingga kehidupan masyarakat Islam seperti kehidupan masyarakat Persia yang mirip Arab.⁴⁴ Para penguasa Bani 'Abbas mulai terpengaruh dengan gaya hidup mewah dan arogan. Kemegahan istana-istana dan keindahan taman milik para khalifah dan para pejabat menggambarkan sisi materialisme kehidupan mereka. Menurut satu sumber, disebutkan bahwa Harun ar-Rasyid memiliki 2000 penyanyi dan pelayan minum yang berpakaian indah dan berkalung mutiara.⁴⁵

Ibnu khilikan menguraikan, pernikahan al-Ma'mun dengan Waran binti al-Hasan bin Sahl berlangsung dengan pesta yang sangat mewah dan meriah. Resepsi tersebut bisa dikatakan sebagai pesta pernikahan paling spektakuler sepanjang sejarah, salah satu acara pestanya adalah menembakkan peluru kertas kepada Bani Hasyim, para panglima dan para penulis. Kertas itu bertuliskan nama-nama lahan produktif, nama gadis pelayan, nama hewan tunggangan dan sebagainya. Jika peluru itu mengenai seseorang, lalu ia membaca tulisan yang ada di kertas tersebut maka ia akan mendapatkan hadiah sesuai

⁴³Hal ini dapat dilihat dari sistem pemerintahan atau sistem kekhalifahan yang diterapkan pada masa itu sebagaimana sistem pemerintahan yang diterapkan orang-orang Persia pada masa imperium Dinasti Sasan. Ini disebabkan oleh adanya ketertarikan Bani 'Abbas terhadap model sistem pemerintahan Persia dan sebagai upaya untuk melindungi orang-orang Persia. Lihat Ibrahim Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam*, (t.tp.: Lajnah at-Ta'lif, 1959), hlm. 88-90

⁴⁴Ahmad Amin mengutip pernyataan al-Jahiz yang disebutkan dalam kitab *al-Bayan wa at-Tabyin*, 'Pada zaman dulu ketika banyak orang Persia tinggal di Madinah, kata-kata Persia sering digunakan di sana. Mereka menyebut *al-bathikh* (semangka) dengan istilah *al-khirbiz*. Demikian pula penduduk Kufah, mereka menyebut *al-mishah* (sekop) dengan istilah *bal*. Sementara penduduk Bashrah menamakan perempatan jalan (*murabba'ah*) dengan sebutan *al-jaharsu* dalam istilah Persia. Pasar yang dalam bahasa Arabnya *suq* atau *sumaiqah* disebut dengan istilah *wazar* dalam bahasa Persia. Sedangkan timun yang bahasa Arabnya *al-qitsa'* disebut *al-khiyar*. Lihat Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*..., hlm. 183

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 9. Imam an-Nuwairi telah menuliskan bab tersendiri tentang kehidupan para khalifah bersama dengan kerabatnya, pelayan minum, dan para biduan yang menyanyikan lagu Persia dalam bahasa Arab. Salah satu penyanyi kondang yang sering diundang khalifah adalah Abu al-Mihna al-Mukhariq. Ia pernah bernyanyi di hadapan lima khalifah, yaitu ar-Rasyid, al-Amin, al-Ma'mun, al-Mu'tashim dan al-Watsiq. Sedangkan Ishaq bin Ibrahim al-Mushili dikenal sebagai orang yang ahli memainkan alat-alat musik dan pandai menyanyi. Lihat Imam al-Nuwairi, *Nihayah al-Arb*, (t.tp.: Dar al-Kutub, t.th.), hlm. 239-307

dengan apa yang terdapat di dalam tulisan itu. Setelah acara tembak kertas selesai, acara dilanjutkan dengan tabur uang dinar dan dirham.⁴⁶

Hal ini senada dengan pernyataan Imam ath-Thabari yang mengutip pernyataan al-Hasan bin Abu Sa'id yang menerangkan bahwa pada suatu hari, Khalifah al-Mahdi membagi-bagikan hadiah kepada para kerabat dan para panglimanya dengan cara menyebutkan nama mereka satu per satu. Pada nama-nama tertentu, Khalifah menyuruh agar hadiahnya ditambah dengan uang sebanyak sepuluh ribu, dua puluh ribu dan seterusnya.⁴⁷

Walaupun jumlah budak pada masa itu cukup banyak, mereka tetap mendapatkan perlakuan sama dan tidak dipandang sebelah mata, hal ini karena di masa lalu ibunda para Khalifah ('Abbasiyah) adalah seorang hamba sahaya. Orang-orang kafir yang taat pajak dari Nasrani dan Yahudi sangat menikmati iklim toleransi yang baik. Karena itu, di Baghdad banyak ditemukan biara, seperti biara al-'Adzari. Pemerintah Islam tidak pernah mengusik aktivitas ritual agama mereka. Bahkan karena terlalu toleransinya sebagian Khalifah ada yang menghadiri acara karnaval dan peringatan hari-hari besar keagamaan mereka serta memberikan penjagaan yang ketat agar acara tersebut dapat berlangsung dengan aman dan lancar.⁴⁸

Kehidupan sosial yang damai ini memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan politik, ilmu pengetahuan, kesusastraan dan kesenian. Para Khalifah dan para pembesar negara memberikan fasilitas yang baik kepada ulama, ahli fikih, pakar sastra, penulis, penyanyi dan tokoh masyarakat. Sebab pada masa dinasti ini banyak juga

⁴⁶Ibnu Khilikkan, *Wafayat al-A'yan*, (t.tp.: An-Nahdhah, t.th.), hlm. 258. Ath-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1977), hlm. 394

⁴⁷Ath-Thabari, *Tarikh al-Umam*, *Ibid.*,

⁴⁸Ahmad Nahravi Abdus Salam al-Indunisi, *al-Imam al-Syafi'i*, hlm. 78

rumah para ulama yang dijadikan tempat belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁹ Hal ini dilakukan untuk memperkuat legitimasi para penguasa, sehingga mereka sering mendapatkan bantuan dana dan hadiah-hadiah dari para penguasa.

Sementara, kesenian seperti syair yang sangat dibangga-banggakan hanya mekar di dada para Khalifah saja, tetapi layu di hati rakyat. Para penyair ulung yang dieluk-elukkan hanyalah orang-orang yang suka mencari muka di hadapan para Khalifah. Catatan sejarah menyebutkan, syair hanya berkembang di Irak. Sedangkan di Mesir, Syria dan Hijaz tidak begitu populer atau bahkan hampir tidak ada.⁵⁰

D. Karya-Karya Imam al-Syafi'i

Sebelum membahas karya-karya Imam al-Syafi'i, ada baiknya apabila dikaji lebih dulu mengenai metode penulisan, gaya bahasa, dan latar belakang pemikiran Imam al-Syafi'i. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Imam al-Syafi'i adalah sosok yang sangat memperhatikan ilmu dan mencintainya melebihi kecintaan terhadap dirinya sendiri. Sejak kecil, ia sudah terbiasa mencatat semua pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, berkenaan dengan hadis-hadis, masalah fikih dan sebagainya. Kemudian ia meringkas catatan-catatan tersebut untuk dijadikan sebagai sumber rujukan ketika ia siap menulis.⁵¹ Dalam menuangkan gagasan-gagasan dan menuliskannya, Imam al-Syafi'i menggunakan metode filsafat dan logika. Karena itu, karya-karyanya bersifat sangat ilmiah, kajiannya mendalam, metodenya jelas dan analisisnya terarah.

⁴⁹Di antara rumah para ulama yang dijadikan tempat belajar adalah rumah Abu Muhammad ibn Hatim al-Razy al-Hafish seorang *muhaddis* yang terkenal *kesiqahannya*. Lihat dalam Hasan 'Abd al-'Syarkhawi, *Tarbiyah al-Islamiah fi al-Qarn al-Rabi'a al-Hijri*, (t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), hlm. 194

⁵⁰Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*....., hlm. 139-142

⁵¹Ahmad Nahravi Abdus Salam al-Indunisi, *al-Imam al-Syafi'i*, hllm. 50

Adapun mengenai gaya tulisan Imam al-Syafi'i, hal ini dijelaskan oleh al-Jahizh, "Saya telah meneliti kitab-kitab karya para ulama, ternyata saya tidak melihat suatu karya yang seindah tulisan al-Syafi'i. Rangkaian katanya seperti untaian mutiara.⁵² Dalam tulisan-tulisannya, ia sering menggunakan redaksi yang bersifat dialogis, enak dibaca dan sangat menarik. Penulisan tersebut mengikuti gaya bahasa al-Qur'an, gaya bahasa seperti ini merupakan tehnik penulisan yang terbaik karena dapat menyentuh para pembaca dan mempengaruhi psikologinya.

Para penulis biografi Imam al-Syafi'i selalu menampilkan sosok al-Syafi'i sebagai seorang ulama paripurna dengan pengetahuan yang luas dan mendalam meliputi berbagai cabang ilmu yang berkembang pada masanya. Mengingat ada hubungan yang erat antara latar belakang ilmu seseorang dengan pendapat-pendapat yang dikemukakannya, pada bagian ini akan dikemukakan karya-karya Imam al-Syafi'i⁵³ yang dikemudian hari menjadi rujukan ahli hukum Islam bagi pengembangan hukum Islam.

Imam Asyafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa ia menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fikih, tafsir, ilmu ushul dan sastra (*al-Adab*) dan lain-lain. Al-baihaqi dalam *manaqib al-Syafi'i* mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140-an kitab, baik dalam *Ushul* maupun dalam *Furu'* (cabang).⁵⁴ Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam al-Syafi'i

⁵²Ar-Razi, *manaqib al-imam al-Syafi'i* ..., hlm. 87

⁵³Karya –karya ia, ada yang ia tulis dan himpun sendiri, ada pula karya-karya yang dikaitkan dengan ia atau pendapat-pendapat ia yang dibukukan oleh murid-muridnya. Karya berbentuk deskriptif atau dialog biasanya diriwayatkan oleh Abu Muhammad al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Karya-karya ia juga biasanya diresensikan oleh murid-muridnya yang lain seperti Abu Thaur, al-Muzani dan al-Buwaiti.

⁵⁴Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i* ..., hlm. 245-246

jumlahnya mencapai sekitar 113-140 (antara seratus tiga belas sampai seratus empat puluh) kitab.⁵⁵

Adapun Ibnu An-Nadim menuturkan dalam *al-Fahrasat* bahwa karya Imam al-Syafi'i berjumlah 109 (seratus sembilan) kitab.⁵⁶ Terdapat pula keterangan dalam kitab *Taweli al-Ta'sis* karya Ibnu Hajar bahwa karya Imam al-Syafi'i berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) kitab. Menurut Yakut dalam kitabnya *Mu'jam al-Udaba* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Al-Syurbasi, menerangkan bahwa puluhan nama kitab yang dikarang oleh Imam al-Syafi'i. Jika kita perhatikan dengan baik bahwa kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana kitab yang kita maksudkan pada hari ini, tetapi hanya beberapa bab fikih.

Di antara kitab karyanya yang terkenal adalah *Al-Risalah*⁵⁷ yang ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna dan banyak menyimpan makna beserta dasar-dasar yang kokoh. Kitab tersebut merupakan bukti kecemerlangan akal dan pemikirannya yang lengkap serta gaya bahasa yang menarik.⁵⁸ Ada kemungkinan bahwa kitab ini mulai ditulis ketika ia berada di Makkah dan baru dipublikasikan setelah ia pindah ke Irak dengan perbaikan-perbaikan seperlunya atas kerja sama dengan murid-muridnya di sana.

⁵⁵Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, (Kairo: Dar al-Akidah, 2005), hlm.

⁵⁶Ibnu An-Nadim, *al-Fahrasat*, Juz. VI, (t.tp.: t.p., t.th.), hlm. 264

⁵⁷Mengenai asal mula Imam al-Syafi'i mengarang kitab ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Tsaur, ia berkata " Abdurrahman bin Mahdi mengirim surat kepada Imam al-Syafi'i meminta agar dituliskan sebuah kitab yang berisi makna-makna al-Qur'an, hadits-hadits *maqbul*, dasar-dasar *ijma'* dan *nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an serta hadits. Kemudian ia menuliskannya kitab yang bernama *Ar-Risalah*. Padahal, pada waktu itu Imam al-Syafi'i masih muda. "Abdurrahman al-Mahdi berkata, "Aku tidak menunaikan shalat kecuali dalam shalat itu aku mendoakan Imam al-Syafi'i". Lihat Al-baihaqi, *Al-Manaqib al-Syafi'i* ..., hlm. 61-62

⁵⁸Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam* ..., hlm. 136

Kitab *al-Risalah*⁵⁹ merupakan kitab Ushul Fikh yang tertua dan dianggap sebagai kitab Ushul Fikh yang pertama.⁶⁰ Kitab ini diberi nama *al-Risalah* karena Imam al-Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi.⁶¹

Karya utama yang pada awalnya diimlakan dan kemudian ditulisnya adalah *Kitab al-Umm*.⁶² Imam Abu Zahrah berpendapat bahwa kitab ini merupakan *al-Hujjat al-Ula* dalam aliran Syafi'i. Karena kitab ini adalah tempat rujukan yang pertama golongan Syafi'iyah dalam menyelesaikan suatu masalah yang muncul di tengah masyarakat. Sedangkan kitab yang kedua adalah *Al-Risalah*. Karena kitab inilah Imam al-Syafi'i dianggap sebagai Bapak Ushul al-Fikh. Fakhr al-Din al-Razi berpendapat bahwa nisbah al-Safi'i terhadap ilmu ushul al-Fikh seperti nisbah Aristoteles terhadap ilmu mantiq dan nisbah al-Khalil Ibn Ahmad terhadap ilmu *Arudh*.⁶³

⁵⁹Imam al-Syafi'i menulis kitab *ar-Risalah* dua kali, yang *Pertama*, ditulis sebelum datang ke Mesir dan terkenal dengan sebutan *ar-Risalah al-Qadimah* (Kitab Risalah Lama). *Kedua*, ditulis di Mesir dan disebut dengan *ar-Risalah al-Jadidah* (Kitab Risalah Baru). Kitab *ar-Risalah* yang ada sekarang ini adalah Kitab *ar-Risalah* yang baru. Ibnu Khaldun berkata, "Asy-Syafi'i adalah ulama pertama yang berhasil menyusun kitab tentang ushul fikih, ia mendiktekan penulisan kitab yang terkenal itu. Lihat Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 455

⁶⁰Abu Zahrah, *Tarikh Madzahib Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm. 157

⁶¹Kitab ini telah ditahkik Ahmad Syakir dan terbit di Kairo pada tahun 1940 M. Lihat Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, hlm. 135

⁶²*Al-Umm* adalah sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fikih. Sebagaimana Imam al-Ghazali menyalin pandangan al-Makki yang mengatakan: Sebagian ahli sejarah ada yang menolak pendapat yang mengatakan kitab *al-Umm* dikarang oleh Imam al-Syafi'i, mereka berpendapat bahwa kitab *al-Umm* adalah kitab yang dikarang oleh Abi Yakub al-Buwaithi. Sebagai dalilnya bahwa Abi Talib al-Makki pernah menyebut dalam kitabnya *Kutul-Kulub*, suatu ibarat yang mengatakan kitab *al-Umm* adalah dari al-Buwaithi, ia menyusun kitab *al-Umm* yang dikatakan pada sekarang dari Ar-Rabi bin Sulaiman dan kitab yang terkenal dengan namanya, sebenarnya ia adalah himpunan dari al-Buwaithi tetapi ia tidak menyebutkan namanya di dalamnya dan diserahkan kitab itu kepada Ar-Rabi'. Ar-Rabi' menambah dan menyiarkan kepada manusia oleh karena itu manusia mengetahui dan mendengarnya dari Ar-Rabi'. Tetapi patut diingatkan bahwa kitab *Kutul-Kulub* tidak boleh dipercayai tentang periwayatan hadits-hadits lebih-lebih lagi akbar. Sesungguhnya semua riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa kitab *al-Umm* adalah karangan Imam al-Syafi'i. Boleh jadi yang dimaksudkan dengan perkataan *sannafa* dalam ibarat kitab *Kutul-Kulub* ialah bahwa al-Buaiti menghimpun atau menyusun bagian-bagian kitab itu bukanlah berarti ia mengarangnya.

⁶³Manna' al-Qathhan, *al-Tasyri' wa al-Fikh fi al-Islam: Tarikh (an) wa Manhaj (an)*, (t.tp.: Dar al-Ma'arif, 1989), hlm. 234

Ahmad Nahrawi 'Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam al-Syafi'i adalah *Musnad li al-Syafi'i*, *al-Hujjah*, *al-Mabsuth*⁶⁴, *al-Risalah*, dan *al-Umm*⁶⁵ Imam ar-Razi berkata, "Karyanya yang berjudul *Musnad al-Syafi'i* adalah kitab yang sangat terkenal dan tidak ada seorang pun yang mencelanya.⁶⁶ Sementara Muhammad al-Khudhari menegaskan, Imam al-Syafi'i mempunyai kitab *Musnad* lainnya, yaitu hadis-hadis *musnad*⁶⁷ yang diriwayatkannya dalam kitab *al-Umm*⁶⁸

Murid-murid Imam al-syafi'i membagi karya Imam al-Syafi'i menjadi dua bagian, yaitu *al-Qadim* dan *al-Hadits*. *Al-Qadim* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam al-Syafi'i berada di Baghdad dan Mekkah. Sedang *Al-Hadits* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir.⁶⁹ Perlu digaris bawahi bahwa tidak semua kitab yang berisi buah pikiran Imam al-Syafi'i itu dinisbahkan kepada namanya. Karena terdapat pula kitab-kitab yang dikarang oleh murid-muridnya dengan mengambil buah pikiran Imam al-Syafi'i. Kitab-kitab Imam al-Syafi'i itu seperti *al-Umm*, *al-Risalah*, *Ikhtilaf al-Iraqiyin*, *Ikhtilaf Malik* dan masih ada beberapa lainnya semuanya dinisbahkan kepada namanya sendiri, isi dan lafazhnya asli darinya (Imam al-Syafi'i). Sedangkan kitab-kitab seperti *Mukhtasar al-Buaiti* dan *Mukhtasar al-Muzni* adalah kitab-kitab yang dinisbahkan kepada murid-muridnya, isi dari Imam al-Syafi'i sedangkan lafazd dan susunan kalimatnya dari orang yang membuat ringkasan terhadapnya (*Ikhtisarat*).⁷⁰

⁶⁴Ibnu Nadim berkata, "Salah satu karya penting Imam al-Syafi'i adalah kitab *al-Mabsud*, yang berisi tentang kajian fikih. Ar-Rabi' bin Sulaiman dan az-Za'farani meriwayatkan langsung dari Imam al-Syafi'i. Daftar isi kitab ini antara lain: *Kita bath-Thaharah*, *Kitab ash-Shalat*, *Kitab az-Zakat*, *Kitab ash-Shiyam*, *Kitab al-Haji*, *Kitab al-I'tikaf*, dan seterusnya. Lihat Ibnu Nadim, *al-Fahrasat*, hlm. 295

⁶⁵Ahmad Nahrawi 'Abd al-Salam al-Indunisi, *al-Imam al-Syafi'i* ..., hlm. 710.

⁶⁶Ar-Razi, *Manaqib al-Imam al-Syafi'i* ..., hlm. 83

⁶⁷Hadis *Musnad* adalah hadis hadis yang disandarkan langsung kepada Rasulullah Saw. Menurut sebagian, hadis *musnad* lebih tinggi kualitasnya daripada hadis *marfu'*.

⁶⁸Muhamad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyri'*, hlm. 319

⁶⁹Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf* ..., hlm. 135

⁷⁰Abu Zahrah, *Tarikh Madzhib al-Islamiyah*, hlm. 165

Selain judul-judul yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi yang lainnya seperti: *Ibthal al-Istihshan*, *al-Musnad*, *ar-Raad' ala Muhammad ibn al-Hasan*, *al-Qiyas*, *al-Imla'*, *al-Amal*, *al-Qasamah*, *al-Jizyah*, *Qital ahl al-Baqy*, *Siyar al-Auza'i*, *Ikhtilaf al-Hadits*, *Istiqbal al-Qiblatain* dan sejumlah karya yang tidak dapat dikemukakan lagi.⁷¹ Di antara judul-judul tersebut, ada yang hanya dapat dijumpai namanya saja dalam karya-karya ulama sesudahnya dan ada pula yang dimasukkan ke dalam judul lain. Hanya beberapa judul saja yang dapat ditemukan beredar di Indonesia, antara lain *ar-Risalah*, *al-Umm* dan *Ahkam al-Qur'an*.

Mengenai karya-karya Imam al-Syafi'i yang banyak jumlahnya ini, pantaslah kiranya bila kita menyimak pernyataan Ar-Rabi' bin Sulaiman yang memberitahukan bahwa Imam al-Syafi'i pernah berkata, "Diperlihatkan dalam mimpi seseorang sedang mendatangkiku. Lalu dia membawa kitab-kitab karyaku dan melemparkannya di udara, sehingga buku-bukuku itu berhamburan. Kemudian sebagian ahli tafsir mimpi berkata, "Kalau mimpimu itu benar, maka tidak ada satu pun negara Islam yang tidak menggunakan ilmunu".⁷²

E. Imam al-Syafi'i Dalam Pandangan Ulama

Imam al-Syafi'i adalah seorang alim dalam bidang ilmu fikih, ia juga dikenal dan terkenal sebagai sarjana dalam sastra bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang lain. Ia juga seorang bijaksana yang dapat memberikan penjelasan dengan ringkas serta padat. Nasihat dan kata-kata yang dikeluarkannya mendapat sambutan dari orang banyak serta diikuti

⁷¹Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i* ..., hlm. 10

⁷²*Ibid.*, hlm. 87

oleh mereka.⁷³ Ibnu Hisyam seorang yang ahli dalam bahasa Arab dan nahwu, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad al-Syurbasi menegaskan bahwa Imam al-Syafi'i adalah menjadi hujjah dalam bahasa. Begitu juga orang-orang lain seperti Abu Ubaid, Ayyub bin Suwaid, Abu Utsman al-Mazni memberi pengakuan yang sama. Ibnu Hisyam pernah meminta penjelasan dari Imam al-Syafi'i dalam hal tersebut.

Selain itu juga terdapat kata-kata pengakuan dan pujian dari orang-orang terdahulu (*as-Salaf*) yang ditujukan kepada Imam al-Syafi'i, sebagai berikut:⁷⁴

1. Abu Bakar Al-Muhaidi berkata: Imam al-Syafi'i adalah pemimpin bagi ulama-ulama fikih.
2. Ahmad bin Hambal juga berkata: Imam al-Syafi'i adalah filosof dalam empat perkara: Bahasa, tempat tumpuan manusia, ilmu "*ma'ani*" dan ilmu fikih.
3. Sufyan Ath-Tsauri berkata: Imam al-Syafi'i adalah semulia-mulia orang waktu itu.
4. Yahya bin Said Al-Kattani berkata: Aku tidak pernah menjumpai orang yang lebih bijak dan alim dalam ilmu fikih lebih darinya (Asy-Syafi'i).
5. Ayyub bin Suwaid Ar-Ramli berkata: Aku sangka aku tidak akan menjumpai orang yang seperti Imam al-Syafi'i seumur hidupku.
6. Muhammad bin Abdul Hakam berkata: Jika Imam al-Syafi'i tidak ada tentu aku tidak mengetahui bagaimana hendak menjawab kepada seseorang, melaluinyalah aku mengetahui apa yang ku ketahui, ia juga orang yang mengajar kepadaku ilmu *qiyas*, mudah-mudahan Allah memberi rahmat-Nya, Imam al-Syafi'i adalah juga

⁷³Lihat Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*. . hlm. 118 Tentang kelebihan ia ini baca juga, Abi al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir*, hlm. 11

⁷⁴Tentang pujian terhadap ia dapat dilihat pada Abi al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir*, hlm. 25

seorang yang mendukung kepada sunnah dan *atsar*, ia juga ahli kebaikan serta ia seorang yang lidahnya fasih dan berakal bijak serta tegas.

7. Daud bin Abu Az-Zahiri berkata: Imam al-Syafi'i banyak mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada orang lain, kemuliaan keturunannya, kebenaran agamanya dan pegangan, kehalusan jiwa, juga pengetahuannya tentang sejarah khalifah-khalifah dan baik pula penulisannya.
8. Abu Yusuf berkata kepada Imam al-Syafi'i: Susunlah kitab-kitab karena engkau adalah orang yang lebih utama untuk menyusun kitab di zaman ini.
9. Ibnu Uyainah berkata kepada mereka dan mereka bertanya kepadanya tentang tafsir dan fatwa: Tanyalah Imam al-Syafi'i.

Kata-kata pujian tentang Imam al-Syafi'i lainnya, diriwayatkan dari Hamid ibn Janzawiyah bahwa Ahmad ibn Hambal berkata terdapat hadis Nabi Saw. yang berbunyi: "Pada setiap seratus tahun akan datang seorang pembaharu dalam agama yang akan menjelaskan urusan agama kepada manusia, dan aku (Ahmad ibn Hambal) melihat pada seratus tahun pertama pembaharu itu adalah Umar ibn Abdul Aziz, dan pada seratus tahun kemudian adalah Muhammad ibn Idris, keduanya merupakan keturunan Nabi Muhammad Saw.⁷⁵

Sebagai seorang yang besar dan mashur, Imam al-Syafi'i tidak terlepas dari kritikan-kritikan, bahkan penghinaan di samping penghargaan-penghargaan yang diterimanya. Sebagian pengkaji sejarah Imam al-Syafi'i mencoba mengkritiknya, mereka berpendapat bahwa ia bukan seorang pembaharu (*mujaddid*) agama karena ia tidak dapat menghilangkan golongan yang melampaui yang ada pada waktu itu dan juga yang

⁷⁵Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Sala*, hlm. 119

menentukan bahwa pemimpin adalah tertentu kepada orang Quraisy saja dan ia memberikan fatwa bahwa Imam harus juga dengan tidak melalui ikatan setia orang banyak jika dalam keadaan terpaksa.⁷⁶

Imam al-Syafi'i pun tak luput dari penghinaan dari ulama lain. Para pengikut Abu Hanifah menjelaskan riwayat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya pada generasi awal. Dalam rangka mengagungkan madzhabnya, mereka menjelek-jelekkan Imam al-Syafi'i dengan berkata:

وانه ليس قريشا بل من موال قريش

“Sesungguhnya Imam al-Syafi'i bukanlah keturunan bangsawan Quraisy, tetapi ia keturunan budak-budak Quraisy”.⁷⁷

Begitu juga para pengikut Imam Malik, mereka menjelek-jelekkan Imam al-Syafi'i dengan mengatakan:

الشافعي غلام مالك

“Imam al-Syafi'i adalah pembantu Imam Malik”.⁷⁸

Karena fanatik aliran hukum begitu tinggi, umat Islam yang hidup pada fase *taqlid* (jumud, statis) tidak segan-segan membuat hadits palsu untuk mengagungkan alirannya dan menghina Imam madzhab lain. Para pengikut aliran Hanafi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:

⁷⁶Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa keadaan ini harus sewaktu dalam kesukaran, kesukaran adalah mengharuskan larangan-larangan, ia maksudkan ialah menjauhkan umat dari dua perkara yang lebih besar bahayanya, (ini sebagai jawaban terhadap kritikan ini).

⁷⁷Muhammad Taqiya al-Hakim, *al-Ushul al-Ammat li al-Fikh al-Muqarin*, (Beirut: Dar al-Andalus, 1963), hlm. 394

⁷⁸*Ibid.*,

يكون في امتي رجل بقول له النعمان وهو سراج امتي ويكون فيهم رجل يقال له محمد بن

ادريس وهو اضرعلى امتي من ابليس

“Akan ada suatu waktu seseorang yang bernama al-Nu'man (Abu Hanifah) ; dia adalah pelita umatku. Dan akan ada pula seseorang yang bernama Muhammad Ibn Idris (Asy-Syafi'i); dia akan menyulitkan umatku lebih dari iblis”.⁷⁹

Demikian pandangan ulama terhadap Imam al-Syafi'i, baik yang berupa penghargaan, kritikan maupun penghinaan ulama lain terhadapnya. Penghinaan terhadap Imam al-Syafi'i merupakan *ibrat* bagi kita, agar mampu memahami dan mendalaminya secara mendalam bahwa demi suatu kepentingan yang tidak jelas dari seseorang atau suatu kelompok mengakibatkan seseorang atau kelompok itu menjelek-jelekkan kelompok lainnya; mengingat saat ini kita masih menyaksikan relasi antara satu kelompok dengan kelompok lain yang selalu ditandai dengan ketegangan-ketegangan.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 395

BAB III

HAK ISTRI TERHADAP MAHAR DAN MUT'AH DALAM PERNIKAHAN

MENURUT SYARI'AT ISLAM

Kata *Syari'at* berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang harus diikuti. *Syari'at* bukan hanya jalan untuk mencapai keridhaan Allah, melainkan juga jalan yang dipercayai seluruh umat Islam sebagai jalan petunjuk Allah Swt. melalui utusan-Nya, Rasulullah Muhammad Saw. Di dalam Islam diyakini bahwa hanya Allah saja Yang Maha Kuasa dan Allah semata yang diyakini berhak menetapkan *syari'at* sebagai jalan dan petunjuk kehidupan bagi umat manusia. Dengan demikian, hanya *Syari'at* sajalah yang membebaskan manusia dari perhambaan manusia kepada selain Allah.

Syari'at dalam perspektif Islam juga merupakan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. *Syari'at* dalam pengertian ini adalah wahyu, baik dalam pengertian *al-wahy al-mathluww* (al-Qur'an) maupun dalam pengertian *al-wahy ghair al-mathluww* (Sunnah).¹ Faziur Rahman memberikan definisi *Syari'at* secara harfiah dengan "jalan menuju sumber air". Dalam kaitannya dengan lafal keagamaan, *syari'at* berarti jalan besar kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara kongkrit dan berfungsi untuk mengarahkan kehidupan manusia.² Manna' Khalil al-Qathan mendefinisikan *Syari'at* dengan "Segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalat maupun tatanan kehidupan yang lainnya dengan segala cabangnya yang bermacam-macam, guna merealisasikan

¹Muhammad Salam Madkur, *al-Fikh al-Islamiy*, (Makakah: Maktabah Adullah Wahbah, 1955), hlm. 11. Lihat juga, Musthafa Sayyid al-Khinn, *Dirasah at-Tarikhiyah li al-Fiqh wa Ushulih wa al-Ittijahat al-lati zhaharat fihi*, (Damaskus: tp., 1984), hlm. 26

²Fazlur Rahman, *Islam*, (University of Chicago Press, 1979), hlm. 100

kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.³ Dalam istilah Satria Effendi M. Zein, *syari'at* adalah *al-Nushush al-Muqaddasah* (nash-nash yang suci) dalam al-Qur'an dan *al-sunnah al-Mutawatirah* (hadits yang mutawatir).⁴

Syari'at menurut konteks terakhir di atas adalah ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh daya nalar manusia, *syari'at* adalah wahyu Allah secara murni, karena ia bersifat mutlak, tetap, kekal, tidak bisa dan tidak boleh diubah. Dengan argumentasi ini, maka *syari'at* merupakan sumber fikih⁵, karena fikih merupakan pemahaman yang mendalam terhadap *al-Nushush al-Muqaddasah* tersebut di atas. Dikalangan para ulama terdapat perbedaan mengenai makna fikih secara harfiah, al-Ghazali dan al-Amidi berpendapat bahwa lafal "fikih" berarti pengetahuan tentang sesuatu dan pemahaman terhadapnya, tidak membedakan yang dipahami itu dilakukan secara mendalam atau lahiriah, demikian juga tidak membedakan hasil pemahamannya itu dengan maksud dari pembicara (*mutakallimun*) atau tidak.⁶ Pendapat ini berbeda dengan dengan Fakhr al-Din al-Razi yang mengatakan bahwa lafal "fikih" mempunyai arti khusus pemahaman yang sesuai dengan maksud perkataan pembicara.⁷ Pendapat lain dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syairazi yang dikutip oleh Jalal al-Din Abd al-Rahman, yang mengatakan pengertian

³Manna' Khalil al-Qathan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1986), hlm. 10

⁴Satria Effendi M. Zein, *Mazhab-mazhab Fiqh Sebagai Alternatif*, dalam Ibrahim Hosen, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990), hlm. 312

⁵Fikih secara harfiah sinonim dengan "فهم" yang berarti pemahaman dan pengetahuan sesuatu. Lihat, Fathi al-Daraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazhahib*, (Damaskus: Mathba'atu Thursin, 1980), hlm. 1

⁶Abu Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Musthasfa min 'Ilmi al-Ushul*, Juz I, (t.tp.: Dar Fikr, t.th.), hlm. 4-5. Lihat juga, al-Amidi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz I, (Kairo: Muhammad Ali Syubaih wa auladuhu, 1968), hlm. 4

⁷Fakhr al-Din al-Razi, *al-Mahshul fi Ilmi al-Ushul*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), hlm.9

“fikih” digunakan untuk pemahaman terhadap sesuatu yang dilakukan secara mendalam, baik sesuai dengan maksud pembicara atau tidak.⁸

Adapun al-Syatibi (W. 790 H/1388 M) dalam muqaddimah kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at* memberikan pengertian Syari'at dengan “batas-batas yang ditentukan untuk membatasi perbuatan, ucapan dan kepercayaan bagi mukallaf.”⁹ Sementara yang disebut dengan fikih, sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun (W. 808 H) dalam *Muqaddimah*nya adalah “Pengetahuan tentang hukum-hukum Allah mengenai perbuatan mukallaf sebagai wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah”. Hukum-hukum ini diambil dari al-Qur'an dan al-Sunnah serta dalil-dalil lain yang ditetapkan oleh pembuat hukum (Syari') untuk mengetahuinya. Hukum-hukum dikeluarkan dari dalil-dalil itu, itulah yang dinamakan fikih.¹⁰

Pemakaian istilah *Syari'at* dan fikih pada awal-awal Islam belum menunjukkan perbedaan. Artinya, keduanya masih digunakan untuk arti yang mencakup bidang agama. Yang berbeda adalah masalah *Syari'at* digunakan untuk memberi pengertian “jalan ajaran agama yang ditetapkan oleh Tuhan”, sedangkan fikih adalah “pemahaman terhadap ajaran agama tersebut yang dilakukan oleh manusia”.¹¹ Pada perkembangan selanjutnya dengan meluasnya studi keislaman, *syari'at* dan fikih mulai dibedakan secara terminologi sebagaimana yang dikemukakan di atas, khususnya untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* atas perbuatan seorang mukallaf.

⁸Jalal al-Din Abd al-Rahman, *Ghayatu al-Wushul ila Daqaiqa Ilmi al-Ushul*, Juz I, (Kairo: Mathba'ah al-Sa'diyah, 1979), hlm. 21

⁹Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th.), hlm. 88

¹⁰Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Kairo: Dar al-Fikri, t.th.), hlm. 353

¹¹Fazlur Rahman, *Islam...*, hlm. 101

Menurut Juhaya S. Praja,¹² terdapat dua dimensi dalam memahami hukum Islam. *Pertama* hukum Islam berdimensi *ilahiyah*, karena ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Mahasempurna dan Mahabener. Dalam dimensi ini hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci dan sakralitasnya selalu dijaga. Dalam dataran ini hukum Islam dipahami sebagai syari'at yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi, tetapi juga mencakup bidang keyakinan, amaliyah dan akhlak. *Kedua* hukum Islam berdimensi *insaniyah*. Pada dimensi ini hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, baik pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqasid*.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat dibedakan antara pengertian *Syari'at* dan fikih sebagai berikut: *Pertama*, perbedaan dari ruang lingkup cakupannya, *syari'at* mencakup seluruh ajaran Islam meliputi aqidah, akhlak dan hukum bagi perbuatan mukallaf atau sepadan dengan *ad-Din* menurut Fazlu Rahman¹³ atau sama dengan *millah* menurut Yusuf Musa.¹⁴ Sedangkan fikih hanya mencakup hukum praktis bagi perbuatan mukallaf. *Kedua*, subyek syari'ah adalah pembuat *Syari'at* (*Syari'*), yaitu Allah dan rasul-Nya. Fikih subyeknya manusia atau fuqaha. *Ketiga*, sumber syari'at adalah nash-nash *Muqaddasah* langsung al-Qur'an dan al-Sunnah. Fikih sumbernya adalah penalaran manusia yang memahami terhadap nas-nas yang *Muqaddasah* tersebut.

Konsekuensi dari perbedaan tersebut, maka *syari'at* akan mempunyai sifat yang tetap, sempurna, mutlak kebenarannya dan berlaku secara universal untuk semua

¹²Juhaya S. Praja, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. vii

¹³Falur Rahman, *Islam...*, hlm. 102

¹⁴Muhammad Yusuf Musa, *al-Mudkhal lid Dirasah al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1961), hlm. 10

manusia. Sedangkan fikih akan bersifat berkembang, tidak sempurna, kebenarannya relatif dan terikat oleh ruang dan waktu.

Selanjutnya, *syari'at* bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam lingkungannya. Proses turunnya Wahyu berkenaan dengan berbagai ayat hukum di dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa Wahyu itu turun ketika timbul masalah kemasyarakatan, masalah moral atau keagamaan yang perlu segera mendapatkan pemecahannya, atau ketika para sahabat mengadukan berbagai persoalan penting yang mempunyai pengaruh yang luas dalam kehidupan kaum muslimin.¹⁵

Para *fuqaha* telah menghitung berbagai macam ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an. Menurut Jalal al-Din Al-Suyuti jumlah ayat al-Qur'an adalah sekitar 6616 ayat.¹⁶ Sedangkan menurut Abdul wahhab Khallaf, ayat-ayat hukum dalam bidang *mu'amalat* berkisar antara 230 samapai 250 ayat saja.¹⁷ Sejumlah ayat-ayat ini berkenaan dengan masalah-masalah perkawinan-poligami, mahar, pemeliharaan hubungan keluarga, hak dan kewajiban suami-istri, perceraian dan rujuk, masa menunggu (*'iddah*), perawatan anak dan lain-lain.'

A. Ruang Lingkup Pengertian Pernikahan dan Thalak Dalam Islam

1. Hakekat Pernikahan Dalam Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* () dan *zawaj* (), yang menurut bahasa artinya bersetubuh (*watha'*) dan

¹⁵A. Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap Hukum-hukum Allah, Syari'ah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hlm. 11

¹⁶Jalal al-Din Al-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Juz I, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 69

¹⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), hlm. 22-23

akad.¹⁸ Asal kata perkawinan atau pernikahan adalah berasal dari kosa kata - ينكح -

yang mempunyai arti:

- a. Semakna dengan kata - يزوج - تزويجا artinya menikah.¹⁹
- b. Semakna dengan kata - يضم - artinya mengumpulkan.
- c. Atau semakna dengan (campur) atau (perjanjian perkawinan).²⁰
- d. Mempunyai dua dimensi makna, *pertama*, makna sesungguhnya adalah berarti menghimpit, menindih dan atau bercampur. *Kedua*, arti kiasan adalah (campur) atau mengadakan perjanjian perkawinan.²¹

Dalam al-Qur'an dan hadits terdapat istilah "nikah" dan "tazwij", demikian pula dalam kitab-kitab fikih. Kedua istilah – nikah dan kawin itu dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat dengan pengertiannya yang sama.²² Sedangkan dalam pengertian lain, nikah ialah bergabung dan berkumpul; dipergunakan juga dengan arti *watha'* atau akad nikah, tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk akad nikah.²³

¹⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 114. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 35. Dari perbedaan pendapat ulama fikih tentang pengertian nikah secara bahasa menimbulkan implikasi terhadap *watha'* zina. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah *watha'* zina menyebabkan terjadinya hubungan mushaharah, karena menurut mereka nikah berarti *watha'*. Berbeda dengan Syafiiyah *watha'* zina tidak menyebabkan terjadinya mahram mushaharah, sebab bagi mereka nikah adalah *akad*. Lihat Ibnu al-Qadamah, *al-Mughniy*, Jilid VII, (Maktabah ar-Riyadh al-Hadisah, t.th.), hlm. 181. Lihat juga Ibn Rusyd al-Maliki al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 26

¹⁹ Luwis Ma'luf, *al-Mundzid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 836

²⁰ Ibn Manzur, *lisan al-'Arab*, Juz II, (Beirut: Dar Shadir, 1990), hlm. 625-626. Lihat juga, Mujaddid Muhammad Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Kamus al-Muhith*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 314

²¹ Ali Maqri al-Fayumi, *al-Misbahu al-Munir*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriah, t.th.), hlm. 295-296

²² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 453

²³ Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Sharbaini, *Mughni'l-Muhtaj*, Jilid III, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladuh, 1957), hlm. 123. Al-Tha'labi mengatakan, bahwa ibn al-Qatta telah berkata: "Kata nikah mempunyai seribu empat puluh nama, apabila sesuatu mempunyai banyak nama berarti yang dinamai itu penting dan mulia". Lihat Muhammad bin Isma'il al-Ammir al-Yamani, *Subul al-Salam*, Jilid III, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladuh, 1950), hlm. 109

Untuk memastikan mana di antara makna-makna nikah itu yang dimaksudkan dalam suatu kalimat haruslah diperhatikan dengan teliti susunan kata-kata dalam kalimat yang bersangkutan dan hubungannya dengan kalimat yang sebelum dan sesudahnya.²⁴

Pengertian nikah menurut syara' ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafal "nikah" atau "tazwij" atau terjemahnya.²⁵ Selanjutnya, sebagaimana yang dikutip oleh Poenah Daly bahwa dalam kalangan fuqaha terdapat banyak takrif nikah, tetapi pengertiannya sama, hanya redaksinya yang berbeda, seperti halnya tasawwuf mempunyai banyak takrifnya juga.²⁶ Beberapa definisi pernikahan secara terminologi yang dikemukakan ulama fikih sebagai berikut:

- a. Ulama Madzhab Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan dengan *akad* atau perjanjian yang mengandung ketentuan kehalalan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan wanita dengan lafadz *nikah* atau *tazwij*, atau yang semakna dengannya.²⁷

²⁴Abi Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, Jilid II, (Mesir: Mustafa al-Babi al-halabi wa awladuh, 1948), hlm. 31

²⁵*Ibid.*, hlm. 30

²⁶Poenah Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 53

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 18. Golongan ulama Syafi'i ini, merujuk pada pendapat Imam al-Syafi'i yang berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapat berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri. Lebih lanjut lihat Abu Syari' Muhammad 'Abd al-Hadi, *Jawaz al-Mut'ah*, (Kairo: Dar al-Dhahbiyah, t.th.), hlm. 9. Lihat juga Jalal al-Dien al-Mahalliy, *Sharh Minhaj al-Thalibin*, Jilid III (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Kubra, t.th.), hlm. 206

- b. Ulama Hanafiyah mengemukakan definisi senada, nikah adalah *akad* yang menyebabkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'.²⁸
- c. Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebut sebelumnya (QS. Al-Baqarah: 230 dan QS. An-Nisa: 22).²⁹

Beberapa definisi di atas tampaknya hanya melihat hakikat utama dari suatu perkawinan saja, yaitu kehalalan melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal ini yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti dalam sebuah definisi tentang nikah tidak hanya kehalalan hubungan seksual, tetapi juga segi tujuan dan akibat hukumnya. Dalam pandangan Islam bukanlah halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan yang tertinggi. Tetapi bertujuan juga untuk mendapat keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi³⁰ di samping supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tenteram lahir dan batin³¹ atas dasar saling cinta mencintai dalam satu rumah tangga bahagia.

²⁸*Ibid.*, Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Lihat Ibnu al-Hunnam, *sharh Fath al-Qadir*, Jilid III (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970), hlm. 185

²⁹Ibnu al-Qudamah, *al-Mughniy*, Jilid VII, (Kairo: Mathba'ah al-Kahirah, 1969), hlm. 3

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 18

³¹Muhammad Sulamah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Mesir: Maktabah Sayyid 'Abdullah Wahbah, t.th.), hlm. 3

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian pernikahan yang representatif yang dapat menggambarkan tujuan utama tersebut di atas, ia mengatakan bahwa “pernikahan ialah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita, saling membantu, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi”.³² Adapun yang menentukan hak dan kewajiban suami istri adalah agama.

Sehubungan dengan tujuan pernikahan itu, al-Sarkhasiy mengatakan bahwa tujuan nikah dalam Islam bukanlah untuk melampiaskan hawa nafsu semata-mata tetapi merupakan jenjang untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup yang diridloi Allah. Allah ta'ala telah membuka jalan pula untuk menyalurkan hasrat syahwat dalam perkawinan supaya dilaksanakan oleh semua orang, baik oleh yang taat maupun yang tidak taat. Mereka yang taat akan dapat memetik berbagai pelajaran dan hikmah terutama yang menyangkut agama, sedangkan bagi mereka yang tidak taat dapat menyalurkan nafsu syahwatnya dengan jalan yang sah.³³

Di samping pernikahan itu merupakan suatu ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Oleh karena itu, ia harus diperlakukan dengan baik oleh suami. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang berasal dari ‘Abdillah bin ‘Amr:

خَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِنِسَائِكُمْ

*Sebaik-baiknya kau (suami) adalah yang berlaku baik kepada istrinya.*³⁴

³²Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyah*, hlm. 19

³³*Ibid*, hlm. 18. Lihat juga, Syamsuddin al-Sarkhasiy, *al-Mabsuth*, Jilid II, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 192

³⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 620

Menurut syari'at Islam, selain pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan Malik bin Anas, berpendapat bahwa pernikahan itu pada awalnya dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan. Terutama bagi beberapa pribadi tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban.³⁵ Walaupun demikian, Imam al-Syafi'i memandang bahwa menikah itu mubah³⁶ atau diperbolehkan, kemudian berubah menjadi wajib atau sunat dan sebagainya tergantung pada keadaan seseorang³⁷. Yang keluar dari pertimbangan perintah al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. adalah perkawinan itu diwajibkan bagi seorang laki-laki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar, memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, sehat jasmani dan khawatir jika tidak menikah akan menimbulkan perbuatan zina justru tidak memiliki keinginan menikah.

Pernikahan juga diwajibkan bagi seorang wanita yang tidak memiliki kekayaan apa pun untuk membiayai hidupnya dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskannya ke dalam perzinaan. Pada dasarnya nikah itu sifatnya *mandubah* (sunnah) bagi orang yang mempunyai dorongan seksual yang kuat. Untuk memenuhi syahwatnya itu adalah melalui perkawinan karena dengan perkawinan tidak akan terjadi penyimpangan seksual. Sebaliknya, berkeinginan untuk menikah itu tidak akan menjauhkannya dari mengabdikan kepada Allah Swt.

³⁵Ibn Juzay, *Qawwanin al-Ahkam al-Syariah*, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 217

³⁶Abu Zahrah, *Ahwal Sakhsyiyah*, hlm. 24

³⁷Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 7

Kendatipun demikian, menurut mazhab Maliki, menikah itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mampu memperoleh nafkah, berdasarkan persyaratan di bawah ini:³⁸

1. Apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina.
2. Apabila tidak mampu, berpuasalah untuk mengendalikan hawa nafsunya, atau dia dapat berpuasa tetapi puasanya itu tetap belum mampu menolongnya menahan diri dari gejala nafsu syahwatnya.
3. Dia tidak dapat menemukan budak wanita yang diperbolehkan baginya untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Beberapa ulama tidak sepakat dengan pandangan yang diajukan oleh madzhab Maliki di atas. Mereka mengingatkan bahwa apabila seseorang tidak mampu memperoleh nafkah hidup yang halal, orang tersebut tidak boleh menikah. Apabila tetap menikah tanpa harapan untuk memperoleh makanan yang halal, niscaya orang tersebut akan melakukan tindakan pencurian atau perbuatan lain yang semacam itu. Dengan cara demikian, untuk menghindari satu tindakan justru dia akan menjadi korban dengan melakukan kejahatan yang lain.³⁹

Sedangkan Madzhab Hanafi menganggap menikah itu wajib berdasarkan empat persyaratan:

1. Apabila seorang laki-laki yakin akan berbuat zina jika tidak menikah.
2. Apabila dia tidak mampu berpuasa atau dia dapat berpuasa namun tetap tidak membantunya mengendalikan gejala nafsu syahwatnya. Akan tetapi, apabila

³⁸*ibid.*, hlm. 4

³⁹*ibid.*, hlm. 5

puasanya dapat membantunya, hendaknya menikah dengan wanita untuk digaulinya sebagai suami istri yang sah.

3. Apabila seorang lelaki tidak mendapatkan budak wanita yang sah digaulinya.
4. Apabila seorang lelaki mampu membayar mahar dan mampu memperoleh nafkah kehidupan yang halal. Apabila lelaki ini tidak mampu mendapatkan biaya hidupnya dengan halal, tidak wajib baginya menikah.⁴⁰

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa institusi pernikahan adalah suatu wadah yang melegitimasi bolehnya dua jenis manusia yang berlainan jenis dan dari keturunan yang berbeda untuk hidup bersama secara sah, membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis, adanya perimbangan hak dan kewajiban secara adil. Adanya pembagian peran dan fungsi dalam komposisi keluarga, pembagian kewajiban dan hak yang disesuaikan dengan tugas yang diemban masing-masing. Fungsi dan peran satu sama lainnya menempatkan masing-masing pihak pada posisi yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan, inilah jalinan peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga yang pada intinya mendukung dan melestarikan kelangsungan institusi perkawinan yang telah mereka bangun bersama.

Dalam Islam terdapat bentuk-bentuk pernikahan, yaitu:

a. Nikah *Mut'ah*

Nikah ini merupakan suatu bentuk nikah yang dibatasi atau ditentukan jarak masa perkawinan itu, seperti perkataan seorang lelaki kepada seorang wanita, "Aku menikahimu selama satu hari atau satu bulan". Mayoritas *fuqaha* berpendapat batal dan tidak sahnya

⁴⁰*Ibid.*,

nikah *mut'ah*.⁴¹ Tidak ada yang berbeda pendapat tersebut kecuali Syiah Imamiyah yang masih masih memperbolehkannya.

b. Nikah *Syighar*

Nikah *Syighar* yaitu suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan cara menikahi seorang wanita dengan syarat ada wanita (anak) dari anak laki-laki tersebut yang mau menikah dengan seorang laki-laki yang ditentukan tanpa mahar diantara mereka. Atau pernikahan ini sering disebut dengan nikah tukar-menukar anak wanita tanpa mahar. Menurut Imam al-Syafi'i, nikah shighar ini tidak sah dan harus dibatalkan.⁴²

c. Nikah *Muhallil*

Nikah *muhallil* yaitu menikahi seorang wanita dengan syarat untuk menghalalkan wanita tersebut kepada suaminya yang telah menceraikannya. Atau seseorang yang berniat menghalalkan wanita tanpa ada syarat di dalam nikah tersebut.⁴³ Atau sebuah kesepakatan yang telah dijamin oleh kedua belah pihak sebelum mengadakan akad nikah bahwa mereka tidak mengajukan syarat apapun. Nikah jenis ini haram dan tidak sah karena di dalam kejadian ini ada terlibat nikah *mut'ah*, sedangkan nikah *mut'ah* itu haram dan tidak sah.

⁴¹Imam al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 117. Lihat juga Muhiddin al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab lil Syiraji*, Juz. XVI, (Jedah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), hlm. 327. Lihat juga Abi al-Hasan Ali ibn Abdu al-Salam al-Tasuli, *al-Bahjatu fi Syarh al-Tuhfah*, Juz. I, (Berut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hlm. 483

⁴²Imam al-Syafi'i, *al-Umm*..., hlm. 114. Lihat juga Abi Ishak al-Syiraji, *al-Muhadzab fi Fikh al-Imam al-Syafi'i*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Islamiyah, 1996), hlm. 46. Lihat juga Muhiddin al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh*..., hlm. 245

⁴³Abi Sa'id al-Baraji'i, *al-Tahjib fi Ikhtishar al-Mudawwanah*, Juz. I, (Dubai: Dar al-Buhus li al-Dirasyah al-Islamiyah, 1999), hlm. 345. Lihat juga Syihabuddin Ahmad ibn Idris al-Kurafi, *al-Dzakyarah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), hlm. 332

d. Nikah *Tafwidh*

Nikah *tafwidh* adalah seorang ayah menikahkan anak wanitanya secara paksa tanpa ada mahar atau seorang wanita mengizinkan walinya untuk menikahkannya tanpa mahar.⁴⁴ Adapun menurut mazhab Hambali, nikah *tafwidh* ada dua macam, yaitu: *tafwidh bid'i* dan *tafwidh mahr*.⁴⁵ Menurut ijma' fuqaha bahwa nikah semacam ini adalah dibolehkan.⁴⁶

Para ulama fukhaha sepakat bahwa akad nikah tanpa menyebutkan mahar atau tanpa mahar, akad tersebut adalah sah. Kecuali Imam Malik yang menganggap bahwa nikah tanpa mahar adalah tidak sah.⁴⁷

Adapun yang menjadi dalil nikah *tafwidh* adalah firman Allah Swt.:



Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikari". (Q.S. al-Baqarah (2): 236)⁴⁸

2. Ruang Lingkup Pengertian Thalak

⁴⁴Imam al-Syafi'i, *al-Umm* ..., hlm. 101. Lihat juga Abi Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bashari, *al-Hawi al-Kabir*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 472

⁴⁵Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, Jilid IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 6778-6780

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 6762

⁴⁷Abi Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-'Imrani al-Syafi'i al-Yamani, *al-Bayan fi mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), hlm. 375

⁴⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hlm. 48

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggung jawaban syari'atnya. Islam juga mengatur hubungan lain jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan dua tubuh, dua jiwa, dua hati dan dua ruh. Dalam bahasa yang umum, pertemuan dua insan yang diikat dengan kehidupan bersama, cita-cita bersama, penderitaan bersama dan masa depan bersama untuk menggapai keturunan yang tinggi dan menyongsong generasi baru. Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh dua orangtua secara bersama yang tidak dapat dipisahkan.⁴⁹

Yang pokok dalam hubungan keluarga itu adalah ketenangan, ketenteraman dan kontinuitas. Islam mengatur hubungan ini dengan segala perlindungannya yang menjamin ketenteraman dan kontinuitas tersebut sehingga mencapai tingkatan taat yang tinggi. Islam mewajibkan adab yang melarang pamer perhiasan dan fitnah, agar hati menjadi tenang dan tidak tergoyahkan oleh fitnah dan perhiasan di pasar-pasar. Islam juga mewajibkan hukuman bagi yang berzina dan penuduh zina. Islam menjadikan rumah sebagai tempat kehormatan dengan meminta izin antara penghuninya. Islam mengatur hubungan antara suami-istri dengan syari'at dan menegakkan peraturan rumah tangga atas kepemimpinan salah satunya, yakni suami. Karena ialah yang lebih mampu memimpin, mampu melerai pertikaian dan seterusnya. Peraturan dan tata tertib rumah tangga inilah yang dapat memelihara dari segala keguncangan didasarkan pada bimbingan kasih sayang dan takwa kepada Allah.

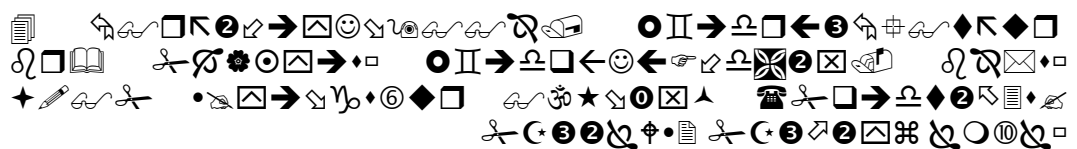
Ada saat-saat dalam kehidupan manusia ketika tidak mungkin baginya melanjutkan hubungan yang baik dengan istrinya dan begitu pun sebaliknya. Sudah merupakan bagian dari sifat manusia bahwa sekalipun dia sudah menggapai segenap

⁴⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhad Sayyed Hawwas *al-Ushrah wa ahkamuha fi al-Tasyri' al-Islami, Fikih Munakahat*, Penej. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.251

prestasi dan meningkat derajat keilmuannya. Kelemahannya sebagai manusia biasa tetap menonjol.

Ketika perkawinan tak mungkin dipertahankan, berpisah dengan cara yang baik adalah jalan keluarnya daripada terseret berkepanjangan dalam persoalan keluarga yang pelik, membuat rumah tangga dan keluarga bagaikan neraka. Dalam kondisi seperti ini, yang paling menjadi korban adalah anak-anak dari keluarga yang pecah itu. Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan, dan ikatan itu harus diupayakan terjalin utuh. Tidak demikian apabila secara manusiawi ikatan perkawinan dalam keluarga menjadi mustahil untuk dipertahankan. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dipertahankan itu sajalah perceraian diizinkan dalam Islam.

Islam tidak segera mendamaikan hubungan rumah tangga dengan cara dipisahkan pada awal bencana (pertikaian) terjadi. Islam justru berusaha dengan seoptimal mungkin memperkuat hubungan ini, tidak membiarkannya begitu saja tanpa ada usaha. Islam membisikkan kepada kaum laki-laki, sebagaimana firman Allah Swt.:



Artinya :*"Dan hendaklah pergauli mereka dengan cara yang baik. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".*⁵⁰

(Q. S. An-Nisa (4): 19)

Islam mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan sabar sampai keadaan yang tidak baik itu mendapat jalan keluar. Jika jalan penengah tidak didapatkan hasil,

⁵⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 104

permasalahannya menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak ada ketenangan dan ketenteraman dan mempertahankan rumah tangga seperti sia-sia, mengakhiri kehidupan rumah tangga melalui thalak dibolehkan. Thalak secara harfiah berarti membebaskan ikatan seekor binatang⁵¹, istilah ini dipergunakan Syari'ah untuk menunjukkan cara yang sah mengakhiri suatu perkawinan.⁵² Meskipun Islam memperkenankan thalak (perceraian) jikalau terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, hak cerai itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat memaksa. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِّ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Swt. adalah thalak".⁵³

Kata-kata thalak atau cerai itu harus selalu dijaga ketat, tidak diucapkan dengan tergesa-gesa penuh emosi dan tidak menggunakan hak menceraikan ini sewenang-wenang. Seyogyanya ia digunakan dalam keadaan terpaksa dimana kedua belah pihak tidak dapat lagi untuk meneruskan kelanjutan rumah tangganya dan dengan thalak ini akan terhindar dari bahaya yang lebih besar.

Syari'ah Islam bertujuan membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera melalui pernikahan. Jika karena beberapa alasan tujuan ini gagal, tidak perlu lagi memperpanjang harapan hampa tersebut sebagaimana yang diperaktekkan dan diajarkan oleh beberapa agama lain bahwa perceraian itu tidak dibolehkan. Islam lebih menganjurkan perdamaian di antara kedua suami istri daripada memutuskan pernikahan mereka. Namun jika hubungan baik pasangan suami istri itu tak mungkin terus dilangsungkan, Islam pun tidak

⁵¹Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib*, hlm. 278

⁵²Ibnu Qudamah, *Al-Mughni wa Sharh al-Kabir*, Juz. VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 234

⁵³Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajstani, *Sunan Abi Daud*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 226. Lihat juga Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 633

membelenggu dengan suatu rantai yang tidak baik, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan. Dibolehkannya perceraian dalam hal seperti ini, agar kedua belah pihak suami istri dapat tetap eksis menjalani kehidupan masing-masing sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an.

Begitu di antara kedua suami istri itu timbul perbedaan yang patal yang akan membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut serta mendamaikan mereka. Dalam hal ini al-Qur'an mengatakan:

[illegible]

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Maha Berilmu dan Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Nisa (4): 35)⁵⁴

Bila para penengah⁵⁵ gagal mendamaikan suami-istri itu, barulah al-Qur'an memperkenalkan pasangan tersebut untuk bercerai. Al-Qur'an menjelaskan:

II&)(☞ ☐☐→📄 ✦✍️✂️ 🏠II↔↕↗③ 🎧💡▪️**2**☒🖨️♦️♣️③ െ൬①♦️☐
 🎧⌚➡️👤⌚♦️☐ ✦✍️✂️ ♦️🔔☒👉♦️☐ 📄 ⌚ℳ○ℳ👈☒➡️☒ℳ
 🎧✙⊕Ⓜ️👤☒○

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Al-Nisa (4): 130)⁵⁶

⁵⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 109

⁵⁵Untuk memahami peranan para arbitrator secara mendetail, lihat Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Shakhsiiyyah*....., hlm. 277-278

⁵⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 130

Seandainya tahap perceraian ini telah terjadi, al-Qur'an memerintahkan para suami agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dan meninggalkan istrinya terkandung-kandung tak menentu, tetapi lebih menekankan agar menyelesaikan masalah tersebut dengan salah satu cara:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ بِطَرَفِي الدِّينِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ وَفَّيْنَا لَكُمْ فِيهِمْ مَا بَدَأْنَاهُمْ بِهِ قُلُوبُهُمْ وَأَلْفَاظُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَوْمُ الَّ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkandung-kandung, dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al-Nisa (4): 129)⁵⁷

Untuk mengakhiri semua ketidak pastian itu, al-Qur'an telah membentangkan petunjuk di bawah ini :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فِي شَهْوَاهِهِمْ وَأَعْيُنِهِمْ فَذُكِّرُوا كَثِيرًا لَّعَلَّهُمْ يُفْهِمُونَ ۚ

Artinya: "Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya⁵⁸ diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al-Baqarah (2): 226)⁵⁹

Berdasarkan perintah al-Qur'an dan bimbingan dari Sunnah Nabi SAW. di atas, para ulama empat mazhab telah memberikan penjelasan tentang thalak (perceraian) ini.

Dalam kitab *Syarah al-Kabir*, disebutkan ada lima kategori perceraian, sebagai berikut:

- a. Perceraian menjadi *Wajib* dalam kasus *Syiqaq*.

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

⁵⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 44

- b. Perceraian *Makruh* bila masih dapat dicegah. Jika diperkirakan tak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya. Berdasarkan hadis: “Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian.
- c. Perceraian menjadi *Mubah* bila memang diperlukan, terutama bila istri berakhlak buruk (*su’ul khuluq al-Mar’ah*), dan dengan demikian kemungkinan yang akan membahayakan perkawinan tersebut.
- d. Perceraian hukumnya *Mandub* jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau ia berbuat serong.
- e. Bersifat *Mahzur* bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat menstruasi bulannya datang.

Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*⁶⁰ keempat kategori perceraian itu diperbolehkan, tetapi kategori yang kelima haram dan tidak sah (*Thalak al-Bid’i*). Imam al-Nawawi hanya menyebutkan empat macam hukum perceraian, yaitu haram, makruh, wajib dan mandub, sebagaimana yang disebutkan dalam “Sharahnya” atas kitab *Shahih al-Muslim*⁶¹ Menurutny, tidak ada perceraian yang disebut *Mubah*. Ulama Maliki, al-Dardiri, juga sepakat dengan pendapat ini dalam kitab *al-Mukhtasar* dalam tafsirnya yang terkenal atas karya Khalil.⁶²

Dalam Islam juga terdapat bentuk-bentuk thalak, yaitu:

⁶⁰Syeikh Syamsuddin Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 307

⁶¹Al-Nawawi al-Syafi’i, *Sharh Shahih Muslim*, Juz. X, (Mesir: t.p., t.th.), hlm. 61

⁶²Abu Al-Barkat Ad-Dardir, *al-Sharh Ash-Shaghir ‘Ala Aghrabi Al-Masalik lid-Dardir*, Juz II, (Mesir: Dar al-Ma’arif, t.th.), hlm. 423

a. Thalak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan thalak⁶³:

1. Thalak Sunni, yaitu thalak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah.

Dikatakan sebagai thalak sunni jika memenuhi 3 syarat berikut:

- a). Istri yang dithalak sudah pernah dikumpuli. Bila thalak dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk thalak sunni.
- b). Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah dithalak, yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.
- c). Thalak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpulinya.

2. Thalak Bid'i, yaitu thalak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, dengan demikian berarti tidak memenuhi persyaratan thalak sunni di atas. Thalak *bid'i* antara lain:

- a). Thalak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid (menstruasi).
- b). Thalak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut.⁶⁴

3. Thalak *la Sunni wala Bid'i*

Thalak yang termasuk dalam kategori ini adalah thalak yang bukan sunni dan bukan pula bid'i, yaitu:

⁶³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami* ..., hlm. 6948. Lihat juga Wajarah al-Auqhaf wa al-Syuun al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Juz. 29, (Kuwait: Dar al-Shafwa, 1993), hlm. 26. Lihat juga Imam al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fikh al-Imam al-Syafi'i*, Juz. II, (Beirut: Syirkah Dar al-Arqam, 1997), hlm. 56-59

⁶⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami* ..., hlm. 6953. Lihat juga Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bashari, *al-Hawi al-Kabir fi Fikhi Mazdhab Imam al-Syafi'i r.a.*, Juz. X, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 114-115

- a).Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli.
 - b).Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri telah lepas dari masa haid (menopause).
 - c). Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.
- b. Thalak ditinjau dari segi lafaz atau kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan thalak:
- 1. Thalak *Sharih*, yaitu thalak yang apabila seorang menjatuhkan thalak kepada istrinya dengan mempergunakan kata-kata *al-Thalaq* atau *al-Firaq* atau *al-Sara*. Ketiga kata-kata ini terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang maksudnya jelas untuk menceraikan istri. Dengan menggunakan lafaz-lafaz tersebut seseorang yang menthalak istrinya, maka jatuhlah thalak tersebut walaupun tanpa niat.
 - 2. Thalak *Kinayah* atau Kiasan, yaitu thalak yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kata-kata selain kata dari lafaz *sharih* tersebut di atas. Suami menthalak istrinya dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, seperti *Anti baa-inun* (engkau telah jauh dariku) atau *ilhaqi bi ahliki* (kembalilah engkau kepada keluargamu)⁶⁵.
- c. Thalak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali pada istrinya setelah istri dithalak:
- 1. Thalak *Raj'i*⁶⁶, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya secara nyata. Ia menjatuhkan thalak bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikan oleh istrinya, dan sebelumnya belum pernah ia menjatuhkan thalak sama sekali atau baru menjatuhkan thalak sekali. Tidak ada perbedaan apakah dia menjatuhkan thalaknya menggunakan lafaz *sharih* atau *kinayah*.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami* ..., hlm. 6897-6899

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fikh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Dar al-Fath, 1998), hlm. 38-44

Jelasnya thalak *raj'i* adalah thalak yang dijatuhkan suami kepada istrinya sebagai thalak satu atau thalak dua. Apabila istri berstatus *iddah thalak raj'i*, suami boleh rujuk kepada istrinya dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian dan tanpa mahar yang baru pula. Tetapi bila *iddah*nya sudah habis, maka suami tidak boleh rujuk atau kembali kepadanya kecuali dengan akad nikah baru dan dengan membayar mahar baru pula.

2. Thalak *Ba'in*⁶⁷. Apabila istri berstatus terthalak *ba'in*, maka suami tidak boleh rujuk kepadanya. Suami boleh melaksanakan akad nikah baru kepada bekas istrinya itu dan membayar mahar baru dengan menggunakan rukun dan syarat yang baru pula.

Thalak *ba'in*⁶⁸ ada 2 macam, yaitu:

- a). Thalak *ba'in sughra*, adalah thalak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.
- b). Thalak *ba'in kubra*, adalah thalak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali jika bekas istrinya telah kawin lagi dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai suami istri secara nyata dan sah. Di samping istri tersebut telah menjalankan *iddah*nya dan *iddah*nya telah habis pula.

d. Thalak ditinjau dari cara menyampaikan thalak:

1. Thalak dengan ucapan, yaitu thalak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.

⁶⁷*Ibid.*,

⁶⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami* ..., hlm. 6955

2. Thalak dengan tulisan, yaitu thalak yang disampaikan oleh suami secara tertulis, lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri tersebut membaca serta memahami maksud dan isinya.⁶⁹
3. Thalak dengan isyarat, yaitu thalak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Para fuqaha mengatakan bahwa thalak dengan isyarat bagi orang tunawicara adalah sah apabila dia buta huruf. Tetapi jika dia bisa menulis, dia harus melaksanakan thalaknya itu dalam bentuk tulisan, karena hal ini lebih jelas dibandingkan dengan isyarat.
4. Thalak dengan utusan, yaitu thalak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan darinya untuk menyampaikan maksud menthalak istrinya tersebut.⁷⁰

B. Dasar Hukum Pernikahan dan Thalak

1. Dasar Hukum Pernikahan.

Pernikahan (selanjutnya disebut perkawinan) merupakan salah satu perbuatan hukum legal yang dilegitimasi dalam ajaran Islam. Islam menganjurkan kepada seluruh mukallaf untuk melangsungkan perjanjian (*aqad*) perkawinan sebagai wujud dari dimensi kemanusiaannya di muka bumi dan merupakan manifestasi ketaatannya kepada nilai-nilai Islam yang dibawa oleh utusan-Nya. Sebagai suatu *sunnatullah*, syari'at perkawinan disampaikan melalui beberapa pendekatan, sebagai berikut:

- a. Syari'at perkawinan telah menjadi sunnah para rasul sejak dulu dan diikuti pula oleh generasi kemudian. Firman Allah Swt.:

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 6902

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fikh al-Sunnah* ..., hlm. 22

d. Adanya perintah untuk menikah dengan perempuan yang dinilai baik. Firman Allah sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَزَوَّجْتُمْ فَاذْكُرُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّكُمْ لَعَالَمُونَ﴾
 Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang”. (Q.S, An-Nisa (4): 3)⁷⁴

Adapun nas dari hadis adalah sebagai berikut:

عن ابن مسعود عن رسول الله صلعم. قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أعظم للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء.
 (رواه الجماعة).

Artinya: “Wahai para pemuda! Bila di antara kalian telah mampu melaksanakan pernikahan, maka nikahlah, karena pernikahan dapat menjaga penglihatan dan kemaluan lebih dapat terjaga – dari perbuatan maksiat -. Barang siapa belum mampu melaksanakannya, maka hendaknya berpuasa sebagai proteksi terhadap perbuatan negatif”.⁷⁵

Dari ayat hadis di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah suatu media untuk menjaga diri dari perbuatan negatif dan merupakan patologi sosial. Nikah juga merupakan salah satu ciri khas nilai Islami yang membedakannya dengan nilai-nilai teologi Nashrani yang melanggengkan pola hidup lajang bagi kaum agamawannya.

2. Dasar Hukum Thalak (Perceraian)

Lafal thalak telah ada sejak zaman Jahiliyah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini.⁷⁶ Penduduk Jahiliyah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali. Hadist diriwayatkan dari Urwah bin Zubair ra. berkata: “Dulunya manusia menthalak istrinya tanpa batas dan bilangan”. Seseorang yang menalak istri, ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian menthalak

⁷⁴*ibid.*, hlm. 99

⁷⁵Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz III, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), hlm. 171

⁷⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhad Sayyed Hawwas *al-Usrah wa ...*, hlm. 255

lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita,⁷⁷ turunklah ayat:

﴿تَالِكٌ (يُتَالَكُ) اِلٰى اٰيَاتٍ﴾

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali*”. (Q.S. al-Baqarah (2): 229)⁷⁸

Dalam riwayat lain bahwa seorang laki-laki pada zaman Jahiliyah menalak istrinya kemudian kembali sebelum habis masa menunggu. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. mengadu bahwa suaminya menthalaknya dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Saw., lantas turunklah ayat Allah Swt. di atas.

Dasar disyariatkan thalak disampaikan melalui beberapa pendekatan, sebagai berikut:

a. Syari’at thalak yang boleh dirujuk kembali adalah dua kali. Firman Allah Swt.:

﴿تَالِكٌ (يُتَالَكُ) اِلٰى اٰيَاتٍ﴾

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang*

ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (al-Baqarah: 229)⁷⁹

b. Menginformasikan bahwa jika ingin menthalak seorang istri, hendaknya pada saat istri dapat menghadapi *iddahnya*. Firman Allah Swt.:

﴿اِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَيْهَا حَتّٰى يَخْرُجَ اِلَيْهَا مِنْ اٰيَاتِ﴾

⁷⁷Abi Hasan “Ali ibn Ahmad al-Wahdi al-Nisaburi, *Asbabu al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm.49

⁷⁸Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 45

⁷⁹*Ibid.*,

sebagai pijakan berlindung dan bersenang-senang di bawah naungan-Nya dan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.

Dari beberapa nash al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama di atas, dapat dipahami bahwa thalak hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang tidak mungkin lagi hubungan suami-istri dalam keluarga dapat dipertahankan. Dalam kalimat lain thalak itu dibenci oleh Allah bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi Saw. menamakan thalak sebagai perbuatan halal, karena dalam perkawinan mengandung kebaikan-kebaikan yang tidak boleh dirusak.

Oleh sebab itu, hubungan antara suami-istri adalah hubungan yang tersuci dan terkuat. Tidak ada dalil menunjukkan kesuciannya daripada Allah menyebutkan akad antara suami-istri sebagai janji yang berat (*mitsaq ghalizh*), firman Allah Swt.: "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat", ayat ini tertera dalam QS. An-nisa: 21.

Jika hubungan suami-istri begitu kuat, hubungan ini tidak boleh diremehkan dan direndahkan. Segala sesuatu yang melemahkan hubungan ini dibenci Islam karena luputnya manfaat dan hilangnya maslahat antara pasangan suami-istri tersebut. Siapa saja manusia yang menghendaki rusaknya hubungan antara suami-istri, dalam pandangan Islam ia keluar daripadanya dan tidak memiliki sifat kehormatan.⁸³

C. Hakekat Mahar dan Mut'ah Dalam Islam

1. Hakekat Mahar

⁸³Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhad Sayyed Hawwas *al-Ushrah wa ...*, hlm. 257

Mahar secara etimologi artinya *maskawin*. Adapun dalam istilah ahli fikih di samping perkataan *mahar* juga dipakai perkataan: “*shadaaq*,”⁸⁴ *nihlah* dan *faridhah*”. Sedangkan secara terminologi mahar ialah “Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.⁸⁵ Atau, “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya sebab adanya akad nikah,⁸⁶ baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dsb)”. Ada juga yang mendefinisikan *mahar* sebagai nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁸⁷

Penyebutan mahar atau mas kawin pada saat akad bukanlah satu rukun dan bukan pula syarat, sebab mahar adalah satu aturan yang muncul dari adanya akad. Tidak menjadi keharusan untuk menyebutkan aturan yang timbul dari adanya akad, pada saat pelaksanaannya. Dalam kitab *Al-Mughni* ditegaskan: “Pernikahan itu sah meskipun tanpa menyebutkan mas kawin atau mahar menurut pendapat para ulama”.⁸⁸ Sedangkan Ibnu Taimiyah mengemukakan pendapatnya bahwa nikah adalah sebagai satu upaya menghindari perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa mahar adalah satu rukun dalam pernikahan baik disebutkan dalam akad atau tidak disebutkan. Lebih lanjut ia berkata: “Barangsiapa berpendapat bahwa mahar bukan satu

⁸⁴Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin. Lihat Syekh Syamsuddin Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, hlm. 220. Lihat juga *Hasyiyah al-Syarqawi 'ala Sharh at-Tahrir*, Juz II,..... hlm. 251

⁸⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat* 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 105

⁸⁶Sa'di Abu Habib, *Kamus al-Fikhiyah Lughatahan wa Istilahan*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 341 Lihat Juga M. Abdul Mujieb, Cs, *Kamus istilah Fiqh*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), hlm. 184. Lihat juga Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 114

⁸⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Ala Madzahib*, hlm. 94

⁸⁸Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, hlm. 680-681

isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (Q.S. An-Nisa (4):

21)⁹³

Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, hukum memberikannya adalah wajib, bahkan beliau berpendapat tidak sah nikah tanpa mahar.⁹⁴ Hal ini senada dengan firman Allah Swt.:

◆ 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai

pemberian dengan penuh kerelaan”. (Q.S. An-Nisa (4): 4)⁹⁵

Sabda Rasulullah Saw.:

أَنْظِرْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.

Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cicin dari besi.⁹⁶

Adapun syarat mahar yang diberikan suami kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- Barangnya bukan barang *ghasab*. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena untuk

⁹³*Ibid.*, hlm. 105

⁹⁴Abi Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-‘Imrani al-Syafi’i al-Yamani, *Al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), hlm.375

⁹⁵Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 100

⁹⁶Imam Muhiddin al-Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz IX, (Beirut Dar al-Ma’rifah, 1995), hlm. 216

mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

- d. Bukan barang yang tidak jelas jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁹⁷

Mengenai besarnya mahar, syariat Islam tidak membatasinya. Oleh sebab itu para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam al-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadikan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.

Sedangkan Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham⁹⁸, pendapat lain ada yang mengatakan empat puluh dirham. Karena pada saat itu mata uangnya dinilai dengan dirham.

Pangkal silang pendapat ini menurut Ibnu Rusyd ada dua hal, yaitu:

- a. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai

⁹⁷Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib ...*, hlm. 103. Lihat juga al-Muhadzdzab, Juz 2, hlm. 265

⁹⁸Abu Al-Barkat Ahmad bin Muhammad ad-Dardir, *al-Syarh Ash-Shaghir 'ala Aqrb al-Masalik ila Madzhab al-Imam Malik*, Juz II, (t.tp.: al-Syaikh Rashid bin Sa'id al-Maktum, t.th.), hlm. 427

ibadah yang sudah ada ketentuannya. Karena ditinjau dari segi kebolehan mengadakan akad bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadkan mahar itu mirip dengan ibadah.

- b. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw., “carilah, walaupun hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang adad batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.⁹⁹ Semua pendapat ahli fikih ini sebenarnya hanya memberikan ketentuan maskawin yang sebaik-baiknya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa syariat Islam tidak membatasi kadar mahar yang diberikan suami kepada istrinya. Syari’at Islam menyerahkannya kepada masyarakat untuk menetapkan menurut adat yang berlaku di kalangan mereka dan menurut kemampuan dari pihak suami. Sebab mahar yang diberikan oleh calon suami itu sebagai imbalan dari kerelaan calon istri untuk hidup bersama sebagai suami istri. Kerelaan dan persetujuan itu dinyatakan oleh kedua belah pihak calon mempelai di dalam shighat akad nikah yang mereka ucapkan.

Adapun mahar secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, Yaitu:

- a. Mahar Yang Disebutkan (Mahar Musamma)

⁹⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 14-15

Mahar yang disebutkan maksudnya mahar yang disepakati oleh kedua pihak, baik pada saat akad maupun setelahnya seperti membatasi mahar bersama akad atau penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan mahar, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat penyebutannya benar.¹⁰⁰ Dalam definisi lain, yang dimaksud mahar musamma yaitu mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam shighat akad, atau mahar yang sempurna.¹⁰¹

Mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad kemudian diumumkan pada saat akad berbeda dengan mahar yang disepakati, baik dari segi ukuran atau jenisnya. Pada saat itu berarti seorang istri dihadapkan pada dua mahar; *Pertama*, mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad dan mahar ini yang disebut dengan mahar tersembunyi. *Kedua*, mahar terbuka yang diumumkan dalam akad di hadapan orang banyak.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar yang wajib adalah mahar yang disebutkan dalam akad, karena akad inilah mahar menjadi wajib. Yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, baik sedikit maupun banyak. Jikalau mahar tersembunyi 1.000 dan mahar yang diumumkan 2.000, kemudian mereka mengumumkan pada saat akad bahwa mahar 2.000, maka itulah mahar yang wajib. Apabila mereka mengumumkan bahwa mahar 1.000, maka mahar yang wajib bagi istri adalah 1.000.¹⁰²

Ulama Malikiyah berpendapat, jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar tersembunyi dan dalam pengumuman berbeda dengan yang pertama, yang dipedomani

¹⁰⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhad Sayyed Hawwas *al-Ushrah wa ...*, hlm. 184

¹⁰¹ Syaikh Mansur ibn Yunus al-Bahwaiti al-Hanbali, *Kasyaf al-Qina'*, Juz. V, (Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 1997), hlm. 167

¹⁰² Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Firuzabadi Al- Syirazi, *Al-Muhadzdzab li Asy-Syayrazi*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), hlm. 72. Lihat juga Syaikh Syamsuddin Muhammad Ibn Khatib al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*..., Juz. II, hlm. 228

adalah yang disepakati kedua belah pihak yang tersembunyi tersebut. Yang tersembunyi inilah yang wajib diberikan kepada istri dan yang disepakati yang disepakati dalam pengumuman tidak berlaku. Adapun Ulama Hanabilah memisahkan pada dua kondisi, yaitu:

1. Jika kedua belah pihak mengadakan akad dengan mahar yang dirahasiakan, kemudian mengadakan akad lagi secara terbuka dan diumumkan mahar yang berbeda dengan mahar pada akad pertama. Dalam kondisi ini mahar yang diambil adalah mahar yang lebih banyak dari dari keduanya dan inilah yang wajib diberikan kepada istri.
2. Jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar sebelum akad kemudian mereka mengadakan akad setelah kesepakatan tersebut yang lebih banyak dari mahar yang disepakati. Karena penyebutan yang benar pada akad yang benar pula, mahar yang disebutkan dalam akad wajib diberikan kepada istri dan tidak usah memperhatikan penyebutan yang disepakati sebelum akad seolah-olah tidak ada.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, mahar tersembunyi dan terbuka ini dibagi pada dua kondisi:

1. Jika kedua belah pihak ketika akad tidak mengatakan bahwa mahar dari mereka 1.000 karena ingin populer (*sum'ah*), mahar dalam kondisi ini adalah apa yang disebutkan secara terbuka yaitu 2.000.
2. Jika kedua belah pihak mengatakan dalam akad 1.000 dari 2.000 karena mereka yang secara tersembunyi yakni 1.000 junaih. Diriwayatkan pula dari Abu Hanifah dalam kondisi kedua di atas bahwa mahar adalah yang diumumkan mereka dalam akad, yaitu 2.000 junaih.

b. Mahar Mitsil

Maksud mahar mitsil (mahar yang sama) adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari keluarga ayahnya seperti saudara perempuan sekandung, saudara perempuan tunggal bapak dan seterusnya.¹⁰³

Menurut ulama Syafi'iyah yang dipedomani dalam mempertimbangkan mahar mitsil adalah dengan melihat beberapa wanita keluarga *ashabah* (sekandung atau dari bapak) perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Yang perlu diperhatikan terhadap wanita-wanita keluarga *ashabah* perempuan ketika mencari ukuran mahar mitsil adalah dari segi status mereka terhadap perempuan, mereka satu sifat dengannya dan yang paling dekat dengannya. Artinya, jika saudara perempuannya sekandung yang sama sifat-sifatnya menikah dengan mahar 1.000 junaih, maka mahar perempuan tersebut juga 1.000 junaih. Jika tidak didapatkan saudara sekandung atau ada, tetapi belum menikah atau telah menikah tetapi tidak diketahui maharnya, kita pindah kepada saudara perempuannya tunggal bapak. Bila tidak ada pindah ke putri saudara laki-laki sekandung, kemudian putri saudara laki-laki seapak, saudara perempuan sekandung bapak dan bibik seapak. Kemudian saudara ke bawah dari dua arah dari mereka tersebut seperti saudara perempuan sekandung ke bawah dan satu arah seperti saudara perempuan seapak, demikian pula wanita keluarga perempuan lain yang disebutkan di atas.¹⁰⁴

¹⁰³Lebih terinci Imam Abu Hanifah mendefinisikan mahar mitsil ini adalah Mahar seorang wanita yang dipersamakan dengan keluarga ayahnya ketika terjadinya akad, baik umur, kecantikan, harta, daerah, keturunan, kecerdasan, agama. Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i, mahar mitsil adalah sesuatu yang ukurannya diseimbangkan kepada adat istiadat dari mempelai wanita. Lihat Sa'di Abu Habib, *Kamus al-Fiqhiyah*, hlm. 341

¹⁰⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhad Sayyed Hawwas, *al-Ushrah wa ...*, hlm. 186

Jika tidak didapatkan wanita-wanita *ashabah* perempuan di atas dalam arti tidak ada sama sekali atau ada tetapi belum menikah atau sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya, pindah kepada wanita-wanita keluarga *arham* (keluarga ibu) dari perempuan tersebut secara tertib, yaitu, ibu, nenek, bibi, putri saudara perempuan, kemudian putri bibi. Tidaklah pindah ke satu wanita dari mereka kecuali sebelumnya dihukumi tidak ada, adakalanya karena tidak ada persamaannya dalam sifat atau ada persamaannya tetapi tidak diketahui maharnya.¹⁰⁵

Jika tidak ditemukan wanita keluarga *arham* (dari ibu) atau ada, tetapi belum menikah atau sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya, mahar wanita tersebut disamakan dengan mahar wanita-wanita lain yang sebanding dalam sifatnya. Akan tetapi, didahulukan wanita-wanita dalam negerinya kemudian negeri yang terdekat. Pertimbangan persamaan antara dua wanita yang sama dalam sifatnya adalah persamaan dalam usia, kecerdasan (IQ), kecantikan, kekayaan, kejelasan berbicara, keperawanan dan janda, karena mahar akan berbeda sebab perbedaan sifat-sifat tersebut.

Demikian juga yang harus dipertimbangkan adalah kondisi suami ketika menentukan ukuran mahar mitsil. Kondisi suami seperti kaya, berilmu, memelihara haram, dan sejenisnya. Jikalau didapatkan wanita keluarga *ashabah* istri yang sama dalam sifat-sifatnya dan kondisi suaminya juga sama, maharnya sama dengan wanita tersebut. Jika tidak sama, tidak bisa disamakan.¹⁰⁶

Pada waktu mahar mitsil ditentukan jumlahnya oleh suami istri sebaiknya disertai oleh dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 187

¹⁰⁶Lihat juga, Syaikh Syamsuddin Muhammad Ibn Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, hlm. 331-332. Lihat juga Jalal ad-Din al-Mahalli, *Hasyiyah Qulyubi wa 'Amirah*, Juz 3, hlm. 284. Juga lihat al-Muhadzdzab, Juz 2, hlm. 60. Lihat juga, Sa'di Abu Habib, *Kamus al-Fiqhiyah*, hlm. 335

2. Hakikat Mut'ah

Kata *mut'ah* dengan dhammah *mim* (*mut'ah*) atau kasrah (*mit'ah*) akar kata dari *Al-Mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab thalak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat. Sedangkan definisi lain yang senada menyebutkan bahwa *mut'ah* adalah suatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.¹⁰⁷

Islam untuk kesekian kalinya sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak lain juga kepadanya, yaitu hak *mut'ah* yang disebabkan adanya thalak dari suami kepada istri sebelum bercampur. Firman Allah Swt.:



Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Q.S. al-Baqarah (2): 236)¹⁰⁸

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa bila seorang suami menceraikan istrinya sebelum pernah mencampurinya dan belum menentukan jumlah mas kawinnya, suami berkewajiban memberi *mut'ah* kepada istrinya sebagai ganti pemberian untuk istri. Inilah yang dimaksud dengan melepas dengan baik.

¹⁰⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih al-Ushrah al-Muslimah, Fikih Keluarga*, Penej. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), hlm. 72

¹⁰⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48

Syarat wajib memberikan mut'ah kepada wanita yang diceraikan ialah dua, yaitu:

1. Percampuran dengan istrinya dan penyebutan mahar sebelum cerai.
2. Adakalanya kata *di atas* berarti kecuali, yakni kecuali kamu telah menentukan mahar kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban memberi mut'ah bagi orang yang menceraikan, jika perceraian itu terjadi sebelum adanya percampuran suami istri dalam kondisi apapun, kecuali jika ia telah menyebutkan maharnya, dalam kasus seperti ini suami wajib memberi mahar kepada istri separuh mahar yang telah ditetapkannya. Adapun jika sebelumnya ia tidak menyebutkannya, ia tidak wajib memberikan apa-apa kepada istrinya.¹⁰⁹

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman:

فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْيَكُوفِ فَلَآتُهُنَّ مَتَاعُ الْبُرْجِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَفْعَلُونَ فِي الْأَمْثَالِ الَّتِي نُنْصِفُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْطَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَجْرِمُ عَلَيْكُمْ ذُنُوبُهُمْ مَا نُنْصِفُ بَيْنَكُمْ فِيهَا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (Q.S. Al-Ahzab (33): 49)¹¹⁰

Dan firman Allah Swt. dalam ayat lain:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذَا طَلَّقُوا النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْيَكُوفِ فَلَآتُهُنَّ مَتَاعُ الْبُرْجِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَفْعَلُونَ فِي الْأَمْثَالِ الَّتِي نُنْصِفُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْطَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَجْرِمُ عَلَيْكُمْ ذُنُوبُهُمْ مَا نُنْصِفُ بَيْنَكُمْ فِيهَا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

¹⁰⁹ Abd al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari'at*, Penerjemah Usman Sya'rani, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 175

¹¹⁰ Depaertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 600

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah (2): 241)¹¹¹

Ayat-ayat di atas mengandung indikasi wajibnya memberikan *mut’ah* dari beberapa segi, yaitu:

- a. Firman Allah Swt.: *Maka berilah mereka mut’ah*, merupakan bentuk perintah. Sedangkan perintah menuntut adanya kewajiban (untuk menjalankannya) sampai adanya indikasi lain yang mengarahkan pada penegrtian sunnah.
- b. Firman Allah Swt.: *مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ*, tidak ada kata-kata yang menunjukkan pengertian wajib yang lebih kuat daripada kata *حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ*. Dan firman-Nya *وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* juga menuntut kewajiban. Karena itu Allah menjadikan *mut’ah* sebagai suatu hak bagi istri dan kewajiban bagi suami. Dan barang apa saja yang ada pada manusia, maka itu adalah miliknya, ia berhak untuk menuntutnya.¹¹²

Sabda Rasulullah Saw.:

لِكُلِّ مُطَلَّاقَةٍ مَتْعَةٌ

Bagi setiap wanita yang diceraikan (diberikan) *mut’ah*.¹¹³

Disamping itu, firman Allah , terdapat kata yang ditujukan baik kepada orang yang mampu maupun tidak mampu. Sedangkan kata ini () menunjukkan pengertian wajib. Dengan demikian, *mut’ah* itu wajib bagi orang yang tidak mampu, sebagaimana juga diwajibkan bagi orang yang mampu. Dan firman-Nya *عَلَى الْمُحْسِنِينَ* juga menuntut pengertian wajib. Karena hak, mewajibkan adanya ketetapan.

¹¹¹*Ibid*, hlm. 49

¹¹²Abd al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-hukum dari Al-Qur’an*, hlm. 177

¹¹³Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwatha’*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.366

Sementara kata menunjukkan adanya keharusan dan ketetapan. Dengan demikian mengumpulkan keduanya menuntut pengertian wajib yang lebih kuat lagi. Kewajiban tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mau berbuat baik, sebagaimana firman-Nya *حقا على المحسنين*.¹¹⁴

Adapun kadar jumlah *mut'ah* tidak boleh kurang dari 30 dirham atau yang seharga dengan itu, Buwaiti berpendapat bahwa ini adalah batas terendah, dan batas tertinggi adalah memberikan pelayan dan batas tengahnya adalah memberikan pakaian. Dan disunatkan tidak melebihi setengah dari mahar mitsil.¹¹⁵ Sedangkan kadar *mut'ah* yang wajib diberikan kepada istri menurut ulama Hanafiyah adalah berupa pakaian wanita yang lengkap. Batas tertinggi *mut'ah* menurut mereka tidak melebihi setengah mahar mitsil dan batas terendahnya tidak boleh kurang dari lima dirham.¹¹⁶

Menurut Muhammad Abduh, sebagaimana yang dikutip oleh Abd al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur bahwa thalak merupakan perbuatan rendah dan kebimbangan, yang sebenarnya suami tidak menginginkannya. Hanya saja terkadang ada yang membuatnya menceraikan istrinya,¹¹⁷ karena itu ia diharuskan untuk memberikan *mut'ah* untuk menghilangkan kerendahan tersebut, dan status *mut'ah* seperti saksi yang membersihkan istrinya. Allah Swt. menjadikan pemberian (*mut'ah*) tersebut sebagai pengobat sakit hati, agar manusia mau mentolelirnya. Oleh sebab itu, sebagian ulama fuqaha mewajibkan bagi suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istrinya yang ia ceraikan (thalak) sebelum *dukhul* dengannya. Jika suami memberikan *mut'ah* yang layak kepada istrinya, maka prasangka-prasangka buruk akan hilang dengan sendirinya.

¹¹⁴ Abd al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-hukum dari Al-Qur'an* ..., hlm. 178

¹¹⁵ Syaikh Syamsuddin Muhammad Ibn Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, hlm. 308

¹¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyah*, (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 233

¹¹⁷ Abd al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-hukum*, hlm. 178

D. Kualifikasi Hak Istri Dalam Masalah Pernikahan dan Thalakh

Dalam kamus al-Muhidh kata “hak” termasuk salah satu asma/sifat Allah.¹¹⁸ Dalam Islam pengertian hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara'. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.¹¹⁹ Sedangkan menurut Firdaweri, yang dimaksud dengan “hak” adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Berdasarkan ini dapat juga dikatakan hak itu adalah sesuatu yang harus diterima.¹²⁰

Pada dasarnya hak dapat dibedakan antara hak muthlak atau hak absolut dan hak nisbi atau hak relatif. Hak muthlak adalah hak memberikan wewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut, seperti hak asasi manusia, hak seseorang untuk hidup.

Adapun hak nisbi (hak relatif) adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak relatif sebagian besar dapat dalam hukum perikatan atau bahagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang

¹¹⁸Mujaddin Muhammad Ya'qub al-Fairuz Abadi, *Kamus al-Muhidh*, hlm. 228. Lihat juga Ahmad al-Rasyidi, *Huquq al-Insan; Dirasah Muqaranah fi al-Nazhariyah wa al-Tathbiq*, (Kairo: Maktabah al-Syuruk al-Dauliyah, 2003), hlm. 30

¹¹⁹A. Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 19

¹²⁰Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan; Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajiban*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 7. Adapun kata “hak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 292. Definisi lain kata *hak* adalah: wewenang menurut hukum. Lihat M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fikih Mu'amalat)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 3

bersangkutan. Seperti hak istri menerima mahar dari suaminya, dan dia berhak menuntut dari suaminya itu. Hak suami dan istri dalam pernikahan adalah termasuk hak relatif.

Jadi yang dimaksud hak di sini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil pernikahannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan menunaikan atau membayarkannya atau dapat juga lepas seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.¹²¹ Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Dalam al-Qur'an Allah Swt. berfirman:

وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى تَوْحِيدِهِ عَالَمٌ غَافِلٌ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى تَوْحِيدِهِ عَالَمٌ غَافِلٌ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى تَوْحِيدِهِ عَالَمٌ غَافِلٌ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى تَوْحِيدِهِ عَالَمٌ غَافِلٌ ۚ

Artinya: "Dan bagi istri ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara

ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri". (Q.S. al-Baqarah (2): 228)¹²²

Sabda Nabi Saw.:

ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا

"Sesungguhnya kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul".¹²³

Syari'at Islam lebih mementingkan kewajiban dari pada hak. Sebab hak itu berpokok dari kewajiban yang telah dibayarkan. Karena seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya maka dia pun mendapatkan haknya. Suatu hak akan hilang apabila tidak ada kewajiban yang mempertahankannya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Ali Yusuf as-subky bahwa setiap satu hak atau kewajiban dari seorang

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 8

¹²² Depaertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hlm. 45

¹²³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* ..., hlm. 571

suami akan menjadi kewajiban atau hak seorang istri, demikian pula sebaliknya.¹²⁴ Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa dasar dari pembagian hak dan kewajiban adalah *'urf* (tradisi) dan *al-fithrah* (Fitrah)m setiap hak selalu ada kewajiban dan sebaliknya.¹²⁵ Seorang istri berhak menerima mahar dalam pernikahan, oleh sebab itu seorang istri mempunyai kewajiban agar mendapatkan haknya itu. Seorang istri pun berhak menerima mut'ah dalam perceraian dari suaminya, oleh sebab istri telah dithalak oleh suaminya.

Adapun hak istri dari suaminya ada dua macam, hak yang bersifat materiil dan hak yang bersifat immateriil. Hak yang bersifat materiil bisa juga disebut dengan hak zhahir atau hak yang merupakan harta benda, termasuk di dalamnya adalah hak mahar, nafkah, tempat tinggal, pakaian dan warisan, serta mut'ah bila terjadi perceraian.¹²⁶ Hak yang bersifat immateriil yang biasa juga disebut dengan hak bathin seperti bersenggama dengan istri, mengisi jiwanya dengan ilmu pengetahuan, menanamkan rasa iman serta taqwa kepada Allah dan sebagainya.¹²⁷

Rumah tangga tidak mungkin dapat bahagia hanya dengan cara memenuhi hak istri yang bersifat zhahir (materiil) saja tanpa diiringi dengan hak bathinnya. Di antara hak bathin itu adalah:

1. Suami harus bergaul dengan istri dengan cara yang baik.

Dalam kehidupan berumah tangga, Allah Swt. telah memerintahkan suami istri agar bergaul dengan cara yang baik, menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan menganjurkan keduanya untuk mensucikan jiwa serta membersihkannya, juga

¹²⁴Ali Yusuf as-Subky, *Nizhaamul Usrah fil-Islam, Membangun Surga dalam Keluarga*, Penej. Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005), hlm. 159

¹²⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 6842

¹²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhad Sayyed Hawwas, *al-Usrah wa ...*, hlm. 174

¹²⁷Firdaweri, *Hukum Islam...*, hlm. 25

menyucikan suasana keluarga dan menjernihkannya dari hal-hal yang bisa mengeruhkan kejernihannya dan menjerumuskan mereka pada pergaulan atau sikap yang buruk. Allah Swt. telah menerangkan dalam ayat-Nya bahwa suami diwajibkan berlaku baik terhadap istrinya. Firman Allah Swt. :

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak

menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai

sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (Q.S. An-

Nisa (4): 19)¹²⁸

Kata-kata () mengandung pengertian musyarakah (saling melakukan seperti itu), maksudnya suami wajib bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik dan begitu pula seorang istri wajib pula memperlakukan suaminya dengan cara demikian. Kemudian, maksud pergaulan yang baik atau pergaulan yang patut (*bil ma'ruf*) itu ditafsirkan oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi, sebagai berikut:

ای وعلیکم ان تحسنوا معاشرۃ نسائکم فتخالطوهن بما تألف طباعهن ولا یستنکره الشرع ولا العرفولا تضیقوا علیهن فی النفقة ولا تؤذوهن بقول ولا فعل ولا تقابلوهن بعبوس الوجه ولا تقطیب الجبین.

*Kewajibanmu berlaku baik dalam mempergauli istrimu, maka kamu menggaulinya dengan cara yang sesuai menurut tabiat mereka, tidak diingkari oleh agama dan adat. Dan janganlah kamu kurangi nafkahnya, dan jangan pula kamu sakiti mereka dengan perkataan dan perbuatan, dan jangan kamu temui dia dengan bermuka masam dan mengerut-ngerutkan kening”.*¹²⁹ Adapun al-Qurthubi, berkata saat menafsirkan kata “berbuat baik” (al-ihsan) dalam pergaulan suami istri, “Yaitu, menunaikan hak istri, baik mahar maupun nafkah. Tidak bermuka masam di

¹²⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 104

¹²⁹Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Maraghi*, Jilid (t. tp.: Dar al-Fikr, t. th.), hlm. 213

*depannya jika tidak ada alasan yang dibenarkan. Saat berbicara, tidak pelan juga tidak keras, dan tidak menampakkan kecondongan pada istri yang lain.*¹³⁰

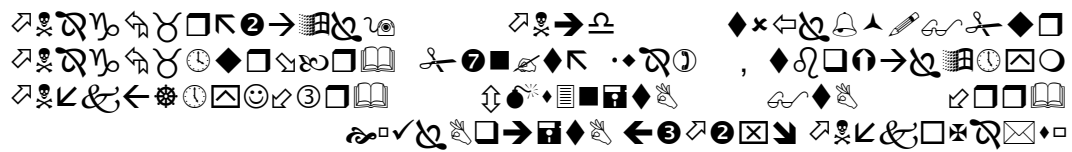
Allah Swt. memerintahkan untuk bersikap baik saat bergaul dengan istri apabila akad telah dilakukan agar pergaulan mereka dan kebersamaan mereka sempurna. Dimana suami berusaha membahagiakan istrinya dan sebaliknya istri berusaha membahagian suami. Sebab, itu lebih menenteramkan jiwa dan lebih menyenangkan bagi mereka berdua.

2. Suami Wajib Mendatangi Istrinya.

Segala makhluk yang hidup di dunia ini dilahirkan mempunyai nafsu, di antaranya manusia. Salah satu nafsu yang ada dalam diri manusia adalah ketertarikannya terhadap lawan jenisnya, kecenderungan lelaki terhadap wanita dan sebaliknya, yang terealisasi dalam hubungan seksuil suami istri. Syari'at Islam tidak melupakan perhatiannya terhadap hubungan seksuil yang dilakukan suami istri, karena itu adalah salah satu tujuan dari tujuan-tujuan pernikahan dan memang tidak layak untuk dilupakan atau diacuhkan.¹³¹ Oleh karena itu, hubungan seksuil antara suami istri memainkan peranan penting dalam menciptakan kebahagiaan rumah tangga. Dalam dunia perkawinan masalah seksuil ini

¹³⁰Al-Qurthubi, *al-Jaami' Li Ahkami al-Qur'an*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), hlm. 97. Ar-Raghib al-Isfahani mengatakan bahwa *ma'ruf* (berbuat baik) adalah setiap hal atau perbuatan yang oleh akal dan agama dipandang sesuatu yang baik. Lihat Sa'ad Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 249. Adapun Muhammad Abduh dalam tafsir *al-Manar* mendefinisikan *ma'ruf* sebagai segala hal yang sudah dikenal di dalam masyarakat manusia yang dipandang baik menurut akal pikiran maupun naluri-naluri yang sehat. Lihat Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), hlm. 27.

¹³¹Ali Yusuf as-Subky, *Nizhamul Ushrah*..., hlm. 195



Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”. (Q.S. al-Mu'minun (23): 5-6)¹³⁵

Terhadap masalah hubungan seksuil ini, para fuqaha berbeda pendapat, sebagai berikut:

- a. Madzhab Maliki berpendapat bahwa suami wajib menggauli istrinya, selama tidak ada halangan atau uzur. Ini berarti bahwa ketika seorang istri menghendaki hubungan seksuil, suami wajib memenuhinya.
- b. Madzhab al-Syafi'i mengatakan bahwa pada dasarnya kewajiban suami menyetubuhi istrinya hanyalah sekali saja selama mereka masih menjadi suami istri. Kewajiban ini hanya untuk menjaga moral istrinya. Pandangan ini dilatar belakangi oleh prinsip bahwa melakukan hubungan seksuil adalah hak seorang suami. Istri, menurut pendapat ini disamakan dengan rumah tempat tinggal yang disewa. Tapi sebaiknya menurut mereka, suami tidak membiarkan keinginan seksuil istrinya itu, agar hubungan mereka tidak berantakan.
- c. Madzhab Hambali menyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya paling tidak sekali dalam empat bulan, apabila tidak ada uzur. Jika batas maksimal ini dilanggar oleh suami maka antara keduanya harus diceraikan. Madzhab ini

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 475

mendasari pandangannya pada ketentuan hukum *Ila'* (sumpah untuk tidak menggauli istri).¹³⁶

3. Suami Wajib Menjaga dan Memelihara Istri.

Di samping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina dan berkata jelek. Selain itu juga suami tidak menyia-nyiakan istrinya dan menjaganya agar selalu melaksanakan semua perintah Allah Swt. dan menjauhi segala yang dilarang-Nya.

Firman Allah Swt.:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api

neraka... (Q.S. Ath-Tahriim (66): 6)¹³⁷

Dari ayat di atas, terdapat masalah kewajiban suami untuk bertanggung jawab memelihara istrinya. Bahkan di dalam ayat lain Allah Swt. menyuruh untuk mengajari istri, jika sudah tampak tanda-tanda kedurhakaannya sesuai dengan fungsinya sebagai pemimpin rumah tangga. Firman Allah Swt.:



Artinya : “...para istri yang kamu khawatirkan kedurhakaannya, maka nasehatilah mereka

...” (Q.S. An-Nisa (4): 34)¹³⁸

4. Mendapat Perlakuan Adil.

¹³⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 6844-6845

¹³⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 820

¹³⁸*Ibid.*, hlm. 108

Di antara hak istri yang lain atas suami adalah mendapatkan keadilan dalam nafkah dan tempat tinggal. Jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka wajib baginya berlaku adil terhadap istri-istrinya. Firman Allah swt.:



Artinya: *“Jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.* (Q.S. An-Nisa (4): 3)¹³⁹

Adapun yang dimaksud dengan adil dalam pembagian adalah adil dalam menunaikan kewajiban kepada semua istri, seperti adil dalam pemberian nafkah, adil dalam menetapkan giliran hari antara istri-istri dan sebagainya. Adapun adil dalam cinta dan kasih sayang sukar dilaksanakan. Walaupun demikian janganlah karena kecintaan kepada salah seorang istri, hingga membiarkan istri yang lain terkatung-katung hidupnya, karena kecondongan hati kepada salah satu istri.

Tidak diragukan lagi bahwa orang yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya, menjadikan suami tidak memberikan nafkah bathin kepada salah seorang dari istri-istrinya, dapat menyebabkan atau memaksa seorang istri melakukan penyelewengan.¹⁴⁰ Oleh karena itu, suami akan dapat tenggelam dalam dosa karena dosa istrinya dan dosanya sendiri.

¹³⁹*Ibid.*, hlm. 99

¹⁴⁰Ali Yusuf as-Subky, *Nizhamul Usrah ...*, hlm. 181

BAB IV

HAK ISTRI TERHADAP MAHAR DAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN DALAM NIKAH TAFWIDH MENURUT PEMIKIRAN IMAM AL-SYAFI'

A. Kedudukan Mahar dan Mut'ah bagi Istri Menurut Sistem Perkawinan

Dalam diskursus nikah (perkawinan), konsep mahar merupakan hal yang tidak terpisahkan, ia merupakan salah satu yang menjadi syarat legalnya suatu pernikahan dalam Islam yang harus dipenuhi. Ketentuan ini merujuk kepada nash al-Qur'an:

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan". (Q.S. An-Nisa (4): 4)¹

Ayat di atas ditujukan kepada suami sebagai pemberian yang wajib kepada istri yang hendak dinikahinya dengan penuh keikhlasan agar hak istri sejak awal telah diberikan. Perintah pada ayat di atas wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkannya dari makna tersebut.² Sehingga mahar wajib atas suami terhadap istri. Oleh karena itu, mahar merupakan satu diantara hak istri yang didasarkan atas Kitabullah, sunnah Rasul dan ijma' kaum muslimin. Mahar itu bisa berupa uang, harta tetap, harta bergerak atau berupa pelayanan kepada istri. Ia memperoleh hak mahar itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya.

Hadis Nabi Saw.:

اَلْتَمَسْ وَلَوْ مِنْ حَدِيْدٍ. (رواه المسلم)

¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 100

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ushrah wa Ahkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Penerj. Abdul Majid Khon, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 176-177

"*Carilah walaupun cincin dari besi*". (HR. Muslim)³

Ulama fikih memandang, hadis tersebut menunjukkan sebagai bukti (dalil) autentik bahwa disyaratkan adanya kewajiban mahar bagi calon pengantin perempuan dari calon pengantin laki-laki sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Saw. bahwa ia meninggalkan mahar pada suatu pernikahan.⁴ Andaikata mahar tidak wajib tentu ia pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, ia tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.

Mahar disyariatkan Allah Swt. untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penghormatan yang sangat berharga bagi setiap wanita. Ini berarti mahar dalam akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah Swt. mewajibkan mahar kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi memanfaatkannya kembali kepada suami juga.

Merupakan suatu yang relevan bila suami dibebani mahar untuk diberikan kepada istri. Mahar dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan thalak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut merupakan jaminan kelangsungan hidup bagi wanita ketika dithalak.

Ulama fikih sepakat bahwa mahar menjadi kuat kedudukannya dengan salah satu dari tiga perkara berikut:

³Syeikh Imam al-Nawawi, *Shahih Muslim*, Jilid , (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 213

⁴Abi Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-'Imran al-Syafi'i al-Yamani, *Al-Bayan Fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), hlm. 368

1. Bercampur, yaitu suami telah menggauli istri. Maksud bercampur adalah benar-benar bercampur, artinya terjadi hubungan seksual antara suami dan istrinya dengan memasukkan alat seks suami (*dzakar*) atau hanya sebatas perkiraan bagi yang kehilangan alatnya ke dalam vagina atau jalan belakang milik istri.⁵ Dengan demikian, istri telah melaksanakan kewajiban terhadap suaminya dengan menyerahkan dirinya dan suami telah terpenuhi haknya, yaitu dengan bercampur. Hak istri menjadi kuat dalam menerima mahar secara sempurna, baik percampuran terjadi pada saat bersuci atau ditengah-tengah menstruasi dan atau ditengah-tengah ihramnya istri. Jika bercampur subhat mewajibkan mahar maka bercampur dalam pernikahan lebih utama kedudukannya, percampurannya tidak disyaratkan berkali-kali tetapi sudah kuat dengan sekali bercampur. Bercampur yang benar-benar memperkuat kedudukan mahar, baik *mahar mitsil* atau mahar yang disebutkan, baik disebutkan waktu akad atau setelahnya.

Jika keperawanannya dihilangkan dengan jari-jari tidak akan memperkuat mahar. al-Syairazi berkata: "Mahar menjadi kuat sebab bercampur pada *faraj* (vagina) wanita", sebagaimana firman Allah Swt.:



Artinya: " *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu*

Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan

⁵Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Firuzabadi al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), hlm. 466

mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

(Q.S. An-Nisa (4): 21)⁶

2. Salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia.⁷ Jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia sebelum bercampur, kedudukan mahar tetap kuat. Istri atau warisnya tetap berhak menerimanya, baik meninggalnya wajar atau dibunuh suami atau dibunuh orang lain dan atau bunuh diri berdasarkan ijma' para sahabat. Nikah tidak batal sebab kematian berdasarkan adanya hubungan waris. Kematian hanya akhir pernikahan dan akhir akad adalah terpenuhinya apa yang diakadkan.⁸

Jika istri membunuh suami, mahar gugur seluruhnya dan ia tidak berhak sesuatu apa pun. Karena ia terhalang sebagai ahli waris apalagi mahar. Pembunuhan itu kriminal dan kriminal tidak dapat memperkuat mahar, bahkan menafikannya. Al-khatib al-Syarbini berkata: "Jika wanita membunuh suaminya sebelum bercampur, mahar tidak bertahan".⁹ Begitu juga jika istri membunuh dirinya, mahar tidak bisa gugur tetapi diberikan kepada ahli warisnya.¹⁰

3. Bersunyan yang sah.¹¹ Menurut Abu Hanifah, jika suami istri itu sudah sekamar (*khalwat*) dan tidak ada uzur *syar'i* (seperti puasa wajib, sedang haid atau sedang sakit) wanita berhak menerima mahar penuh. Alasannya, bahwa khulafau al-

⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 105

⁷Dalam hal ini Nabi pernah berbuat demikian kepada seorang wanita yang bernama Barwa' binti Wasyiq, meninggal suaminya dan ia menerima mahar dari peninggalan suaminya, padahal mereka belum bercampur. Lihat 'Abd al-Hamid Hakim, *al-Mu'in al-Mubin*, Jilid IV, (Bukit Tinggi: Maktaba Nusantara: 1959), hlm. 55

⁸Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Firuzabadi al-Syirazi *Al-Muhadzdzab*, Juz V, hlm. 57.

⁹Syeikh Syamsuddin Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 287

¹⁰*Ibid.*,

¹¹Maksudnya suami istri sebelum bercampur bersunyan di satu tempat yang aman dari penglihatan orang dan tidak ada seorang pun yang masuk, kedua pasangan suami istri dapat melihat rahasia berdua dan tidak ada yang mencegah persenggamaan pada istri, baik secara hakiki, syar'i dan alami.

Rasyidin telah memutuskan bahwa apabila pintu sudah dikunci dan tirai sudah diturunkan maka suami wajib membayar mahar penuh.¹² Menurut Ibn ‘Abbas, suami istri yang baru sekamar dan belum bercampur, apabila bercerai maka kewajiban suami membayar setengah dari maharnya.¹³

Adapun kedudukan mahar bagi seorang wanita yang telah kawin dengan seorang laki-laki, dimana suaminya telah meninggal dunia sebelum ditentukan dengan jelas maharnya (*mahar mitsil*) sedangkan mereka belum bercampur, dalam hal ini Ibnu Mas‘ud berkata: “Wanita itu tetap berhak menerima maharnya sebagai seorang istri, tidak boleh kurang atau lebih. Dia harus beriddah dan mendapat pusaka”. Tidak lama kemudian Ma‘qal bin al-Ashja’i berdiri dan berkata: “Saya naik saksi, bahwa Nabi telah memutuskan terhadap seorang wanita bernama Barwa’ binti Wasyiq seperti putusanmu itu”.¹⁴

Imam Malik dan murid-muridnya serta al-Awza’i berpendapat bahwa wanita yang bersangkutan tidak berhak menerima mahar tetapi dia berhak menerima mut’ah dan harta warisan. Karena mahar itu adalah *‘iwadh* (imbalan) dan dalam masalah ini belum terjadi campur antara suami istri itu, tentulah istri belum berhak menerima imbalannya yaitu mahar. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita itu berhak mendapat mahar mitsil dan harta warisan dari suaminya itu. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Ahmad dan Dawud, dimana alasan mereka berpegang pada hadis tersebut di atas.¹⁵

Selanjutnya menurut Mazhab Abu Hanifah, wajib diberikan mahar mitsil karena tiga hal, berikut ini:

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid VII, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), hlm. 71

¹³*Ibid.*, hlm. 72

¹⁴Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syawkani, *Nayl al-Awthar*, Jilid VI, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladuhu, t.th.), hlm. 195. Lihat juga, Siddiq bin Hasan bin ‘Ali al-Hasani al-Qanuji, *al-Rawdat al-Nadhiyyah*, Jilid II, (Mesir: Idarat al-Taba’at al-Muniriyyah, t.th.), hlm. 38

¹⁵Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid II, (Koira: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyat, 1969), hlm. 29

1. Pada waktu dilakukan akad nikah tidak disebutkan jumlah dan jenis mahar dan sebelumnya belum ditentukan mahar itu, seperti dalam nikah *Tafwidh* (wanita yang bersangkutan menyerahkan/mengizinkan dirinya dikawinkan dan ia tidak menentukan maharnya sendiri). Dengan berlangsungnya akad nikah ini wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil.
2. Pada waktu berlangsung akad nikah disebut maharnya, tetapi kemudian ternyata barang yang disebut itu tidak halal atau yang disebut sebagai mahar itu sesuatu yang tidak berharga. Menyebut barang yang demikian sebagai mahar dalam akad nikah adalah sia-sia saja, wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil.
3. Sepasang suami istri telah sepakat kawin tanpa mahar (nikah *tafwidh*), namun menurut hukum Islam suami harus juga membayar mahar, sebab mahar itu adalah hak Allah. Dalam hal ini istri berhak menerima mahar mitsil, karena ada keharusan dalam syarak bahwa suami membayar mahar kepada istrinya karena perkawinan. Orang yang melakukan perkawinan tidak berhak menghilangkan ketentuan itu.¹⁶

Dalam hal nikah *tafwidh* di atas, apabila wanita sudah dicampuri suaminya, wanita tersebut harus mendapat mahar mitsil. Jadi keharusan membayar mahar mitsil itu bukan karena akad nikahnya, tetapi karena mereka telah campur.

Istri berhak menuntut kepada suami ketentuan jumlah maharnya sebelum dicampuri. Apabila suami menentukan jumlah mahar kurang daripada mahar mitsil maka hal ini harus disetujui pihak wanita karena mahar itu haknya. Tetapi jika suami menentukan jumlahnya sebesar mahar mitsil, tidak perlu minta persetujuan lagi. Jika suami tidak mau

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1950), hlm. 210

menentukannya atau terjadi perselisihan pendapat tentang besar jumlahnya mahar, hakimlah yang menentukan mahar mitsilnya.

Mahar itu hak wanita sepenuhnya, tetapi walinya berhak juga dalam menentukan besar jumlahnya, sebab hal itu menyangkut nama baik keluarganya. Karena itu apabila seorang wanita kawin dengan seorang laki-laki dengan mahar yang lebih kecil jumlahnya dari mahar mitsil maka walinya (yang 'asabah) berhak menolak dan membatalkan (dengan perantaraan hakim) perkawinan itu.

Apabila terjadi *wata'* (campur) pada nikah fasid suami wajib membayar mitsil. Demikian pula laki-laki wajib membayar mahar mitsil apabila terjadi *wata' syubhat*. Rasulullah Saw. bersabda: "Jika ada seorang perempuan kawin tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Apabila terjadi campur antara suami istri itu perempuan itu berhak menerima maharnya".¹⁷

Apabila suami menjatuhkan thalak kepada istrinya sebelum dicampurinya dan maharnya sudah disebutkan dalam akad nikah (*mahar musamma*) kewajiban suami membayar setengah dari jumlah *mahar musamma*, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ الْحَرْثَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا لَكَاذِبُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ الْحَرْثَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا لَكَاذِبُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ الْحَرْثَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا لَكَاذِبُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ الْحَرْثَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا لَكَاذِبُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ الْحَرْثَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا لَكَاذِبُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ الْحَرْثَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا لَكَاذِبُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ الْحَرْثَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا لَكَاذِبُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ الْحَرْثَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا لَكَاذِبُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ الْحَرْثَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا لَكَاذِبُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ الْحَرْثَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا لَكَاذِبُونَ

Artinya: "Jika kamu menceraikan Istri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Istri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan

¹⁷Abd al-Hamid Hakim, *al-Mu'in al-Mubin* ..., hlm. 57

nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah (2): 237)¹⁸

Ayat di atas menunjukkan kewajiban suami membayar setengah dari jumlah mahar yang sudah ditentukan dalam akad nikah, karena al-Qur'an menegaskan "telah kamu tentukan jumlah mahar kepada mereka maka bayarlah separuhnya". Untuk mahar yang belum ditentukan jumlahnya (tidak disebut pada waktu akad) tidak berlaku kewajiban membayar separuhnya, karena tidak termasuk pernyataan dalam ayat ini.

Menurut Imam Hanafi, yang dimaksud "Kamu telah menentukan mahar mereka" dalam ayat di atas adalah yang sudah disebut dalam akad nikah, mahar yang seperti itulah yang harus dibayar setengahnya. Sedangkan yang ditentukan jumlah mahar sesudah akad nikah tidak wajib membayar setengahnya tetapi wajib memberi *mut'ah*. Sedangkan menurut Imam Malik, bahwa kalau mahar ditentukan sesudah akad nikah dan terjadi thalak sebelum mereka bercampur (*dukhu*), berlaku juga kewajiban membayar setengahnya itu. Karena ayat di atas, menerangkan kewajiban membayar setengah dari mahar yang sudah ditentukan baik ditentukan pada waktu berlangsung upacara akad nikah maupun sesudahnya, tetapi sebelum mereka campur.

Ash-Shabuni dalam kitabnya *Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, menyebutkan beberapa ayat yang menerangkan tentang hukum-hukum wanita yang dithalak, dengan berbagai macamnya sebagai berikut:¹⁹

1. Perempuan yang diceraikan sudah dicampuri dan sudah ditentukan maharnya.

Dalam hal ini maharnya tidak boleh diambil sedikitpun oleh suaminya, dasarnya ialah firman Allah Swt.:

¹⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48

¹⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz I, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001), hlm. 296-297



Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 229)²⁰

2. Perempuan yang diceraikan belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya.

Dalam hal ini wanita tersebut tidak berhak menerima mahar, tetapi berhak mendapatkan mut'ah, dasarnya ialah firman Allah Swt.:

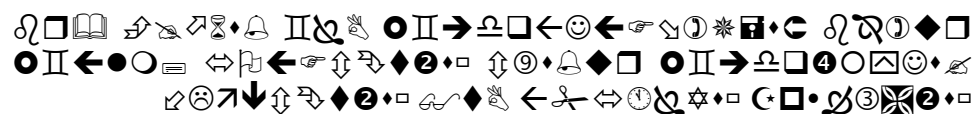


Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu tentukan maharnya, tetapi berilah mereka mut'ah”.

(Q.S. Al-Baqarah (2): 236)²¹

3. Perempuan yang diceraikan belum dicampuri tetapi sudah ditentukan maharnya.

Dalam hal ini wanita tersebut mendapat separuh mahar, dasarnya ialah firman Allah Swt.:



Artinya: “Dan jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sudah kamu tentukan maharnya, maka mereka berhak mendapatkan separuh dari (mahar) yang telah kamu tentukan itu”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 237)²²

²⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 45

²¹*Ibid.*, hlm. 48

²²*Ibid.*,

Dalam masalah pemberian mahar, madzhab Maliki menekankan bahwa separuh dari mahar tersebut hendaknya diberikan seketika itu dalam perkawinan, hal ini demi kesempurnaan dan keabsahan suatu perkawinan. Mahar boleh diberikan pada saat pernikahan atau boleh pula ditunda setelah selesainya upacara perkawinan tersebut. Menurut Madzhab Hanafiyah, apabila mahar itu telah ditentukan (*al-Mahr al-Musamma*), lantas timbul pertanyaan apakah mahar itu harus diberikan seketika itu juga (*Mu'ajjal*) atau ditunda (*Muwajjal*) setelah pernikahan. Mahar itu dapat dan wajib dibayarkan ketika habis tempo tunda pembayaran yang dijanjikan (*Muwajjal*), maka ia dapat dan wajib dibayarkan pada saat perceraian atau bila terjadi peristiwa mahar yang merusak keutuhan ikatan keluarga tersebut. Jika mahar *Musamma*, mahar ini dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama dan boleh ditetapkan bahwa satu bagian dibayarkan segera berdasarkan permintaan istri dan sebagian lagi dapat dibayarkan pada saat suami meninggal dunia, atau istri diceraikan atau terjadi peristiwa khusus lainnya.

Dari pokok pandangan Madzhab Hanafiyah di atas dapat dipahami bahwa pembayaran mahar itu dapat diundurkan, baik sebagian atau semuanya. Mahar itu sama sekali tidak boleh dilupakan, atau mahar yang dijanjikan itu tidak boleh diberikan dengan bersyarat seperti mengatakan: "Aku menikahimu dengan mahar 100 akan dibayarkan jika hari mendung, atau apabila turun hujan, atau jika seorang musafir datang, dan lain-lain". Ulama Maliki berkata bahwa mahar itu boleh berupa suatu benda tertentu, seperti seekor hewan yang jinak. Dengan melihatnya terlebih dahulu, atau dengan menjelaskan umpamanya seekor kuda tertentu seperti kuda Arab, atau mungkin pula sejumlah uang tertentu seperti yang telah disebutkan terdahulu.

Andaikan mahar itu tidak diberikan secara langsung, ia tidak boleh ditunda dengan janji yang mengambang, seperti “diundur sampai aku mati atau sampai kita bercerai”. Menurut Madzhab Syafi’i dan Hanbali, boleh hukumnya jika seluruh mahar itu dibayarkan kemudian sepanjang ia tidak diabaikan sama sekali. Apabila jumlah mahar sudah cukup dan tersedia di tangan, pembayarannya tidak boleh ditunda lagi. Menurut para ulama Maliki juga, mahar itu boleh diberikan kepada istri pada hari perkawinan kecuali apabila istri ingin mengambilnya kemudian. Mahar itu tidak boleh ditunda hanya karena istri sedang sakit. Madzhab Maliki berpendapat bahwa kalau mahar itu sudah tersedia separuhnya, agar dibayarkan saat itu juga, dan setengah mahar lagi di waktu kemudian dengan kata-kata yang jelas, seperti: “ Aku menikahimu dengan mahar 50 dirham lagi akan dibayar kemudian”. Dalam keadaan mahar sudah tersedia, jumlah tersebut harus diberikan kepadanya sebelum perhelatan.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi’iyah seorang istri dapat menolak pernikahan dengan suaminya, bila mahar yang telah disetujuinya akan dibayar tunai seluruhnya ternyata tidak jadi diberikan. Apabila suami tidak membayar mahar atau tidak memberi nafkah kepada istri, istri dapat membatalkan perkawinan tersebut. Ulama Syafi’iyah berpendapat apabila suami tidak mampu membayar mahar yang telah disepakati, terserah kepada pihak istri apakah akan bersabar atau mengadukan perkaranya kepada Qodhi untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Tidak ada pembatasan jumlah mahar yang ditetapkan, pernyataan yang dipergunakan dalam ayat al-Qur’an menunjukkan bahwa berapa pun jumlah mahar itu boleh diberikan kepada istri, sebagaimana firman Allah Swt.:

﴿قُلْ إِنَّمَا مَهْرُ النِّسَاءِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا عَصَيْتُمْ فِي مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝﴾

Artinya: “Maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban”. (Q.S. An-Nisa (4): 24)²⁴

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada batas jumlah maksimal atau minimal yang telah ditetapkan. Istri adalah pemilik mahar dan karenanya dia (istri) boleh mengembalikan mahar tersebut sebagiannya atau keseluruhannya. Pengembalian mahar dalam istilah fikih disebut *Hibah al-Mahr*.²⁵

Hak istri atas mahar dapat gugur seluruhnya dengan salah satu dari beberapa penyebab sebagai berikut:

- a. Apabila thalak (perceraian) terjadi dengan jalan fasah dari pihak istri, karena wanita itu sendiri melakukan pekerjaan maksiat seperti murtad. Dalam hal ini, karena kejahatan datang dari pihak wanita itu sendiri gugurlah semua maharnya, sebab maksiat itulah yang menggugurkan kewajiban suami untuk memenuhi hak istrinya itu.

Menurut paham madzhab Maliki:²⁶ Pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh suami atau disebabkan karena ada aib pada istri sebelum melakukan hubungan seksual maka suami tidak berkewajiban membayar mahar apa pun. Tidak pula suami harus membayar mahar pada nikah *tafwidh*, jika suami meninggal dunia atau terjadi thalak sebelum melakukan hubungan seksual.

²⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 106

²⁵M. Abdul Mujieb, Cs, *Kamus istilah fikih*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), hlm. 184

²⁶Ibnu Jazyi Al-Maliki, *Al-Qawaninu al-Ahkam al-syar'iyyah wa Masa'ilul Furu' al-Fikhiyyah*, (Beirut: Darul Ilmi lil Malayin, t.th.), hlm. 203. Lihat juga, Abu Al-Barkat Ahmad bin Muhammad ad-Dardir, *al-Syarh Ash-Shaghir 'ala Aqrb al-Masalik lid-Dardir*, Juz II, (Mesir: Darul Ma'arif, t.th.), hlm. 437

Madzhab Syafi'i²⁷ dan Hanbali²⁸ membedakan antara thalak yang disebabkan oleh pihak isteri dan thalak yang disebabkan oleh selain isteri. Mereka berpendapat bahwa thalak yang ditimbulkan dari pihak isteri sebelum terjadi hubungan seksual maka mahar *musamma* (yang telah disebutkan pada waktu akad nikah), mahar *mafrudh* (yang telah ditentukan), dan mahar *mitsil* (yang disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku) gugur karenanya, seperti umpamanya karena isteri masuk Islam (dari agama lain) dengan kesadarannya sendiri; atau karena ikut masuk Islam bersama orang tuanya; atau karena suami menggugurkan pernikahan disebabkan adanya aib pada isteri, atau karena isteri berpindah agama (*ridlah*) atau karena diketahui kemudian bahwa suami isteri tersebut ternyata saudara sesusuan ketika masih kecil.

Sedangkan thalak yang ditimbulkan sebelum *dukhul* (bercampur) yang tidak karena disebabkan oleh pihak isteri seperti pencabutan (*khulu'*) umpamanya, meskipun atas kehendak isteri yang meminta dithalak atau thalak gantung (jika isteri benar-benar melakukannya sehingga dia dithalak, atau suami masuk Islam, atau murtad/ keluar dari Islam), atau kemudian diketahui bahwa ibunya pernah menyusui istrinya di waktu kecil atau ibu istrinya pernah menyusunya di waktu kecil maka maharnya tidak gugur melainkan yang harus dibayar hanya seperduanya.

²⁷Syeikh Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 234

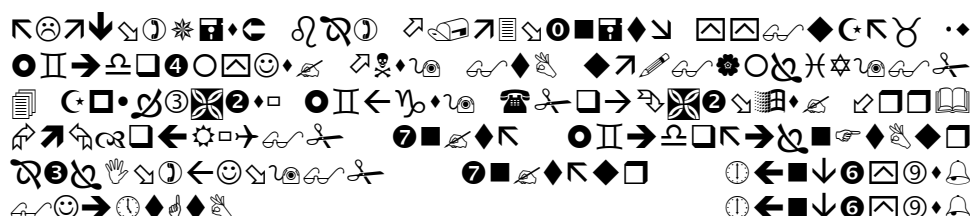
²⁸Al-Buhati, *Kasyshaf Al-Qana' 'an Matnil Iqna'*, Juz V, (Riyadh: Maktabah An-Nashr al-Haditsah, t.th.), hlm. 157

- b. Fasakh yang dilakukan oleh suami atau istri setelah mereka akilbaligh, sedangkan mereka dinikahkan ketika masih kecil. Fasakh yang seperti ini tidak ubahnya seperti membatalkan suatu akad nikah sejak dari awalnya, tidak ada sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi, karena *dukhl* (campur) tidak terjadi antara suami istri.
- c. Fasakh karena tidak sekufu. Yaitu wali memintakan fasah karena maharnya kurang daripada jumlah mahar *mitsil*. Fasah macam ini adalah seperti membatalkan suatu akad (nikah) dari awal juga. Apalagi jika fasah ini datang dari pihak istri (walinya), maharnya menjadi gugur karena tidak ada sesuatu sebab yang mengharuskan suami membayarnya.
- d. Mencabut mahar sebelum *dukhl* (bercampur). Yaitu apabila laki-laki mencabut diri dari istrinya sebelum bercampur dan mencabut kembali maharnya, gugurlah maharnya. Apabila maharnya tidak berada di tangan maka gugurlah kewajiban mahar dari suami dan jika mahar itu ada di tangan istri, istri harus mengembalikannya kepada suami. Jika mahar itu berupa nilai harta benda, istri harus mengembalikan senilai harta benda itu. Sejak itu, suami bebas dari kewajiban sebagai suami untuk membayar mahar dan memberi nafkah.\
- e. Gugur dari seluruh mahar sebelum *dukhl* (bercampur) atau sesudahnya. Yaitu mahar gugur dengan pembebasan mahar dari istri jika istri adalah wanita yang senang berderma sedangkan maharnya dalam bentuk hutang tanggungan jaminan yakni berupa uang, barang timbangan dan barang takaran. Sebab pembebasan berarti pengguguran, dan menggugurkan kewajiban dari pihak yang berhak memberikan dapat menggugurkan kewajiban itu.

- f. Pemberian mahar kembali dari istri kepada suami. Yaitu jika istri adalah wanita dermawan dan suami berkenan menerima pemberian hibah mahar dalam majlis akad, baik pemberian itu sebelum mahar diberikan atau pun setelah diberikan. Sebab pemberian (*hibah*) berbeda dengan pembebasan mahar (*ibra'*) dari sisi bahwa hibah tidak untuk membayar hutang dan barang yaitu yang ada pada tanggungan (*dzimmah*) seperti uang atau barang yang wujudnya nyata seperti pakaian atau binatang ternak tertentu. Sedangkan *ibra'* tidak dapat diberikan melainkan untuk membayar hutang.

Adapun *al-Mut'ah* atau *al-Mata'* adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan bisa habis dalam waktu yang sebentar. Karena itu dunia disebut juga sebagai *mata'*. Bersenang-senang bisa juga disebut dengan *tamattu'*, karena kesenangan tersebut dapat berakhir dengan cepat.²⁹ Allah Swt. menyerahkan kepada manusia itu sendiri tentang batasan *mut'ah* yang akan diberikan kepada istri yang terthalak. Para fukhaha berbeda pendapat tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum *dukhul* (campur).

Wanita yang dithalak (diceraikan) oleh suaminya sebelum *dukhul* (campur) dan belum ditentukan maharnya diberikan kepadanya *mut'ah*,³⁰ karena ia tidak menerima setengah bayaran daripada mahar. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt.:



²⁹Abd al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari'at*, Penerjemah Usman Sya'roni, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 179

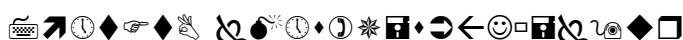
³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1950), hlm. 233



Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut’ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 236)³¹

Ayat di atas mengharuskan suami membayar *mut’ah* kepada istri, demikian pendapat Ibn ‘Umar, ‘Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Abi al-Hasan, Sa’id bin Jubayr, abu Qallaba al-Zuhri, Qatadah dan Dahhak bin Muzahim. Adapun pendapat Abu ‘Ubayd, Imam Malik bin Anas dan Syurayh, bahwa sunat memberi *mut’ah* kepada istri yang dithalak seperti yang tersebut di atas itu, bahkan Imam Malik dan murid-muridnya berpendapat bahwa *mut’ah* sunat diberikan kepada istrinya yang dithalak sebelum atau sesudah dicampuri suaminya.³²

Adapun golongan yang mengharuskan membayar *mut’ah* beralasan pada perintah ayat “ومتعوهن” (Berilah *mut’ah* kepada mereka), menurut al-Qurtubi pendapat inilah yang lebih utama, lebih benar, karena dalam ayat ini perintah itu berlaku umum dan juga dalam ayat lain Allah lebih mempertegas perintah-Nya itu dalam firman-Nya:



Artinya: “Dan untuk wanita-wanita yang dithalak harus diberi *mut’ah*”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 241)³³

Dengan alasan ayat di atas, hukum “wajibnya” membayar *mut’ah* itu lebih jelas daripada “sunat”. Alasan Imam Malik ialah bahwa Allah swt. berfirman diakhir ayat itu “

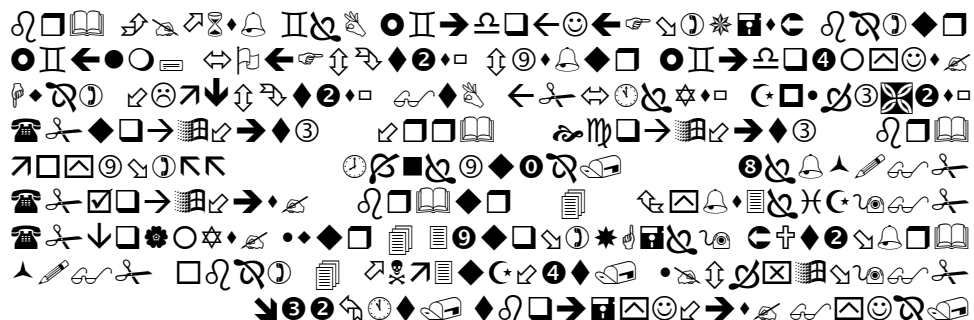
³¹Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 48

³²Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1993), hlm. 132

³³Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 49

على المتقين “, jika sekiranya wajib tentu perkataan-Nya itu dihadapkan kepada semua orang,³⁴ bukan kepada kelompok “المتقين” saja, karena itu hukum mut’ah adalah sunat.

Jika diperhatikan dua buah ayat yang berurutan dalam surat al-Baqarah (2) yaitu: ayat 236 sebagaimana telah disebut di atas dengan ayat 237 di bawah ini:



Artinya: “Jika kamu menceraikan Istri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Istri-isterimu itu mema’afkan atau dima’afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema’afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 237)³⁵

Ayat yang disebut lebih dahulu menjelaskan thalak yang dijatuhkan kepada istri yang belum disentuh (dicampuri) suaminya dan belum ditentukan maharnya, perempuan itu berhak menerima mut’ah menurut kadar kaya atau miskinny suami. Sedangkan ayat berikutnya, menjelaskan bahwa istri yang dithalak sebelum dicampuri suaminya tetapi sudah ditentukan besar maharnya maka perempuan itu berhak menerima setengah dari jumlah mahar yang sudah ditentukan, ia tidak berhak atas mut’ah. Agaknya ini sebagai imbalan, bahwa istri yang belum ditentukan berhak mut’ah, sedangkan yang sudah

³⁴Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkam...*, hlm. 134

³⁵Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 48. Sebagian mufassir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-Junah* ialah dosa, karena dalam thalak sebelum *dukhul* tidak ada pemberian harta. Sebagaimana banyak hadits yang diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau sering kali melarang cerai. Dari sini, kaum muslimin mengira bahwa dalam perceraian itu terdapat dosa, sehingga hal itu dinegasikan. Sementara sebagian mufassir lainnya menyatakan bahwa maksud kata *al-Junah* ialah pemberian harta yang diwajibkan kepada lelaki yang menceraikan istrinya, baik berupa mahar maupun lainnya. Lihat Abd al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-hukum dari*, hlm. 173

ditentukan maharnya berhak menerima setengah maharnya; keduanya sama-sama dithalak sebelum dicampuri.

Al-Qur'an menyebutkan empat macam keadaan istri yang dithalak (dicerai). Dua macam di antaranya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sedangkan dua macam lagi ialah, istri yang dithalak suaminya sesudah mereka campur dan sudah ditentukan maharnya. Dalam hal yang seperti ini, suami tidak boleh meminta kembali sedikitpun mahar yang sudah dilunasinya, sebagaimana yang telah diuraikan di muka. Macam terakhir ialah istri yang dithalak sesudah mereka campur tetapi belum ditentukan besar mahar atau belum terbayar, wajiblah atas suami membayar mahar mitsil. Jika belum dilunasi (mahar musamma) maka mahar tersebut harus dibayar penuh.³⁶

Menurut Imam Hanafi, ada tiga macam hukum memberi *mut'ah*, yaitu:

- a. Wajib, yaitu kepada istri yang dithalak sebelum bercampur dengan suaminya dan belum ditentukan maharnya.
- b. Sunat, yaitu kepada istri yang dithalak sesudah dicampuri tetapi belum ditentukan maharnya, karena perempuan itu berhak menerima mahar mitsil. Adanya *mut'ah* untuk perempuan (yang semacam ini) tujuannya ialah supaya perceraian itu berlangsung dengan baik (sebagaimana perintah Allah).
- c. Sunat Muakkad, yaitu untuk istri yang dithalak suaminya sesudah mereka campur dan sudah ditentukan juga maharnya, maka pemberian *mut'ah* kepadanya berarti melakukan perceraian dengan baik.³⁷

³⁶ Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam...*, hlm. 130

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Shakhsiyyah* ..., hlm. 235. Lihat juga, Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarif al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadzab*, Juz V, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t. th.), hlm. 544-545

Ulama madzhab Hanafiyah berbeda pendapat dalam menetapkan *mut'ah*, menurut Abu Yusuf *Mut'ah* ditetapkan menurut kemampuan suami, hal ini berdasarkan firman Allah Swt. , karena itu suamilah yang dibebani untuk pengadaan *mut'ah* ini, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kadar kesanggupannya.³⁸

Oleh sebab itu, perlu digaris bawahi bahwa *mut'ah* merupakan suatu hukum syar'i yang kedudukannya sebagai ganti rugi akibat penyalahgunaan hak thalak (cerai), dan sebaiknya bagi suami yang menjatuhkan thalak harus memberikan *mut'ah* sebagai suatu kewajiban baginya. Tujuannya agar ia tidak dapat menjatuhkan thalak dengan sembarangan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara nama baik istri dan menghindarkannya dari prasangka buruk dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

B. Hak Istri Terhadap Mahar dan Mut'ah Pasca Perceraian Dalam Nikah Tawidh Menurut Pemikiran Imam al-Syafi'i

Nikah *tawidh* merupakan salah satu bentuk pernikahan dalam Islam yang kebolehan ditetapkan oleh al-Qur'an, hadis Rasulullah Saw, ijma ulama dan *qiyas*. Namun dalam hal mahar dan *mut'ah* bagi istri dalam nikah *tawidh* tersebut terjadi perbedaan pendapat dikalangan fukhaha, yaitu mengenai kewajiban untuk memberikan hak istri terhadap mahar dan *mut'ah* atau meniadakan kedua hak istri tersebut pasca terjadinya perceraian dalam nikah *tawidh*.

Sebelum penulis mengemukakan pemikiran Imam al-Syafi'i tentang hak istri terhadap mahar dan *mut'ah* pasca perceraian dalam nikah *tawidh*, terlebih dahulu penulis

³⁸*ibid.*, hlm. 234

mengemukakan pendapat para fukhaha yang mewajibkan maupun yang tidak mewajibkan pemberian mahar pasca perceraian dalam nikah *tafwidh*. Walaupun pada uraian sebelumnya telah disebutkan.

Sangatlah dianjurkan supaya seorang laki-laki yang menceraikan istrinya untuk memberikan mahar atau *mut'ah* kepada istri yang dicerainya, sebagaimana firman Allah:

وَلَوْ طَلَّاهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبَازِغَ وَطَرَدَهَا فَغُلِبَتْ عَلَيْهَا فَلْيَنْفِقْ مِنْهَا مَتَاعَهَا الَّذِي أَتَاكَ مِنْ بَنَاتِكُمْ بِمَا رَفَعْتَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَفَىٰ عَلَىٰكُمْ ۚ وَلَا تَبْغُوا إِلَيْهَا ۚ إِنَّهَا بِغُلَبِكُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۚ

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 237)³⁹

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ بِطَرَفِ الدِّينِ وَلَا تَتَّبِعُوا هَلْكَةَ سُنَنِكُمْ إِلَّا مَعْ سُنَّتَ اللَّهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتْ تَكْذِيبًا ۚ

Artinya: “Dan untuk wanita-wanita yang dithalak harus diberi *mut'ah*”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 241)⁴⁰

Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad dan Daud bahwa istri yang diceraikan sebelum ditentukan maharnya dan belum bercampur (*dukhu*) dalam nikah *tafwidh*, maka istri tersebut berhak mendapatkan mahar *mitsl* dan warisan. Ini jugalah yang dipegang oleh jumhur ulama Hanafiyah, dimana menurut mereka jika istri diceraikan dalam nikah *tafwidh* apabila sudah campur atau ditinggal mati sebelum ditetapkan bagi istri itu mahar, maka bagi istri wajib diberikan mahar *mitsl*, tetapi jika belum bercampur (*dukhu*) maka wajib baginya diberikan *mut'ah*.⁴¹ Mereka berhujjah dengan firman Allah Swt.:

³⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

⁴⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 49

⁴¹Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu* ..., hlm. 6778. Lihat juga Abdurrahman al-Zajiri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 131



Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-

isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu

menentukan mahamya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian)

kepada mereka’. (Q.S. Al-Baqarah (2): 236)⁴²

Firman Allah Swt di atas merupakan suatu perintah, yang berarti wajib hukumnya.

Dan, memenuhi kewajiban adalah termasuk berbuat baik. Di samping itu diperintahkan

pula oleh hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Ibn Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَهَا الصَّدَاقُ
وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abû Bakar bin Abi Syaibah, ‘Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyân, Firâs, Sya’bî, Masrûq, Abdullah: Sesungguhnya ditanya tentang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu meninggal dunia, belum menggauli isterinya, belum menunaikan mahamya. Berkata ‘Abdullah: perempuan itu berhak atas mahamya, mewarisi dari suaminya, dan berlaku ‘iddahnya. Berkata Ma’qil bin Sinân al-Asyja’î: Saya menyaksikan Rasulullah saw., memutuskan hukum pada Barwa’ binti Wâsiq seperti demikian”⁴³

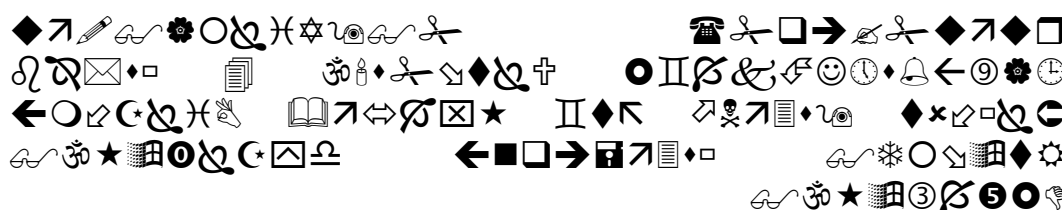
Menurut Imam Malik dan para pengikutnya, bahwa surat al-Baqarah: 236

sebagaimana disebutkan di atas, merupakan pilihan yang diperuntukkan bagi seorang

⁴²Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 48

⁴³Al-Hâfidz Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazîd al-Qazwîni Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Jilid I, (t.t: Dâr Ihyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th), hlm. 609. Hadis no. 1891 dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban (4098, 4099) dan dinilai *shahih* oleh al-Bani di dalam *shahih* Abu Daud. Lihat juga Siddiq bin Hasan bin ‘Ali al-Hasani al-Qanujî, *al-Rawdat al-Nadfiyyah*, Jilid II, (Mesir: Idarat al-Taba’at al-Muniriyyah, t.th.), hlm. 38

suami ketika dia ingin menceraikan istrinya. Berdasarkan ayat ini seorang suami boleh memilih salah satu dari tiga kemungkinan. Apakah ia menceraikan istrinya tanpa menentukan maharnya atau ia menentukan maharnya, sebagaimana yang diminta oleh pihak istri. Atau ia menentukan mahar *mitsl*nya, sebagaimana pada ayat di atas dijelaskan secara rinci pada kalimat, *"Hendakalah kalian berikan suatu mut'ah menurut kemampuanmu"*. Demikian pula dalam surat an-Nisa ayat 4:



Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".* (Q.S. An-Nisa: 4)⁴⁴

Berdasarkan ayat di atas, kemungkinan pertama sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Malik bertentangan dengan ayat bersangkutan, sedangkan kemungkinan kedua dipandang akan memberatkan pihak bekas suami, apabila pihak istri meminta jumlah mahar yang tinggi. Kemungkinan ketiga, yaitu mahar *mitsl* dipandang lebih adil dan bijaksana karena hal itu didasarkan kepada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada mahar yang biasa diterima oleh pihak istri. Hal ini diperkuat oleh hadis yang menyebutkan kasus seorang suami yang menceraikan istrinya setelah terjadi *dukhl*, sementara ia belum menetapkan jumlah maharnya. Begitu pula seorang suami yang meninggal sebelum terjadi *dukhl*, sedangkan ia belum menetapkan mahar yang harus diberikan kepada istrinya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibn Majah di atas.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 100

Selanjutnya menurut pendapat Imam Malik, para pengikutnya dan al-Auza'i bahwa istri yang diceraikan sebelum ditentukan maharnya dan belum bercampur (*dukhu*) dalam nikah *tafwidh*, maka istri tersebut tidak berhak mendapatkan mahar, tetapi berhak mendapatkan *mut'ah* dan warisan.⁴⁵ Bahkan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika terdapat syarat nikah tanpa mahar sama sekali, pernikahan itu batal. Demikian pula menurut Ibnu Hazm. Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa setiap syarat di luar ketentuan Allah adalah batal, sebagaimana pembayaran mahar sudah ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam kaitan dengan hal ini, Sayyid Sabiq mengemukakan pendapatnya dengan pernyataan sebagai berikut:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya: "Setiap syarat di luar kitabullah adalah batal."⁴⁶

Pendapat yang terakhir ini, berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i, di dalam kitabnya *al-Umm*. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa hak istri dalam nikah *tafwidh* bila suami telah bercampur (*dukhu*) dengan istri (wanita) tersebut, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar *mitsl*. Namun bila keduanya tidak sempat bercampur (*dukhu*) hingga suami menceraikannya, maka tidak ada baginya *mut'ah* (pemberian di luar mahar) atau setengah dari mahar.⁴⁷ Sedangkan jika salah seorang dari keduanya meninggal dunia sebelum ada ketetapan mahar, maka telah diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau menetapkan untuk Barwa' binti wasyiq, yang

⁴⁵Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th.), hlm. 201. Lihat juga Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah...*, hlm. 134

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid VII, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), hlm. 65

⁴⁷Imam al-Syafi'i, *al-Umm...*, hlm. 101

dinikahi tanpa mahar lalu suaminya meninggal dunia, maka baginya mahar *mitsl* dan Nabi Saw menetapkan pula baginya warisan.⁴⁸

Dalam pendapatnya yang lain, Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa akad nikah sah tanpa mewajibkan mahar. Hal itu karena thalak tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang telah melangsungkan akad nikah. Bolehnya akad nikah tanpa mahar menjadi bukti yang menunjukkan perbedaan antara nikah dan jual-beli. Jual-beli tidak sah kecuali dengan harga yang jelas. Sedangkan nikah sah tanpa mahar. Oleh karenanya akad nikah tanpa menyebutkan mahar tidak akan merusak akad yang telah terjadi.⁴⁹

Menurut Imam al-Syafi'i, surat al-Baqarah ayat 236 di atas, menunjukkan bahwa Allah Swt. memberitahu bahwa thalak jatuh pada wanita yang ditentukan maharnya, dan juga kepada perempuan yang tidak ditentukan maharnya. Thalak jatuh hanya kepada istri, dan istri hanya didapatkan dari pernikahan yang sah. Wanita berhak menerima mahar jika dia diceraikan meskipun dia dinikahi tanpa menyebutkan mahar (*mut'ah*).⁵⁰ Jika dia diceraikan setelah campur (*dukhol*) maka ia berhak menerima mahar *mitsl*.⁵¹ Inilah ketentuan yang jelas, dan selamanya tidak boleh merusak nikah dari segi mahar.

Selanjutnya Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa Ibnu Umar r.a. pernah berkata, "Setiap wanita yang dithalak berhak mendapatkan *mut'ah* kecuali wanita yang telah ditentukan maharnya dan belum dicampuri (*dukhol*), maka dia mendapat setengah dari mahar yang ditentukan". Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an. Adapun pendapatnya tentang wanita yang dithalak lainnya bahwa mereka berhak mendapatkan *mut'ah*,

⁴⁸*Ibid.*,

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 87-88. Lihat juga Imam al-Syafi'i, *al-Umm.*, Jilid V, hlm. 159. Lihat juga Imam al-Syafi'i, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), hlm. 198

⁵⁰Imam al-Syafi'i, *al-Umm.*, Jilid VII, hlm. 31

⁵¹*Ibid.*, Jilid V, hlm. 101

ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 236 di atas, serta firman Allah Swt:



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya)

mut'ah menurut yang ma'ruf'. (Q.S. al-Baqarah (2): 241)⁵²

Demikian pula kepada wanita yang minta diceraikan (*khulu*) dan wanita dari kalangan yang telah ditentukan sebagai wanita yang diceraai, mereka berhak mendapatkan *mut'ah* sesuai dengan firman Allah Swt. dan pendapat Ibnu Umar r.a.⁵³

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*, bahwasanya ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita yang *mufawwadha* (wanita yang dinikahi tanpa mahar), apabila ia diceraikan setelah dicampuri (*dukhu*) dan sebelum ditentukan baginya mahar, maka wajib baginya mendapatkan mahar *mitsl*, dan juga wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Tetapi apabila ia diceraikan sebelum ditentukan baginya mahar dan belum bercampur (*dukhu*), maka wanita tersebut tidak berhak mendapatkan mahar, tetapi ia berhak mendapatkan *mut'ah*.⁵⁴

Menurut mazhab Abu Hanifah pada waktu dilakukan akad nikah tidak disebutkan jumlah dan jenis mahar dan sebelumnya belum ditentukan mahar itu, seperti dalam nikah *Tafwidh* (wanita yang bersangkutan menyerahkan/mengizinkan dirinya dikawinkan dan ia tidak menentukan maharnya sendiri). Dengan berlangsungnya akad nikah ini wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar *mitsl*. Atau sepasang suami istri telah sepakat kawin tanpa mahar (nikah *tafwidh*), namun menurut hukum Islam suami harus juga

⁵² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48

⁵³ Imam al-Syafi'i. *al-Umm ...*, Jilid VII, hlm. 255. Lihat juga Imam al-Syafi'i, *Ahkam al-Qur'an ...*, hlm. 201-202.

⁵⁴Abdurrahaman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah* ..., hlm. 133

membayar mahar, sebab mahar itu adalah hak Allah Swt. Dalam hal ini istri berhak menerima mahar *mitsl*, karena ada keharusan dalam syara' bahwa suami membayar mahar kepada istrinya karena pernikahan. Orang yang melakukan pernikahan tidak berhak menghilangkan ketentuan itu.⁵⁵ Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah: 236:



Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (Q.S. Al-Baqarah (2): 236)⁵⁶

Karena ayat ini merupakan suatu perintah, maka perintah itu wajib untuk segera dilakukan, dan memenuhi kewajiban adalah termasuk berbuat baik. Disamping itu juga ada hadis yang menganjurkan pemberian mahar *mitsl* dan warisan (harta pusaka) kepada istri (wanita) *mufawwadhah*, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Akan tetapi Imam al-Syafi'i menerapkan hadis tersebut kepada sunat memberikan mahar *mitsl* dan pusaka (warisan) kepada istri (wanita) yang *mufawwadhah*, sebab akad nikah itu dengan ucapan. Jika mahar tidak ditentukan, maka tidak membatalkan nikah.⁵⁷ Sunat artinya diutamakan memberikan hak mahar *mitsl* kepada istri yang *mufawwadhah* dan telah campur (*dukhu*) ketika terjadi perceraian yang tidak dapat dirujuk lagi. Bila keduanya belum campur, maka tidak ada baginya (istri) *mut'ah* atau setengah daripada

⁵⁵Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1950), hlm. 210

⁵⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48

⁵⁷Ahmad Ibrahim bin Khalid al-Mausuli, *Mukhtashar al-Muzani*, (t.tp: t.p, t.th), hlm. 178-179

mahar.⁵⁸ Hal ini senada dengan pendapat yang menyatakan bahwa mahar diwajibkan karena adanya akad dan kewajibannya bertambah kuat karena telah bercampur (*dukhu*)⁵⁹

C. Metode Pengistimbatan Hukum Imam al-Syafi'i

Metode pengistimbatan hukum yang digunakan oleh seorang mujtahid, pada akhirnya akan mempengaruhi pendapat yang akan dikemukakan. Penulis di sini mengemukakan metode pengistimbatan hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i untuk mengetahui bagaimana kaitannya dengan pendapat yang dikemukakan tentang hak istri terhadap mahar dan mut'ah pasca perceraian dalam nikah *tafwidh*.

Sebagaimana Imam mazhab yang tiga lainnya, Imam al-Syafi'i termasuk golongan ahli as-sunnah wa al-jama'ah, ia menentukan *thuruq al-istinbat al-ahkam tersendiri*. Adapun langkah-langkah ijtihadnya adalah; "Asal adalah al-Qur'an dan Sunnah. Apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, ia melakukan qiyas terhadap keduanya. Apabila hadis telah *muttashil* dan sanadnya sahih, berarti hadis itu termasuk berkualitas (*muntaha*). Makna hadis yang diutamakan adalah makna zhahir, ia menolak hadis *munqathi*" kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab; pokok (*al-ashl*) tidak boleh dianalogikan kepada pokok; bagi pokok tidak perlu dipertanyakan 'mengapa' dan 'bagaimana' (*lima wa kaifa*); 'mengapa' dan 'bagaimana' hanya dipertanyakan kepada

⁵⁸ Imam al-Syafi'i. *al-Umm...*, Jilid V, hlm. 101

⁵⁹ Muhammad Bakr Ismail, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah baina al-Asholata wa at-Taujih*, (t.tp.: Dar al-Manar, 1996), hlm. 328

cabang (*furu'*).⁶⁰

Bertitik tolak dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pegangan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

1. Kitab suci al-Qur'an.
2. Hadis-hadis atau sunnah Nabi.
3. Ijma' (kesepakatan imam-imam mujtahid dalam satu masa)
4. Qiyas.⁶¹

Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah*, sebagai berikut:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلًّا أَوْ حَرَمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةِ الْعِلْمِ الْخَبَرِيُّ
الْكِتَابِ وَسُنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ.

"Tidak boleh seseorang mengatakan halal atau haram dalam hukum selamanya, kecuali ia memiliki pengetahuan tentang hal itu. Pengetahuan itu diperolehnya dari al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas".⁶²

Lebih lanjutnya, pokok pikiran ijtihad Imam al-Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitab *al-Umm*, sebagai berikut:

⁶⁰Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani, 1987, hlm. 95. Ahmad Amin menjelaskan langkah-langkah ijtihad Imam al-Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i, rujukan pokok adalah al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah, hukumnya ditentukan dengan cara qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijma' lebih diutamakan atas *khbar mufrad*. Makna yang diambil dari hadis adalah makna *zhahir*; apabila suatu lafad *ihthimal* (mengandung makna lain), maka makna *zhahir* lebih diutamakan. Hadis *munqathi* ditolak kecuali jalur Ibn al-Musayyab. *Al-ashl* tidak boleh diqiyaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah; keduanya dipertanyakan hanya kepada *furu'*. Qiyas dapat menjadi *hujjah* jika pengqiyasannya benar. Lihat Ahmad Amin, *Duha al-Islam*, Jilid II, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1974), hlm. 223

⁶¹Sirajuddin Abbas, *Sejarah Keagungan Mazhab Syafi'i*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), hlm. 119

⁶²Imam al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1939), hlm. 39

الْأَصْلُ قُرْآنٌ وَسُنَّةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قِيَاسٌ عَلَيْهَا وَإِذَا اتَّصَلَ الْحَدِيثُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَصَحَّ
الْإِسْنَادُ فَهُوَ الْمُنْتَهَى وَالْإِجْمَاعُ أَكْبَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْمَفْرَدِ وَالْحَدِيثُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِذَا احْتَمَلَ
الْمَعْنَى فَمَا شَبَّهَ مِنْهَا ظَاهِرًا أَوْلَاهُ وَإِذَا تَكَافَأَتِ الْإِحَادِيثُ فَاصْحَحْهَا إِسْنَادًا أَوْ هَذَا. وَلَيْسَ
الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ مَاعَادًا مُنْقَطِعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَلَا قِيَاسَ أَصْلٍ عَلَى أَصْلٍ وَلَا يُقَالُ لِأَصْلٍ
لَمْ؟ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْفُرُوعِ لَمْ، كَيْفَ. فَإِذَا صَحَّ قِيَاسٌ عَلَى الْأَصْلِ صَحَّ وَقَامَتْ بِهِ حُجَّةٌ.

"Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan sunnah. Maka jika tidak ada, qiyaskanlah kepada al-Qur'an dan sunnah. Dan apabila sanad hadis bersambung kepada Rasulullah Saw, dan sanadnya shahih, maka itulah yang dipakai. Ijma' lebih kuat dari khabar ahad dan hadis menurut zhahirnya. Dan apabila suatu hadis mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahirnyalah yang utama. Kalau hadis itu sama tingkatannya maka yang lebih shahihlah yang utama. Hadis munqathi' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada qiyas yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah".⁶³

Dari pernyataannya di atas, dapat dipahami bahwa pokok-pokok pikiran Imam al-

Syafi'i dalam mengistimbatkan hukum adalah:

a. Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Imam al-Syafi'i memandang al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Ia menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurutnya sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir. Di samping itu, karena al-Qur'an dan sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Dalam pelaksanaidkannya, Imam al-Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam al-Quran sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak

⁶³Imam al-Syafi'i, *al-Umm...*, hlm. 120

ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum dengan berdasarkan zhahir al-Qur'an atau sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan mukhashish dari al-Qur'an dan sunnah. Selanjutnya menurut Syayid Muhammad Musa dalam kitabnya *al-Jihad*, Imam al-Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari zhahir nash al-Qur'an dan sunnah serta tidak ditemukan mukhashishnya, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukannya, maka dicari lagi bagaimana pendapat para sahabat. Jika ditemukan ijma' dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai.⁶⁴

Dalam pandangan Imam Al-Syafi'i as-sunnah merupakan penjelasan al-qur'an merinci yang global. Jika as-sunnah tidak seperingkat dengan al-Qur'an, tentulah as-sunnah tidak berfungsi sebagai penjela. Untuk menghindari kekeliruan tanggapan terhadap pandangannya mempersamakan peringkat al-Qur'an dan as-sunnah, perlu dijelaskan:

1. Bahwa as-sunnah yang seperingkat dengan al-Qur'an adalah as-sunnah al-mutawatir (*sabitah*), sama-sama *qat'i al-wurud* sedang hadis ahad tidak seperingkat (karena *zanni al-wurud*), tetapi yang boleh mentakhsiskan ayat al-Qur'an yang zanni adalah karena sama-sama zanni.
2. Bahwa sama-sama seperingkat keduanya adalah dalam istimbat dan furu' bukan dalam menetapkan aqidah.
3. Bahwa kesamaan peringkat tersebut, tidak boleh diartikan sebagai menurunkan al-Qur'an dari posisinya sebagai pokok dan sendi agama Islam. Demikian juga tidak boleh diartikan sebagai menaikkan posisi as-sunnah dari posisinya sebagai cabang

⁶⁴Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. Ke- I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 127-128

dan penjelas al-Qur'an. Persamaannya dalam hal sama menjadi landasan istimbat hukum furu'.⁶⁵

Adapun dalam menerima hadis ahad Imam al-Syafi'i mensyaratkan sebagai berikut:

1. Perawinya terpercaya.
2. Perwinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
3. Perawinya Dhabit (kuat ingatan).
4. Perwinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikannya kepadanya.
5. Perwinya itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.

b. Ijma'

Imam al-Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menetapkan ijma, ini sesudah al-Qur'an dan al-sunnah sebelum qiyas. Imam al-Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diingatkan dalam al-Qur'an dan al-sunnah.

Ijama' yang digunakan Imam al-Syafi'i sebagai dalil hukum adalah ijma' yang didasarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari rasulullah Saw. Secara tegas ia mengatakan bahwa ijma' yang bersetatus dalil hukum itu adalah ijma' sahabat.

c. Qiyas

Imam al-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, sunnah dan ijma' dalam menetapkan hukum.⁶⁶

⁶⁵Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Konsep Imam Syafi'i*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 56-57

⁶⁶Huzaimah Tahiyado Yanggo, *Pengantar Perbandingan ...*, hlm. 129-131

⁶⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an* ..., hlm. 452

كُلُّ مَا نَزَلَ بِمُسْلِمٍ فِيهِ حُكْمٌ لَازِمٌ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ فِيهِ دَلَالَةٌ مَوْجُودَةٌ وَعَلَيْهِ إِذَا كَانَ
بِعَيْنِهِ حَكْمٌ اتَّبَاعُهُ: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِعَيْنِهِ طَلَبُ الدَّلَالَةِ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ فِيهِ بِالْإِجْتِهَادِ
وَالْإِجْتِهَادُ الْقِيَاسُ.

“Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan orang Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukum. Jika ketentuan hukum itu disebutkan, maka haruslah diikuti; jika tidak, maka haruslah dicari indikasi yang mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad. Ijtihad itu adalah qiyas”⁷⁰.

Pernyataan tersebut, menegaskan bahwa fungsi al-Qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya al-Qur'an atau as-sunnah guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas dijelaskan dalam al-Qur'an atau as-sunnah.⁷¹

Berkenaan dengan system pengistimbatan hukum yang telah diuraikan di atas, terlihat dalam menetapkan hukum Imam al-Syafi'i menetapkan al-Qur'an dan as-sunnah sebagai dua sumber dalil *naqli* yang pokok bagi hukum Islam. Kemudian diiringi dengan *ijma'* sebagai dalil *naqli* yang ketiga sebagai penyerta dalil-dalil *naqli* pertama dan kedua (al-Qur'an dan hadis), lalu diikuti oleh fatwa sahabat, sebagai pelengkap dan penyempurna dalam memecahkan masalah-masalah fiqhiyyah yang ketentuan hukumnya tidak tersurat atau tersirat dalam ketiga dalil *naqli* di atas, ia memanfaatkan dalil-dalil *aqli* seperti qiyas, apa yang pernah dilakukan nabi atau keputusan nabi. Daan tetap menjadikan al-Qur'an dan as-sunnah sebagai dasar pijakan dan sekaligus alat kontrol ijtihadnya.

⁷⁰Imam al-Syafi'i, *ar-Risalah*..., hlm. 477

⁷¹Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas*..., hlm. 99

yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (Q.S. Al-Baqarah (2): 236)⁷³

Menurut Imam al-Syafi'i, surat al-Baqarah ayat 236 di atas, menunjukkan bahwa Wanita berhak menerima mahar jika dia diceraikan meskipun dia dinikahi tanpa menyebutkan mahar (*mut'ah*) dalam nikah *tafwidh*.⁷⁴ Jika dia diceraikan setelah campur (*dukhu*) maka ia berhak menerima mahar *mitsl*.⁷⁵

Di samping itu diperintahkan pula oleh hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Ibn Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرُوعِ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abû Bakar bin Abi Syaibah, 'Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyân, Firâs, Sya'bi, Masrûq, Abdullah: Sesungguhnya ditanya tentang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu meninggal dunia, belum menggauli isterinya, belum menunaikan maharnya. Berkata 'Abdullah: perempuan itu berhak atas maharnya, mewarisi dari suaminya, dan berlaku 'iddahnya. Berkata Ma'qil bin Sinân al-Asyja'i: Saya menyaksikan Rasulullah saw., memutuskan hukum pada Barwa' binti Wâsiq seperti demikian"⁷⁶

Menurut kalangan syafi'iyah, pemberian *mut'ah* tersebut dikuatkan oleh al-Qur'an, al-Sunnah serta ijma' (konsensus) dikalangan ulama. Khususnya pada ijma', terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fukaha tentang hukum memberikan *mut'ah*, ada sebagian mereka yang berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib hukumnya diberikan kepada

⁷³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48

⁷⁴Imam al-Syafi'i, *al-Umm*..., Jilid VII, hlm. 31

⁷⁵*Ibid.*, Jilid V, hlm. 101

⁷⁶Al-Hâfidz Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazîd al-Qazwîni Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Jilid I, (t.t: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), hlm. 609. Hadis no. 1891 dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban (4098, 4099) dan dinilai *shahih* oleh al-Bani di dalam *shahih* Abu Daud. Lihat juga Siddiq bin Hasan bin 'Ali al-Hasani al-Qanujî, *al-Rawdat al-Nadfiyyah*, Jilid II, (Mesir: Idarat al-Taba'at al-Muniriyyah, t.th.), hlm. 38

istri akibat perceraian, termasuk dalam golongan ini adalah ulama Hanafiyah dan Imam al-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadid*). Pendapat ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah 236, dimana firman Allah Swt.: *atau kamu menentukan maharnya*, maksudnya belum kamu tentukan. Maksudnya selama belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya. Diantara dalil yang menunjukkan makna tersebut adalah firman Allah pada ayat setelahnya tentang hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan ditentukan maharnya, yaitu pada surat al-Baqarah 237. Ayat pertama (236), menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi *mut'ah*. Ayat kedua, menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan.

Metode pemahaman dua ayat di atas, firman Allah pada ayat pertama: “*dan berilah mut'ah mereka*” adalah suatu perintah. Perintah secara hakikat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda-tanda yang menyertainya (*qarinah*) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran atau sejenisnya. Ketika tidak didapatkan *qarinah*, perintah di sini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib. Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili menjelaskan;

الْأَمْرُ يُدَلُّ عَلَى جُوبِ الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَلَا يُصَرَّفُ عَنِ الْجُوبِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ
مِنَ الْقَرَائِنِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

Artinya: “Perintah itu menunjukkan wajib melaksanakan hal yang diperintahkan, dan tidak dapat dipalingkan dari hukum wajib kepada yang lain kecuali ada salah satu qorinah yang menunjukkan hal itu”.⁷⁷

Mut’ah wajib bagi wanita yang tercerai sebelum dicampuri dan belum dipastikan maharnya. Untuk memperkuat kewajiban *mut’ah* ditunjukkan dengan firman Allah Swt. selanjutnya:



Artinya : “Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Al-Baqarah (2): 236)⁷⁸

Kata *ala* yang berarti “atas” pada ayat di atas bermakna kewajiban dan kata *haqqan* yang berarti “pasti” memperkuat kewajiban dari sisi lafaz lain, karena hakikatnya menuntut kewajiban. Penggabungan kata *ala* dan *haqqan* menuntut penguatan atas hukum wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhi, di bawah ini:

الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

Artinya: “Makna pokok dari suatu pembicaraan adalah makna hakiki”.⁷⁹

Dari kaidah fiqhi di atas, Shalih ibn Ghanim al-Syadlan menjelaskan bahwa mengerjakan ungkapan pembicara (Allah, orang yang berakad, orang yang berjanji dan sebagainya) wajib dilakukan menurut isi yang dibicarakan

⁷⁷ hlm. 219

⁷⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48

⁷⁹Shalih ibn Ghanim al-Syadlan, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Kubra*, (Riyad: Dar al-Balinsiyah, 1417 H), hlm. 163

berdasarkan maknanya yang hakiki ketika tidak ada qorinah yang menunjukkan maksud majazi.⁸⁰

2. Kewajiban *mut'ah* dalam kondisi ini sebagai pengganti kewajiban, yaitu separuh *mahar mitsil*. Pengganti wajib hukumnya juga wajib, karena ia menempati di tempat wajib dan memposisikan pada posisinya.
3. Dasar mereka, thalak ini jatuh pada nikah sedangkan menikah menuntut pengganti (*iwadh*) yang didapatkan wanita. Dalam kondisi mahar disebutkan baginya separuh mahar (*musamma*) itu jika thalak terjadi sebelum bercampur dan dalam kondisi mahar tidak disebutkan, baginya *mut'ah* sehingga pernikahan ini tidak lepas dari *iwadh* (pengganti) bagi wanita.

Pentingnya mahar dalam pernikahan, menurut Imam Malik bahwa mahar merupakan rukun nikah, hukum memberikannya adalah wajib. Hal ini membuktikan bahwa dalam pernikahan wajib adanya mahar, kontan maupun hutang, walaupun sebagian ulama fukaha selain Imam Malik menyatakan bahwa mahar bukan rukun nikah, dan bukan pula syarat sah pernikahan, tetapi mahar itu wajib sebab adanya *watha'*. Adanya penyebutan mahar atau mas kawin pada saat akad bukanlah satu rukun dan bukan pula syarat, sebab mahar adalah satu aturan yang muncul dari adanya akad.

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya, berdasarkan Q.S. an-Nisa 4. Oleh karenanya Imam al-Syafi'i mewajibkan pemberian mahar sepenuhnya apabila terjadi *khalwat* antara suami dan istri. Sebab dengan terjadinya *khalwat* itu dapat dijadikan dasar bahwa telah terjadi *dukhl* (campur)

⁸⁰*Ibid.*,

antara keduanya, pihak suami wajib membayar mahar sepenuhnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam akad nikah. Akan tetapi, apabila terdapat alat-alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah *berkhalwat*, belum terjadi persetubuhan, dalam hal ini jika suami menceraikan istrinya, ia tidak wajib membayar mahar sepenuhnya karena belum terjadi *dukhul* dan suami wajib membayar separuhnya saja, berdasarkan Q.S. al-Baqarah 237. Ayat ini menunjukkan hak istri terhadap mahar yang telah ditentukan dan ditetapkan pada waktu akad. Disamping itu al-Qur'an bukan hanya sekali menisbahkan hak mahar bagi para wanita (istri). Misalnya Q.S. an-Nisa 20, ayat yang dijadikan dalil tentang tidak bolehnya mahar diambil kembali oleh suami. Sebab mahar merupakan konsekuensi hubungan suami istri yang kokoh serta tersirat di dalamnya suatu perjanjian yang kuat. Dalam hal ini sejalan dengan ayat berikutnya an-Nisa 21.

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya, segala sesuatu yang dapat menjadikan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Bahkan dalam suatu *qaul*-nya ia berkata bahwa berhemat dalam pemberian mahar adalah lebih disukai dari pada berlebih-lebihan. Beliau mengambil dalil dari hadits Nabi Saw.:

أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ أَخْفَهُ مَوْنَةٌ

"Keberkatan yang terbesar dalam suatu perkawinan ialah yang ringan maharnya".⁸¹

Dari pernyataan Imam al-Syafi'i dengan legitimasi hadits Nabi Saw. tersebut di atas, jelas menunjukkan pentingnya membatasi jumlah mahar yang harus dibayar oleh

⁸¹Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 82

pihak suami yang pada prinsipnya jumlah mahar yang harus dibayarkan harus seimbang dan sesuai dengan situasi dan kondisi kedua belah pihak (suami istri).

Suatu kenyataan, Islam tidak pernah menentukan jumlah yang pasti berapa besar nilai mahar. Sebab menentukan jumlah tertentu, mengandung beberapa implikasi. Tentu dianggap sesuatu yang berat sebelah (timpang), sementara Islam menganjurkan suatu perkawinan lalu menentukan nilai mahar yang mungkin tidak terjangkau oleh seseorang. Penentuan jumlah mahar juga akan menciptakan jurang antara berbagai tingkat sosial dalam masyarakat, segi negatif lain dari ditentukannya mahar adalah anggapan bahwa perkawinan itu tidak lebih dari suatu jual beli.

Dengan tidak ditentukannya jumlah mahar secara tetap memberikan gambaran bahwa perkawinan itu bukan suatu yang sulit dan mahal, tetapi tidak pula dimudahkan. Jika perkawinan itu dianggap sebagai suatu yang sulit secara ekonomi, mereka (manusia) tentu lebih memilih budak daripada membayar mahar yang cukup tinggi. Mahar bukan sesuatu benda yang hanya mempunyai nominal tertentu, mahar bisa berwujud cincin kawin atau mengajarkan istri memahami al-Qur'an.

Berdasarkan pembahasan di atas, nyatalah bahwa syariat Islam tidak membatasi kadar mahar yang diberikan suami kepada istrinya. Syari'at Islam menyerahkannya kepada masyarakat untuk menetapkan menurut adat yang berlaku di kalangan mereka dan menurut kemampuan dari pihak suami. Sebab mahar yang diberikan oleh calon suami itu sebagai imbalan dari kerelaan calon istri untuk hidup bersama sebagai suami istri. Kerelaan dan persetujuan itu dinyatakan oleh kedua belah pihak calon mempelai di dalam shighat akad nikah (*ijab dan qabul*) yang mereka ucapkan.

Sedangkan golongan pendapat kedua (*mut'ah* adalah sunnah, tidak wajib) mengambil dalil dari firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah 236, dan firman Allah Swt.:



Artinya : “*Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya)*

mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah (2): 241)⁸²

Metode pemahaman dua ayat di atas ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban tidak hanya dikhususkan pada orang-orang yang berbuat baik dan takwa, tetapi juga kepada yang lain. Ketika *mut'ah* dikhususkan kepada mereka, menunjukkan bahwa *mut'ah* hukumnya tidak wajib.
2. Kekhususan *mut'ah* kepada orang-orang yang berbuat baik dan takwa didasarkan pada kebaikan (*ihsan*) dan anugrah, kebaikan tidak wajib.

Dalil yang dijadikan dasar bagi pendapat kedua terjawab, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* akibat terjadinya perceraian yang ditujukan terhadap orang yang berbuat baik dan takwa, tidak menghilangkan kewajiban terhadap yang lain. Perbandingannya dengan firman Allah Swt. bahwa *al-Qur'an menunjukkan kepada orang-orang takwa*⁸³ (QS. Al-Baqarah (2): 2), hal ini tidak meniadakan bahwa al-Qur'an juga menunjukkan kepada manusia seluruhnya, baik yang takwa, orang-orang yang berbuat

⁸²*ibid.*, hlm. 49

⁸³*ibid.*, hlm. 2

baik dan yang lainnya.⁸⁴ Pendapat yang kuat diantara dua golongan di atas adalah pendapat yang pertama karena kuat dalilnya dan selamat dari kontradiksi.

Disamping itu, *mut'ah* merupakan salah satu bukti keindahan syari'at Islam, di mana fungsi pemberian *mut'ah* kepada istri yang tercerai adalah untuk mengobati rasa kecewa dan sakit hati dalam diri istri akibat terjadinya perceraian. Hal ini juga menyiratkan bahwa seorang suami diperintahkan oleh Allah Swt. untuk memperlakukan istri dengan bijaksana, menghargai perasaannya serta menunjukkan kepadanya kebaikan. Istri tidak boleh dibuat segan, ragu-ragu atau tidak menentu oleh suaminya. Ini jualah yang menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian yang lebih terhadap hak-hak istri (wanita) berkenaan dengan pernikahan, terutama dalam nikah *tafwidh*..

⁸⁴Syaeikh Syamsuddin Abi Faraj ibn 'Abdurrahman ibn Abi 'Umar Muhammad ibn Ahmad ibn Khudamah al-Mukhadisy, *Al-Mughni*, Juz VIII, (Mekkah: al-Maktabah al-Tijarah, t. th.), hlm. 48

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang hak istri terhadap mahar dan mut'ah pasca perceraian dalam nikah *tafwidh* menurut pemikiran Imam al-Syafi'i, maka disini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahar dalam sistem perkawinan berkedudukan sebagai suatu kewajiban harta yang harus diberikan suami kepada istri dalam akad nikah dengan pertimbangan kemampuan suami serta persetujuan istri. Mahar menjadi hak istri sepenuhnya, sehingga bentuk dan nilainya sangat ditentukan oleh istri. Mahar bisa berbentuk uang, benda atau jasa tergantung permintaan istri.
2. *Mut'ah* merupakan suatu hukum syar'i yang kedudukannya sebagai ganti rugi akibat adanya perceraian (thalak). Bagi suami yang menjatuhkan thalak harus memberikan *mut'ah* sebagai suatu kewajiban baginya. Salah satu fungsi pemberian *mut'ah* kepada istri yang tercerai adalah untuk mengobati rasa kecewa dan sakit hati dalam diri istri akibat terjadinya perceraian serta sebagai bekal untuk kehidupannya di kemudian hari.
3. Menurut Imam al-Syafi'i bahwa seorang wanita (istri) yang dinikahi oleh seorang lelaki tanpa disebutkan mahar ketika akad (nikah *tafwidh*), kemudian dithalak setelah campur (*dukhu*), maka ia (istri) wajib memperoleh mahar *mitsl*, tetapi bila dithalak sebelum campur (*dukhu*), maka tidak ada mahar *mitsl* dan tidak ada kewajiban *mut'ah* bagi wanita (istri) tersebut.

B. Saran-Saran

Dengan melihat pemikiran Imam al-Syafi'i, seorang ahli perlu berpegang teguh dalam memegang ketentuan nash yang telah jelas. Dengan sikap seperti ini seorang ahli dapat lebih berhati-hati, sehingga tidak terjadi keputusan yang melampaui ketentuan nash.

Selain itu bagi seorang ilmuwan, ketika mengembangkan pemikiran seorang tokoh hendaknya mengkaji pemikiran dari setiap sudut yang memungkinkan, karena pemikiran seseorang tidak terlepas dari pengaruh waktu, kondisi yang mengitarinya serta tujuan yang ingin dicapainya.

Perlu adanya kajian yang mendalam tentang hak istri terhadap mahar dan mut'ah dalam pernikahan serta transformasi fikih dengan melakukan ijtihad baru terhadap mahar dan mut'ah sebagai salah satu hak istri relevansinya dengan dunia kekinian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abadi, Mujaddid Muhammad Ya'qub al-Fairuz, *al-Kamus al-Muhith*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996)
- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah Keagungan Mazhab Syafi'i*, Cet. ke-7, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995)
- 'Abd al-Hadi, Abu Syari' Muhammad, *Jawaz al-Mut'ah*, (Kairo: Dar al-Dhahbiyah, t.t.)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Penerj. Abdul Majid Khon, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdurrazaq, Mushthafa, *A'lam al-Islam*, (t.t.: 'Isa al-Halbi, tth.)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995)
- 'Abidin, Ibn, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, Jilid III, (Mesir: al-Halabi, 1966)
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fikh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Al-Daraini, Fathi, *al-Fikh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazhahib*, (Damasku: Mathba'atu Thursin, 1980)
- Ad-Dardir, Abu Al-Barkat Ahmad bin Muhammad, *Asy-Syarh Ash-Shaghir 'ala Aqrb al-Masalik ila Madzhab al-Imam Malik*, Juz II, (t.tp.: asy-Syaikh Rashid bin Sa'id al-Maktum, t.th.)
- Al-Ansari, Abi Yahya Zakariyya, *Fath al-Wahhab*, Jilid II, (Mesir: Mustafa al-Babi al-halabi wa awladuh, 1948)
- Al-'Arabi, Ibnu, *Ahkam al-Qur'an*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.)
- Al-Arwi, Abdurrazak bin 'Abd al-Majid, *Mauqifu al-Aimatu al-Arba'ah wa A'alam Madzahibihim min al-Rafidhah wa Mauqifu al-Rafidhah Minhum*, (t.tp.: t.p, t.th.)
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain, *Sunan al-Baihaqi*, Juz VII, (Lebanon: Darul Ma'arif, t.th.)
- Al-Basri, Abi al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994)

Al-Buhati, *Kasysyaf Al-Qana' 'an Matnil Iqna'*, Juz V, (Riyadh: Maktabah An-Nashr al-Haditsah, t.th.)

Al-Fayumi, Ali Maqri, *al-Misbahu al-Munir*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriah, t.th.)

Al-Ghazali, Abu Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, *al-Musthasfa min 'Ilmi al-Ushul*, Juz I, (t.tp.: Dar Fikr, t.th.)

al-Hadi, Abu Syari' Muhammad 'Abd, *Jawaz al-Mut'ah*, (Kairo: Dar al-Dhahbiyah, t.th.)

Al-Hakim, Muhammad Taqiya, *al-Ushul al-"Ammat li al-Fikh al-Muqarin*, (Beirut: Dar al-Andalus, 1963)

Al-Hamidi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz I, (Kairo: Muhammad Ali Syubaih wa auladuhu, 1968)

al-Hambali, Syeikh Mansur ibn Yunus al-Bahwaiti, *Kasyaf al-Qina'*, Juz. V, (Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 1997)

al-Hambali, Abi Abdullah Muhammad ibn Abd al-Hadi al-Muqadisi, *Manaqib al-Aimatu al-Arba'ah R.A*, (t. tp.: Dar al-Mu'yid, t.th.)

Al-Hanafi, As-Surakhi, *Al-Mabsuth*, (Lebanon: Dar al-Ma'arif, 1986)

Al-Hummam, Ibnu, *sharh Fath al-Qadir*, Jilid III (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970)

Al-Indunisi, Ahmad Nahravi Abdus Salam, *Al-Imam Asy-Syafi'i fi Mazhabihial-Qadim wa al-Jadid, Ensiklopedia Imam Asyafi'i*, Penj. Usman Sya'roni, (Jakarta: Mizan Publika, 2008)

Al-Jassas, Ahmad bin Ali al-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, Juz II, (kairo: Dar al-Mushaf, t.th.)

Al-Jaziri, 'Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

Al-Jundi, Abd Al-Halim, *Al-Imam Asy-Syafi'i: Nashir al-Sunnah wa Wadli al-Ushul*, (t.tp.: Dar al-Qalam, 1966)

Al-Khinn, Musthafa Sayyid, *Dirasah at-Tarikhiyah li al-Fikh wa Ushulih wa al-Ittijahat al-lati zhaharat fihima*, (Damaskus: tp., 1984)

Al-Mahalliy, Jalal al-Dien, *Sharh Minhaj al-Thalibin*, Jilid III (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Kubra, t.th.)

Al-Maliki, Ibnu Jazyi, *Al-Qawaninu al-Ahkam Asy-syar'iyyah wa Masa'ilul Furu' al-Fikhiyyah*, (Beirut: Darul Ilmi lil Malayin, t.th.)

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Maraghi*, Jilid (t. tp.: Dar al-Fikr, t. th.)
- Amin, Ahmad, *Dhuha al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1974)
- Al-Misr, 'Alamah Abi al-Fadli Zamal al-Din Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqy, *Lisan al-Arab*, Jilid III, (Beirut: Dar Shadir, 1990)
- Al-Mukhadisiy, Syaikh Syamsuddin Abi Faraj 'Abdurrahman ibn Abi 'Umar Muhammad ibn Ahmad ibn Khudamah, *Al-Mughni*, Juz VIII, (Mekkah: al-Maktabah al-Tijarah, t. Th.)
- Al-Muzni, Imam Abi Ibrahim Ismail ibn Yahya Ibn Ismail al-Misri, *Mukhtar al-Muzni fi Furu' al-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998)
- An-Nawawi, Muhyi ad-Din, *Kitab al-Majmu' Sharh al-Muhajjab li Syiradjji*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.)
- Al-Nawawi, *Tahzib al-Asma' wa al-Lughat*, (Mesir: Muniriyyah, Jilid I, tt)
- Al-Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz IX, (Beirut Dar al-Ma'rifah, 1995)
- Al-Nisaburi, Abi Hasan "Ali ibn Ahmad al-Wahdi, *Asbabu al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991)
- Al-Nuwairi, Imam, *Nihayah al-Arb*, (t.tp.: Dar al-Kutub, t.th.)
- Anas, Imam Malik ibn, *Al-Muwatha'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- Al-Qanuji, Siddiq bin Hasan bin 'Ali al-Hasani, *al-Rawdat al-Nadiyyah*, Jilid II, (Mesir: Idarat al-Taba'at al-Muniriyyah, t.th.)
- Al-Qathan, Manna' Khalil, *At-Tasyri' wa al-Fikh al-Islami*, (Beirut: Muasasah Risalah, 1986)
- Al-Qudamah, Ibnu, *al-Mughniy*, Jilid VII, (Kairo: Mathba'ah al-Kahirah, 1969)
- Al-Qulyubi, Syihab al-Din Ahmad Ibn Salamah, Syihab al-Din Ahmad al-Burlisi al-Mulaqab bi 'Umairah, *Hasyiyatani Qultubi- 'Umairah*, Juz X, (t.tp: Dar al-Fikr, t. Th.)
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-Ansari, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993)
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid II, (Koira: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyat, 1969)

- Al-Rahman, Jalal al-Din Abd, *Ghayatu al-Mushul ila Daqaiqa Ilmi al-Ushul*, Juz I, (Kairo: Mathba'ah al-Sa'diyah, 1979)
- al-Rasyidi, Ahmad, *Hukuq al-Insan; Dirasah Muqaranah fi al-Nazhariyah wa al-Tathbiq*, (Kairo: Maktabah al-Syuruk al-Dauliyah, 2003)
- Al-Razi, Imam Fakhruddin, *Tafsir al-Kabir*, Jilid VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1990)
-, *al-Mahshul fi Ilmi al-Ushul*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988)
- Al-Salam, Ahmad Nahrawi 'Abd, *al-Imam Asy-Syafi'i fi Madzhabaih fi al-Qadim wa al-Jadid*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1994)
- Al-Sajstani, Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abi Daud*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Al-Sarakhsy, Abu Bakar bin Sahl, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001)
- Al-Syarbaini, Syeikh Syamsuddin Muhammad ibn al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009)
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th.)
- Al-'Syarkhawi, Hasan 'Abd, *Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qarn al-Rabi'a al-Hijriy*, (t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th)
- Al-Syawkani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Nayl al-Awthar*, Jilid VI, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladuhu, t.th.)
- Al- Syirazi, Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Firuzabadi, *Al-Muhadzdzab*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1995)
- Al-Subki, Tazuddin Abi Nasr 'Abd al-Wahhab ibn 'Ali ibn 'Abd al-Kafi, *At-Thabaqat Asy-Syafi'iah al-Kubra* Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1999)
- As-Subki, Ali Yusuf, *Nizhaamul Ussrah fil-Islam, Membangun Surga dalam Keluarga*, Penej. Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005)
- Al-Yamani, Abi Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-'Imrani Asy-Syafi'i, *Al-Bayan fi Madzhab al-Imam Asy-Syafi'i*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000)
- Al-Yamani, Muhammad bin Isma'il al-Amir , *Subul al-Salam*, Jilid III, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladuh, 1950)

- As-Suyuti, Jalal al-Din, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Juz I, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.)
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz I, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001)
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Juz III, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt.)
- Ash-Shiddiqi, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Jilid II, 1973)
- Asy-Syafi'i, Imam, *Kitab al-Umm*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993)
-, *Kitab al-Umm*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, , 1993)
-, *Musnad al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996)
- Asy-Syafi'i, Abi Zakariya Yahya Muhyi al-Din Syaraf al-Din al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010)
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih al-Ushrah al-Muslimah, Fikih Keluarga*, Penej. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhad Sayyed Hawwas *al-Ushrah wa ahkamuha fi al-Tasyri' al-Islami, Fikih Munakahat*, Penej. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fikh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997)
- Bek, Khudary, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (t.t.: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007)
- Basyir, A. Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000)
- Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

- Farid, Syeikh Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, (Kairo: Dar al-Akidah, 2005)
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan; Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajiban*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989)
- Habib, Sa'di Abu, *Kamus al-Fikhiyah Lughatahan wa Istilahan*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998)
- Hajar, Ibn, *Tawali al-Ta'sis fi Ma'ali Muhammad ibn Idris*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
- Haikal, Muhammad Husain, *Hayat Muhammad*, (t.t.: Lajnah at-Ta'lif, 1956)
- Hakim, 'Abd al-Hamid, *al-Mu'in al-Mubin*, Jilid IV, (Bukit Tinggi: Maktaba Nusantara: 1959)
- Hambal, Ahmad ibn, *Musnad Ahmad*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fikih Mu'amalat)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)
- Hasymi, A., *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995)
- I. Doi, Abdur Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Basri Iba Asghary, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
-, *Penjelasan lengkap Hukum-hukum Allah, Syari'ah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002)
- Ibrahim Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Tasyri' al-Siyasi*, (Kairo: Maktabah Nahdhatul Misyriyah, 1949)
- Juzay, Ibn, *Qawwanin al-Ahkam al-Syariah*, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.)
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, (Kairo: Dar al-Fikri, t.th.)
-, *Tarikh ibn Khaldun*, (t.t.: an-Nahdhah, 1936)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ushul al-Fikh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968)
- Khal'ahzi, Muhammad Rawas, *Mausu'ah Fikh 'Umar ibn al-Khatab*, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1981)
- Khilikkan, Ibnu , *Wafayat al-A'yan*, (t.tp.: an-Nahdhah, t.th.), hlm. 258. Ath-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1977)

- Kudzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995)
- Ma'ani, Abd al-'Adzim dan al-Ghundur, Ahmad, *Hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari'at*, Penj. Usman Sya'rani, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)
- Madkur, Muhammad Salam, *al-Fikh al-Islamiy*, (Makakah: Maktabah Adullah Wahbah, 1955)
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008)
- Manzur, Ibn, *lisan al-'Arab*, Juz II, (Beirut: Dar Shadir, 1990)
- Ma'luf, Luwis, *al-Mundzid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986)
- Mubarak, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
-, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Mujieb, M. Abdul, Cs, *Kamus istilah fikh*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003)
- Mubayidh, Makmun, *Saling Memahami Dalam Bahtera Rumah Tangga: Contoh Kasus dan Cara Menyikapi Berbagai Perbedaan Antara Suami dan Istri*, Terjemahan Saefuddin Zuhri dari "*Attafaahum fii- Hayati az-Zaujiyyah*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fikh 'ala Madzahib al-Khamsah*, Terj. Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994)
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Mudkhal lid Dirasah al-Fikh al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1961)
- Nasution, Harun, *Filsafat dan Mistisme*, (Jakarta: UI Press, 1973)
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976)
- Praja, Juhaya S., *Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (bandung: Remaja Rosda Karya, 2000)
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikri, th)
- Rifa'i, Ahmad Farid, *Mu'jam al-Udaba'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt)

- Rahman, Fazlur, *Islam*, (University of Chicago Press, 1979)
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973)
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fikh al-Sunnah*, Jilid VII, (Kuwait: Dar al-bayan, 1968)
- Sa'ad, Ibnu, *ath-Thabaqat al-Qubra*, (Beirut: t.p., 1957)
- Saefuddin, A. M. et. al, *Desekulerisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*, (Bandung: Mizan, 1987)
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam yang Termasyhur*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Salim, Amru Abdul Mun'im, *Fikih Ath- Thalak min al-Kitab wa as-Sunnah*, Terj. Futhul Arifin, *Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Syurbasi, Ahmad, *Al-Aimatu al-Arba'ah*, Terj. Sabil Huda, A. Ahmadi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Sulamah, Muhammad, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, (Mesir: Maktabah Sayyid 'Abdullah Wahbah, t.th.)
- Taimiyah, Ibnu, *Ahkam al-Jawaz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988)
- W John, M.D Jacobs, , *Agar Perkawinan Bertahan Selamanya Tak Cukup Hanya Cinta: Strategi untuk Menghindari Perceraian*. Terjemahan Willibrordus Hermawan dari "All You Need is Love and Other Lies About Marriage Work", (Jakarta: Gramedia, 2005)
- Yusuf, Abi Ishak Ibrahim Ibn Ali Ibn, *al-Muhadzab*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1995)
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957)
-, *Asy-Syafi'i Hayatuhu Wa 'Ashruhu Wa fiqhuhu*, (t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978)
-, *Tarikh Madzahib Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.)

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Zein, Satria Effendi M., *Mazhab-mazhab Fikh Sebagai Alternatif*, dalam Ibrahim Hosen, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990)